

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada
Tanggal 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018**

***PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019 and
Consolidated Statements of Financial Position
As of January 1, 2019/ December 31, 2018***

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 serta Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi pada Tanggal 1 Januari 2019/ Desember 31, 2018		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019 Consolidated Financial Position Statement As of January 1, 2019/ December 31, 2018</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
1 JANUARI 2019/ 31 DESEMBER 2018**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION AS OF JANUARY 1, 2019/
DECEMBER 31, 2018**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We the undersigned :

- | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1. Nama | : | Dani Rusli Utama | : | Name 1. |
| Alamat Kantor | : | Grha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan, Medan 20411 | : | Office Address |
| Alamat Domisili
sesuai
KTP atau Identitas | : | Jl. Batik Kumeli No. 39, RT. 10 RW. 07
Kelurahan Sukaluyu,
Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung | : | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor Telepon | : | (061) 41000055 | : | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Utama / <i>President Director</i> | : | Position |
| 2. Nama | : | Roy Leonard | : | Name 2. |
| Alamat Kantor | : | Grha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1
Belawan, Medan 20411 | : | Office Address |
| Alamat Domisili
sesuai KTP atau
Identitas | : | Jl. Kakap Raya No. 10, RT. 015 /RW. 005
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung | : | Domicile as stated
in ID Card |
| Nomor Telepon | : | (061) 41000055 | : | Phone Number |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i> | : | Position |

Menyatakan bahwa:

State that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak (Grup). | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Subsidiaries (Group).</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. <i>The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3. a. <i>All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.</i> |



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.

4. We are responsible for the Group's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Medan, 27 Februari 2021/ *February 27, 2021*

Dani Rusli Utama
Direktur Utama/
President Director

Roy Leonard
Direktur Keuangan /
Finance Director

**RSM**

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/ Number : 00005/3.0310/AU.1/05/0500-1/1/III/2021

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224

T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333
F +62 31 9953 2121

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2021 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2019 dan 2018.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and its subsidiaries as of and for the year ended December 31, 2019 were audited by other independent auditor whose report dated February 25, 2021 expressed an unmodified opinion with an emphasis of a matter paragraph regarding restatement of the 2019 and 2018 consolidated financial statements.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan


Endang Pramuwati

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 27 Februari 2021/ February 27, 2021

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
1 Januari 2019/ 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2020 and 2019 and
January 1, 2019/ December 31, 2018

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018*) Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	5, 35, 36	1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	1,999,187,810,035	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha					Account Receivables
Pihak Berelasi	6, 35, 36	11,876,312,566	18,111,394,049	19,862,922,891	Related Parties
Pihak Ketiga	6, 36	37,628,434,744	102,578,835,091	128,344,759,035	Third Parties
Persediaan	7	24,320,421,565	18,285,397,823	25,388,282,754	Inventories
Pajak Dibayar di Muka	18.a	370,872,432,580	513,720,664,592	277,103,058,715	Prepaid Taxes
Uang Muka		12,298,232,820	30,567,021,098	14,538,229,477	Advances
Biaya Dibayar di Muka		11,529,761,873	10,802,022,747	6,022,726,033	Prepaid Expenses
Piutang Lain-lain	8, 36	12,748,999,709	140,247,755,871	152,502,106,674	Other Receivables
Jumlah Aset Lancar		2,046,355,454,207	2,601,861,970,354	2,622,949,895,614	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	9	49,376,851,450	49,104,901,998	50,361,736,861	Investment in Associates
Properti Investasi - Bersih	10	421,403,835,085	416,965,309,815	416,270,074,823	Investment Properties - Net
Aset Tetap - Bersih	11	6,173,831,565,523	6,118,441,232,921	5,714,241,312,891	Fixed Assets - Net
Aset Takberwujud - Bersih	12	6,803,184,823,107	6,649,202,795,568	4,883,081,150,924	Intangible Assets - Net
Aset Hak Guna	13	185,908,147,497	--	--	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	18.d	214,614,702,227	98,301,867,821	37,053,926,881	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	68,784,413,346	33,322,993,759	83,031,279,132	Other Non-current Assets
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	15, 36	2,682,469,344	2,171,080,675	20,049,725,276	Other Non-current Financial Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		13,919,786,807,579	13,367,510,182,557	11,204,089,206,788	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		15,966,142,261,786	15,969,372,152,911	13,827,039,102,402	TOTAL ASSETS

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta
1 Januari 2019/ 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**

As of December 31, 2020 and 2019 and
January 1, 2019/ December 31, 2018

(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	1 Januari 2019/ 31 Desember 2018/ January 1, 2019/ December 31, 2018*) Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Pendek	35, 36	--	--	17,992,184,312	Short term Bank Loans
Utang Usaha					Account Payables
Pihak Berelasi	16, 35, 36	107,235,762,901	198,122,846,257	321,505,188,327	Related Parties
Pihak Ketiga	16, 36	690,958,119,601	1,692,574,184,059	1,453,653,391,682	Third Parties
Uang Panjar	36	5,090,823,228	6,882,913,253	9,201,376,083	Advance from Customer
Uang Titipan	36	25,616,668,977	28,794,888,017	22,354,600,138	Fund Retained
Beban Akrual	17, 36	212,182,969,344	126,585,980,305	502,756,307,640	Accrued Expenses
Utang Pajak	18.b	73,167,416,298	78,534,281,525	77,508,016,452	Taxes Payables
Utang Lain-lain					Other Payables
Pihak Berelasi	35, 36	84,100,000,000	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	36	6,439,906,928	5,687,533,567	4,170,747,659	Third Parties
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:					Current Portion of Long-Term Liabilities:
Liabilitas Sewa	21, 36	3,092,006,632	--	--	Lease Liabilities
Utang Bank	19, 36	410,495,386,081	214,549,156,365	175,000,140,000	Bank Loans
Utang Obligasi	20, 36	499,768,052,410	--	50,000,000,000	Bonds Payables
Pendapatan Diterima di Muka	23	75,572,947,543	62,827,108,376	42,756,096,092	Unearned Income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2,193,720,059,943	2,414,558,891,724	2,676,898,048,385	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang	19, 36	6,149,254,631,216	5,751,017,927,371	3,364,720,079,181	Long-Term Bank Loan
Utang Obligasi	20, 36	449,208,310,134	948,223,476,755	947,431,699,211	Bonds Payables
Liabilitas Sewa	21, 36	174,120,268,700	--	--	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	23	211,116,483,637	234,342,579,167	234,184,192,281	Unearned Incomes
Liabilitas Imbalan Kerja	22	431,079,806,893	395,256,776,193	281,353,710,808	Employee Benefit Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	18.d	16,143,682	--	3,004,567,975	Deferred Tax Liability
Provisi	24	97,094,046,289	30,410,559,634	--	Provisions
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		7,511,889,690,551	7,359,251,319,120	4,830,694,249,456	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		9,705,609,750,494	9,773,810,210,844	7,507,592,297,841	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000					Share Capital - Par Value Rp1.000.000
Per Saham Masing-masing untuk					Per Share for Serie A Golden Stock and
Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B					Serie B, Respectively
Modal Dasar - 6.800.000 Saham Terdiri dari:					Authorized Capital - 6.800.000 Shares are
1 Saham Seri A Dwiwarna dan					as Follows: 1 Share of Serie A Golden
6.799.999 Saham Seri B					Stock and 6,799,999 Shares of Serie B
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
1.700.000 Saham pada 2020 dan 2019					1.700.000 Shares in 2020 and 2019 are
Terdiri dari: 1 Saham Seri A Dwiwarna					as Follows: 1 Share of Serie A Golden
dan 1.699.999 Saham Seri B	25	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	1,700,000,000,000	Stock and 1,699,999 Shares of Serie B
Tambahan Modal Disetor	26	527,133,217,252	527,133,217,252	527,133,217,252	Other Additional Paid in Capital
Saldo Laba:					Retained Earnings:
Ditentukan Penggunaannya		3,133,238,001,980	2,964,202,637,380	2,417,571,145,154	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		309,298,348,908	285,263,383,703	892,685,591,490	Unappropriated
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		(221,734,832,975)	(219,825,654,767)	(156,632,343,276)	Remeasurement of Employee Benefits Liability
Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada					Equity Attributable to Owner of the Parent
Pemilik Entitas Induk		5,447,934,735,165	5,256,773,583,568	5,380,757,610,620	Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	812,597,776,127	938,788,358,499	938,689,193,941	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		6,260,532,511,292	6,195,561,942,067	6,319,446,804,561	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		15,966,142,261,786	15,969,372,152,911	13,827,039,102,402	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

*) As Reclassified (Note 44)

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Note	2020 Rp	2019*) Rp	
Pendapatan Operasi	29, 35	3,083,846,945,033	3,104,233,009,111	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan	29	(80,531,064)	(186,734,654)	Revenue Reduction
Pendapatan Bersih		3,083,766,413,969	3,104,046,274,457	Net Revenue
Pendapatan Konstruksi	30	758,143,856,767	2,535,336,461,063	Construction Revenue
Beban Operasi	31	(2,407,778,400,729)	(2,505,837,092,694)	Operating Expenses
Beban Konstruksi	30	(758,143,856,767)	(2,535,336,461,063)	Construction Expenses
LABA USAHA		675,988,013,240	598,209,181,763	OPERATING INCOME
Pendapatan (Beban) Non-Usaha - Bersih	32	10,622,527,353	(29,984,043,453)	Non-Operating Incomes (Expenses) - Net
Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya		(2,869,692,607)	(1,241,661,903)	Loss on Sale of Other Non-Current Assets
Pendapatan Keuangan	33	54,804,981,286	83,524,481,960	Finance Income
Beban Keuangan	33	(526,995,276,449)	(361,773,502,212)	Finance Cost
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi	9	271,949,452	(756,834,865)	Equity in Profit/ (Loss) of Associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		211,822,502,275	287,977,621,290	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	18.c	(28,702,132,305)	(81,801,152,446)	Income Tax Expense
Laba Tahun Berjalan		183,120,369,970	206,176,468,844	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lainnya				Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	22	(2,373,484,648)	(84,262,989,457)	Remeasurement of Defined Benefits Obligations
Pajak Penghasilan Terkait		459,722,900	21,060,834,110	Related Income Tax
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		(1,913,761,748)	(63,202,155,347)	Other Comprehensive Income for the Year Net of Tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		181,206,608,222	142,974,313,497	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				Profit for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		309,298,348,909	285,263,383,703	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	(126,177,978,939)	(79,086,914,859)	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		183,120,369,970	206,176,468,844	Total Comprehensive Income for the Year
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada:				Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		307,389,170,700	222,070,072,212	Owners of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	28	(126,182,562,478)	(79,095,758,715)	Non-Controlling Interest
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		181,206,608,222	142,974,313,497	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Per Saham Dasar	34	181,940	167,802	Basic Earning Per Share

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Note	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Tambah Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Sifatnya (BPYBDS)/ Government Grant with Unspecified Used (BPYBDS)	Saldo Laba/ Retained Earnings		Pengukuran Kembali Imbalan Kerja/ Remeasurement of Employee Benefits	Jumlah/ Total	Kepentingan Non Pengendali/ Non- controlling Interest	Jumlah/ Total	
				Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated					
Saldo 31 Desember 2018/ 1 Januari 2019	511,960,000,000	1,188,040,000,000	527,133,217,252	2,468,202,043,804	911,814,406,602	(158,092,943,897)	5,449,056,723,761	1,030,520,665,623	6,479,577,389,384	Balance of Desember 31, 2018/ January 1, 2019
Reklasifikasi	1,188,040,000,000	(1,188,040,000,000)	--	(50,630,898,650)	(19,128,815,112)	1,460,600,621	(68,299,113,141)	(91,831,471,682)	(160,130,584,823)	Reclassification
Saldo 31 Desember 2018/ 1 Januari 2019 *)	1,700,000,000,000	--	527,133,217,252	2,417,571,145,154	892,685,591,490	(156,632,343,276)	5,380,757,610,620	938,689,193,941	6,319,446,804,561	Balance of Desember 31, 2018/ January 1, 2019*)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	285,263,383,703	--	285,263,383,703	(79,086,914,859)	206,176,468,844	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(63,193,311,491)	(63,193,311,491)	(8,843,856)	(63,202,155,347)	Other Comprehensive Income
Tambahan Setoran Modal	26	527,133,217,252	--	--	--	--	527,133,217,252	79,200,000,000	606,333,217,252	Paid in Capital
Dividen	27	--	--	--	(319,135,000,000)	--	(319,135,000,000)	--	(319,135,000,000)	Dividends
Cadangan Umum	27	--	(527,133,217,252)	592,679,406,602	(592,679,406,602)	--	(527,133,217,252)	--	(527,133,217,252)	General Reserve
Penyesuaian Cadangan Umum	--	--	--	(46,047,914,376)	19,128,815,112	--	(26,919,099,264)	(5,076,727)	(26,924,175,991)	General Reserve Adjustments
Saldo 31 Desember 2019	1,700,000,000,000	527,133,217,252	--	2,964,202,637,380	285,263,383,703	(219,825,654,767)	5,256,773,583,568	938,788,358,499	6,195,561,942,067	Balance of Desember 31, 2019
Dampak Penerapan Awal PSAK 71 dan 73	3c	--	--	--	(56,177,065,510)	--	(56,177,065,510)	(8,019,893)	(56,185,085,403)	Impact on Initial Implementation PSAK 71 and 73
Saldo 31 Desember 2019/ 1 Januari 2020 *)	1,700,000,000,000	527,133,217,252	--	2,964,202,637,380	229,086,318,193	(219,825,654,767)	5,200,596,518,058	938,780,338,606	6,139,376,856,664	Balance of Desember 31, 2019/ January 1, 2020*)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	309,298,348,909	--	309,298,348,909	(126,177,978,939)	183,120,369,970	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	--	--	(1,909,178,208)	(1,909,178,208)	(4,583,540)	(1,913,761,748)	Other Comprehensive Income
Dividen	27	--	--	--	(60,050,953,594)	--	(60,050,953,594)	--	(60,050,953,594)	Dividends
Cadangan Umum	27	--	--	309,460,760,856	(309,460,760,856)	--	--	--	--	General Reserve
Penyesuaian Cadangan Umum	--	--	--	(140,425,396,256)	140,425,396,256	--	--	--	--	General Reserve Adjustments
Saldo 31 Desember 2020	1,700,000,000,000	527,133,217,252	--	3,133,238,001,980	309,298,348,908	(221,734,832,975)	5,447,934,735,165	812,597,776,127	6,260,532,511,292	Balance of Desember 31, 2020

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019*) Rp	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6, 23, 29	3,093,927,923,463	3,154,912,013,643	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok, Karyawan dan Lainnya	8, 16, 17, 31, 32	(2,510,783,382,685)	(2,473,780,660,630)	Payment to Suppliers, Employees and Others
Pembayaran Pajak Penghasilan	18	(98,164,769,227)	(198,399,235,972)	Income Tax Paid
Penghasilan Bunga	33	55,811,388,982	85,557,939,556	Interest Received
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		540,791,160,533	568,290,056,597	Net Cash Flows Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya	10, 11, 13	(507,986,496,553)	(681,942,982,867)	Acquisition of Fixed Assets, Investment Properties and Other Assets
Perolehan Aset Takberwujud	12	(292,118,799,206)	(1,821,464,850,631)	Acquisition of Intangible Assets
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(800,105,295,759)	(2,503,407,833,498)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM FINANCING
AKTIVITAS PENDANAAN				ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	19	938,629,323,916	2,548,638,368,700	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	19	(385,957,543,847)	(194,473,234,614)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Utang Obligasi	20	--	(50,000,000,000)	Payment of Obligation Liabilities
Pembayaran Beban Keuangan	33	(519,874,711,982)	(360,751,288,137)	Payment of Financial Expenses
Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak		--	79,200,000,000	Receipt of Paid-in Capital in Subsidiaries
Pembayaran Dividen	27	(60,050,953,594)	(319,135,000,000)	Payment of Dividend
Penerimaan Pinjaman Lainnya	35	84,100,000,000	--	Receipt of Other Loans
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		56,846,114,493	1,703,478,845,949	Net Cash Flows Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(202,468,020,733)	(231,638,930,952)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1,767,548,879,083	1,999,187,810,035	CASH AND CASH EQUIVALENTS BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	CASH AND CASH EQUIVALENTS END OF THE YEAR

*) Reklasifikasi (Catatan 44)

*) As Reclassified (Note 44)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("Perusahaan") dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama "Haven Badriff". Selanjutnya, setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PN Pelabuhan. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan ("BPP"). Pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983, BPP diubah menjadi Perseroan Umum Pelabuhan I ("Perumpel I"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991, Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87.

Perusahaan secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada Perusahaan untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir mengenai perubahan jenis saham. Perubahan terakhir tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 17 tanggal 13 September 2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri

a. The Company Establishment

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ("the Company") was formerly known as "Haven Badriff" in the period of Dutch Colonialism. Furthermore, after the independency of the Republic of Indonesia in 1945 until 1950, the Company has changed its status into Jawatan Pelabuhan. In 1969, the Jawatan Pelabuhan was changed into the State Owned Enterprise ("BUMN") under the name of Perusahaan Negara Pelabuhan known as PN Pelabuhan. From 1969 to 1983, PN Pelabuhan then changed into Lembaga Pengusaha Pelabuhan under the name of Badan Pengusahaan Pelabuhan ("BPP"). In 1983, based on the Government Regulation No. 11 year 1983, BPP was changed into Perseroan Umum Pelabuhan I ("Perumpel I"). Based on the Government Regulation No. 56 year 1991, the Perumpel I changed the status into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The change of the Company's name into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was based on the Notarial Deed No. 1 dated December 1, 1992 of Imas Fatimah, SH., Notary in Jakarta and has approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. C2-8519.HT.01.01 Year 1992 dated June 1, 1992 and stated on the State Gazette of Republic of Indonesia No. 8612 on November 1, 1994, Supplement No. 87.

The Company officially became a Port Business Entity (BUP) based on Ministry of Transportation Decree No.KP.133 Year 2011 dated March 2, 2011 on the issuance of license to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Business Entity (BUP). The BUP license authorizes the Company to manage sea ports and its facilities.

The Company's Articles of Association have been amended for several times, the latest amendment regarding change in the types of share. The latest amendment was notarized under Deed No. 17 dated September 13, 2019 of Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan. Such amendment was approved by the Ministry

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0079552.AH.01.02.2019 tanggal 7 Oktober 2019.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, barang termasuk hewan (*general cargo*), dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering (*general cargo*) dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, *multi purpose*, penumpang, pelayanan rakyat dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instalasi limbah serta pembuangan sampah;

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0079552.AH.01.02.2019 dated October 7, 2019.

b. The Purpose and Objective

In accordance with the article 3 of the Company's article of association, the objectives and purposes of the Company are conducting operation in port services and optimization of its sources in generate high quality and competitive goods and services for obtaining profit to obtain benefits in order to increase the value of the Company by applying the principles of limited liability corporation.

In order to achieve the above objectives and purposes, the Company may engaged in following business activities:

- Providing and/or servicing the port harbor for traffic and ship quayside areas;
- Providing and/or servicing the related pilotage and tugboats;
- Providing the services of quayside and other facilities such as moorings, containers loading, liquid bulk, dry bulk, multi-purposes, goods including animals (*general cargo*), and passenger station and/or vehicle facility;
- Providing the loading services and unloading container, liquid bulk, dry bulk (*general cargo*) and vehicle;
- Providing the services of container terminal (*general cargo*), liquid bulk, dry bulk, multi purposes, passenger, roll on roll of shipyard and cruise passengers;
- Providing the services of warehousing, open storage, tank, place of stockpiling, loading and discharging tool and port equipment;
- Providing the services of land rental for buildings and fields, industries and buildings related to the smoothness of multi-mode transportation;
- Providing the services of electricity, fresh water, waste installation and garbage dump services;

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo petikemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi serta pelayanan logistik; dan
- Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Kegiatan usaha lainnya tersebut meliputi jasa angkutan, jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan, jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang pelabuhan, jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship to ship transfer*), properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan kehotelan, jasa konsultan dan *surveyor* kepelabuhanan, jasa komunikasi dan informasi, jasa konstruksi kepelabuhanan, jasa *forwarding*/ekspedisi, jasa kesehatan, perbekalan dan katering, tempat tunggu kendaraan bermotor dan *shuttle bus*, jasa penyelaman, jasa *tally*, jasa pas pelabuhan dan jasa timbangan.

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 15 (enam belas) Pelabuhan Cabang dan 11 (sebelas) Pelabuhan Kawasan (Perwakilan), serta 1 (satu) unit usaha. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Cabang Utama Kelas : Belawan
2. Cabang Kelas Satu : Dumai, Terminal Petikemas Belawan
3. Cabang Kelas Dua A (IIA) : Pekanbaru
4. Cabang Kelas Dua B (II B) : Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung
5. Cabang Kelas Tiga : Batam, Sei Pakning, Sibolga

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *Providing the services of refueling for ship and vehicle at port;*
- *Providing the services of consolidated activities, goods distribution including animals;*
- *Providing the management of education and training consultancy services related to ports;*
- *Providing the container depot services and repairmen, cleaning, fumigation, and logistic; and*
- *Providing the custom area and temporary dump.*

Beside the above main scope of business, the Company could also conduct other business activities to support the Company's objectives and in optimizing its resources utilization. Other scope of business are including transportation services, equipment rental and repair facilities, ships and equipment maintenance in port services, ship to ship transfer services, property outside the main port activities, industrial area, tourism and hotel facility, consultant and port surveyor services, communication and information services, port construction services, forwarding/expedition services, health care services, supplies and catering, vehicle stop station and shuttle bus area, diving services, tally services, port ticket and weight scale services.

In providing its services, the Company has 15 (sixteen) Port Branches and 11 (eleven) Representative Office Branches, and 1 (one) business unit. Work areas of operational branches of port are as follows:

1. *Prime Class of : Belawan Branch*
2. *First Class of : Dumai, Terminal Branch Petikemas Belawan*
3. *Second Class of : Pekanbaru Branch A (IIA)*
4. *Second Class of : Tanjungpinang, Branch B (II B) Tanjung Balai Karimun, Kuala Tanjung*
5. *Third Class of : Batam, Sei Branch Pakning, Sibolga*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. Cabang Kelas : Malahayati,
Empat Lhoksumawe,
Tanjung Balai
Asahan
7. Cabang Kelas Lima : Tembilahan,
Gunung Sitoli
8. Unit Galangan kapal di Belawan, Medan

6. Fourth Class of : Malahayati,
Branch Lhoksumawe,
Tanjung Balai
Asahan
7. Fifth Class of : Tembilahan,
Branch Gunung Sitoli
8. Shipyard unit in Belawan, Medan

c. Manajemen Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

Jabatan	Nama/ Name		Position
	2020	2019	
Komisaris Utama	Achmad Djamaludin	Refly Harun	President Commissioner
Komisaris	Arman Depari	Lukita Dimarsyah Tuwo	Commissioners
	Herbert Timbo Parluhutan Siahaan	Heryadi	
	Ahmad Perwira Mulia Tarigan	Bambang Setyo Wahyudi	
	Irma Suryani Chaniago	Winata Supriatna	
	Winata Supriatna	-	
Direktur Utama	Dani Rusli Utama	Dian Rachmawan	President director Operational and
Direktur Operasi dan Komersial	Ridwan Sani Siregar	Syahputera Sembiring	Commercial Director
Direktur Teknik	Hosadi A. Putra	Hosadi A. Putra	Technical Director
Direktur Keuangan	Roy Leonard	M. Nur Sodik	Finance Director
Direktur Sumber Daya Manusia	Henry Naldi	M. Hamied Wijaya	Human Resource Director
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Prasetyo	Ihsanuddin Usman	Transformation and Business Development Director

c. The Company's Management

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 di atas telah diaktakan masing- masing dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 18 Mei 2020 dan No. 5 tanggal 11 November 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan.

The amendment of composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 above was notarized under deed No. 3 dated May 18, 2020 and No. 5 dated November 11, 2020 of Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan.

Susunan Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerisasi dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee and Nomination, Remuneration and Risk Management Committee as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jabatan	Nama/ Name		Position
	2020	2019	
Ketua	Heryadi	Heryadi	Chairman
Wakil Ketua	Lukita Dinarsyah Tuwo	Lukita Dinarsyah Tuwo	Vice Chairman
Anggota	Eddy Hary Susanto	Eddy Hary Susanto	Members
	Saiful Bahri	Saiful Bahri	

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp22.620.561.934 dan Rp21.981.273.209.

Key management personnel are the Company's Board of Commissioners and Directors. Short term compensation paid to the key management personnel of the Company for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp22,620,561,934 and Rp21,981,273,209, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mempunyai masing-masing 1.341 dan 1.377 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2020 and 2019, the Company had 1,341 and 1,377 permanent employees (unaudited), respectively.

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, Sumatera Utara.

The Company's headquarter is located at Grha Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, North Sumatera.

d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada tanggal 10 Juni 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-281/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum obligasi Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo sebesar Rp950.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut (Catatan 20):

d. Public Offering if the Company's Bonds

On June 10, 2016, the Company has obtained the effective statement from the Financial Services Authority (OJK) Board of Commissioners Decree No. S-281/D.04/2016 to conduct its bond public offering with the amount of Rp1,000,000,000,000. As of December 31, 2020 and 2019, the total outstanding of bonds payable was amounting to Rp950,000,000,000 which consists of the following bond series (Note 20):

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Par Value (Rp)	Tenor (Tahun)/ (Year)	Tanggal Penerbitan/ Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
1	Obligasi Seri B/ Bonds Tranche B	500,000,000,000	5	21/06/2016	21/06/2021
2	Obligasi Seri C/ Bonds Tranche C	400,000,000,000	7	21/06/2016	21/06/2023
3	Obligasi Seri D/ Bonds Tranche D	50,000,000,000	10	21/06/2016	21/06/2026
		950,000,000,000			

e. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, struktur Grup adalah sebagai berikut:

e. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As of December 31, 2020 and 2019 the structure of the Group is as follows:

Nama Perusahaan/Name of Companies	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Presentase Kepemilikan/Percentage of Ownership			
				Jumlah Aset/ Total Asset		2019	
				2020	Rp Jutaan/ Million	%	Rp Jutaan/ Million
<u>Kepemilikan Langsung/ Direct Ownership</u>							
PT Prima Indonesia Logistik	Medan	Jasa Logistik/ Logistic Service	2015	99,67	391,773	99,67	372,424
PT Prima Pengembangan Kawasan	Medan	Pengembangan Kawasan/ Region Developer	2019	90	899,389	90	898,145
PT Prima Husada Cipta Medan	Medan	Layanan Jasa Kesehatan/ Health Care Services	2016	99,68	38,321	99,68	22,107
PT Prima Terminal Petikemas	Medan	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	-	70	3,233,654	70	3,223,796
PT Prima Multi Terminal	Medan	Terminal Konvensional/ Multicargo Terminal	2019	55	3,971,707	55	4,232,028

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nama Perusahaan/ Name of Companies	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Type of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Presentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			
				Jumlah Aset/ Total Asset		2019	
				2020	Rp Jutaan/ Million	%	Rp Jutaan/ Million
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/ Indirect Ownership</u>							
<u>Dimiliki Melalui/ Owned Through PT Prima Indonesia Logistik</u>							
PT Prima Multi Peralatan	Medan	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan/ Equipment Maintenance and Repair Service	2019	99	28,098	99	13,148
<u>Entitas Asosiasi/ Associates Entities</u>							
PT Terminal Petikemas Indonesia	Jakarta	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Service	-	25	134,140	25	133,111
<u>Dimiliki Melalui/ Owned Through PT Prima Indonesia Logistik</u>							
PT Prima Tangki Indonesia			2019	20	212,363	20	221,720

PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")

PIL didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 26 September 2014 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan pada dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27882.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014. Anggaran dasar PIL telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 7 tertanggal 15 Oktober 2020 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0407025 tanggal 12 November 2020. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019. PIL berdomisili di Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI Ujung Baru, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PIL pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp204.820.000.000 dan atau sebesar 99,67%, sedangkan 0,33% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Peti Kemas Kota Medan ("Kopkapek UTPK").

PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")

PIL was established based on deed No. 34 dated September 26, 2014 by Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-27882.40.10.2014 dated October 6, 2014. PIL's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 17 dated October 15, 2020 the Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan concerning dismissal and appointment of the President Commissioner of the PIL. The amendment deed was reported to and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0407025 dated November 12, 2020. The Company is domiciled in Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI Ujung Baru, Belawan, Kota Medan, North Sumatera 20411.

The value of the Company's shares in PT Prima Indonesia Logistik as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp204,820,000,000 or 99,67%, while the remaining 0.33% were owned by the Employee Cooperative Port of Medan City Container Business Unit ("UTPK Kopkapek").

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT Prima Pengembangan Kawasan (“PPK”)

PPK didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 8 September 2015 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 8 September 2015. Anggaran dasar PPK telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Februari 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang perubahan anggaran dasar PPK. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0122011 tanggal 4 Maret 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PPK pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp759.000.000.000 atau sebesar 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh PMT

PT Prima Husada Cipta Medan (“PHCM”)

PHCM didirikan berdasarkan akta No. 4 tanggal 8 November 2016 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0052052.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 7 tanggal 19 November 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian Direksi PT PHCM. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0421276 tanggal 18 Desember 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PHCM pada 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp15.840.000.000 atau sebesar 99,68%, sedangkan 0,32% lainnya dimiliki oleh Koperasi Karyawan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

PT Prima Terminal Petikemas (“PTP”)

PTP didirikan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar, SH., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT Prima Pengembangan Kawasan (“PPK”)

PPK was established based on Deed No. 15 dated September 8, 2015 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-2455231.AH.01.01. Tahun.2015 dated September 8, 2015. The PPK's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 1 dated February 1, 2020 by Risna Rahmi Arefa, SH., Notary in Medan, concerning amendments to the articles of association. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0122011 dated March 4, 2020.

The value of the Company's investment in PPK as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp759,000,000,000 or 90%, respectively, while the remaining 10% was owned by PMT.

PT Prima Husada Cipta Medan (“PHCM”)

PHCM was established based on deed No. 4 dated November 8, 2016 by Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0052052. AH.01.01. Year 2016 dated November 22, 2016. The articles of association have been amended several times, the latest being amended through deed No. 7 dated November 19, 2020 by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0421276 dated December 18, 2020.

The value of the Company's investment in PHCM as of December 31, 2020 and 2019, each amounting to Rp15,840,000,000 or 99.68%, respectively, while the other 0.32% is owned by the Employees Cooperative of the Headquarters of PT Pelabuhan Indonesia I Medan.

PT Prima Terminal Petikemas (“PTP”)

PTP was established based on deed No. 162 by July 30, 2013 Rahmad Nauli Siregar, SH., Notary in Medan on, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keputusan No. AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 3 September 2013. Akta Notaris No. 33 tanggal 19 November 2020 oleh Henry Tjong, SH. di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PT PTP. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0417536 tanggal 10 Desember 2020. Perusahaan masih dalam tahap pengembangan dan belum memulai kegiatan usaha secara komersial.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PTP pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp855.724.000.000 atau sebesar 70%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) sebesar 15% dan PT Hutama Karya (Persero) sebesar 15%.

PT Prima Multi Terminal ("PMT")

PMT didirikan berdasarkan akta No. 04 tanggal 26 September 2014 oleh Tuti Sumarni, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26883.40.10.2014 tanggal 29 September 2014. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 9 tanggal 16 Oktober 2020 oleh Risna Rahmi Arifa, SH., di Medan tentang pemberhentian dan pengangkatan Komisaris PMT. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0401701 tanggal 26 Oktober 2020.

Nilai saham penyertaan Perusahaan pada PMT pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp807.048.000.000 atau sebesar 55%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. sebesar 25% dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar 20%.

PT Prima Multi Peralatan ("PMP")

PMP didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., M.H di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006164.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Anggaran dasar telah

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

46327.AH.01.01.Year 2013 dated September 3, 2013. The PTP's articles of association have been amended the last time amended through No. 33 dated November 19, 2020 Deed by Notary Henry Tjong, SH., Notary in Medan. concerning dismissal and appointment of the President Director of PTP. The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on December 10, 2020 under Decree No. AHU-AH.01.03-0417536. The company is still in the development stage and has not commenced its commercial operations.

The value of the Company's shares in PTP as of December 2020 and 2019 amounted to Rp855,724,000,000 or 70%, respectively, while the remainder was owned by PT Wijaya Karya (Persero) by 15% and PT Hutama Karya (Persero) by 15%.

PT Prima Multi Terminal ("PMT")

PMT was established based on deed No. 04 dated September 26, 2014 by Tuti Sumarni, SH., Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-26883.40.10.2014 dated September 29, 2014. The PMT's articles of association have been amended, most recently by Notarial Deed No. 9 dated October 16, 2020 by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan, concerning dismissal and appointment of the Commissioners of the PMT, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0401701 dated October 26, 2020.

The value of the Company's investment in PMT as of December 31, 2020 and 2019 was Rp807,048,000,000 or 55%, respectively, while the remainder was owned by PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. by 25% and PT Waskita Karya (Persero) Tbk by 20%.

PT Prima Multi Peralatan ("PMP")

PMP was established based on deed No. 74 dated December 28, 2018 made by Notary Hj. Bambang Suprianto, SH., Sp.N., MH in Jakarta and got approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0006164.AH.01.01.Year 2019 dated February 6, 2019. The PMP's articles of association have been amended, most recently

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir kali diubah melalui Akta Notaris No. 22 tanggal 11 September 2020 oleh Abidin S Panggabean, SH., di Medan. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0062790.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PIL memiliki 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.375.000.000.
- PMT memiliki 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp125.000.000.

PT Terminal Petikemas Indonesia (“TPI”)

TPI didirikan berdasarkan akta No. 36 tanggal 10 April 2013 oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.K., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2013.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 37.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.000.

PT Prima Tangki Indonesia (“PTI”)

PTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 12 Desember 2013 oleh Rahmad Nauli Siregar SH., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

by Notarial Deed No. 22 dated September 11, 2020 by Abidin S Panggabean, SH Notary in Medan, concerning dismissal and appointment of the Commissioners of the PMT, and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0062790.AH.01.02 dated September 11, 2020.

The capital share ownership of issued and fully paid capital is as follows:

- PIL owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp12,375,000,000.
- PMT owns 1% or 125 shares with total amount of Rp125,000,000.

PT Terminal Petikemas Indonesia (“TPI”)

TPI was established based on deed No. 36 Jakarta dated April 10, 2013 by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.K., Notary in, and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-21873.AH.01.01.Year 2013 April 24, 2013 and was announced in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 10, 2013.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- The Company owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with nominal amount of Rp37,500,000,000.

PT Prima Tangki Indonesia (“PTI”)

PTI was established under Notarial Deed No. 41 dated December 12, 2013 of Public Notary Rahmad Nauli Siregar, SH., and was approved by the Minister of Justice of the Republic of

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keputusan No. AHU-68302.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013.

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 27 April 2016 oleh Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notaris di Jakarta tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT PIL telah menyertakan saham sebanyak 18.000 lembar saham PT PTI, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008200.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016.

Anggaran Dasar PTI telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Notaris No. 18 tertanggal 18 September 2019 dari Notaris Melisa Wljaya SH, di Jakarta. Akta perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0346754 tanggal 17 Oktober 2019.

Komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. memiliki 49% atau sebanyak 88.200 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp44.100.000.000.
- PT Tason Putra Mandiri memiliki 22,80% atau sebanyak 41.040 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.520.000.000.
- PIL memiliki 20% atau 36.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp18.000.000.000.
- Tuan Gaotama Setiawan memiliki 8,20% atau 14.760 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.380.000.000.

2. Ketentuan Kepelabuhanan

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Indonesia in his Decision Letter No. AHU-68302.AH.01.01.Year 2013 dated December 27, 2013.

Based on Deed No. 65 dated April 27, 2016 by Ashoya Ratam, SH., M.kn, Notary in Jakarta concerning the Declaration of Decisions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders', PT PIL has approved the purchase of 18,000 shares in PT PTI, and the deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0008200.AH.01.02.Year 2016 dated April 28, 2016.

PTI's Articles of Association have been amended, most recently under Notarial Deed No. 18 dated September 18, 2019 made by Melisa Wljaya SH, Notary in Jakarta. This deed of amendment was approved and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-AH.01.03-0346754 dated October 17, 2019.

The capital share ownership of issued and fully paid capital are as follows:

- Charleston Logistics Pte. Ltd. owns 49% or 88,200 shares with nominal amount of Rp44,100,000,000.
- PT Tason Putra Mandiri owns 22,80% or 41,040 shares with nominal amount of Rp20,520,000,000.
- PIL owns 20% or 36,000 shares with nominal amount of Rp18,000,000,000.
- Mr. Gaotama Setiawan owns 8,20% or 14,760 shares with nominal amount of Rp7,380,000,000.

2. Port Regulations

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the Company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

- a. Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai BUP (Catatan 1a).
 - d. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
 - e. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
 - f. Peraturan menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2014.
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.
 - h. Peraturan Menteri No. PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- b. *Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.*
 - c. *Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a BUP (Note 1a).*
 - d. *Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).*
 - e. *Government Regulation No. 11 Year 2015 regarding Type and Tarif on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.*
 - f. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 6 Year 2013 on Type, Structure, and Group Rates Ports Services, as amended by Regulation of the Minister of Transportation No. 15 of 2014.*
 - g. *Regulation of the Minister of Transportation No 15 Year 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector.*
 - h. *Ministerial Regulation No. PM 51 Year 2015 on Implementation Seaport.*
 - i. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 69 Year 2015 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan diatas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku untuk daerah perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company's Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors' Resolution.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

3. Significant Accounting Policies

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI). Laporan keuangan juga

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

disusun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan yang terlampir dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada/atau setelah 1 Januari 2020 yaitu:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Institute of Accountant (DSAK - IAI). Financial reports are also prepared in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning guidelines for the presentation of financial statements attached in the attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning the presentation and disclosure of financial statements of issuers or public companies.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are revision, amandements and adjustments of standards and interpretation of standard effectively applied for the year starting on or after 1 January 2020, are as follows:

- *PSAK 71, "Financial Instruments"*
- *PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"*
- *PSAK 73, "Lease"*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract*
- *Amendment of PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures"*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation*
- *ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements*
- *PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- *PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah*
- *ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership*
- *ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform*

Except for the changes described below, the implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no material impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Group chose to apply retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup pada awal penerapan PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Group's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020:

		1 Januari/January 2020		
	Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan PSAK 55/ <i>Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 55</i>	Nilai Tercatat Berdasarkan Ketentuan PSAK 71/ <i>Carrying Values Based on the Provisions of PSAK 71</i>	Penyesuaian Saldo Laba/ <i>Adjustments to Retained Earnings</i>	
Piutang usaha	120,690,229,140	43,568,047,736	(77,122,181,404)	Trade receivables
Dampak Pajak Terkait	--	19,504,216,001	19,504,216,001	Related Tax Impact

PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"

PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Grup menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

The Group applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

Based on the review that the Group has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp6.052.035.155, liabilitas sewa sebesar Rp3.381.176.345 dan saldo laba ditahan Rp1.440.899.893.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Group as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases where the underlying assets are low value.

The Group has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Group's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019.

In applying PSAK 73 for the first time, the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

- a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
- the accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 as short-term lease;
- initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial application;
- hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease;
- not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets; and
- rely on the assessment of whether leases are onerous based on PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.

The impact of the initial implementation of PSAK 73 on the beginning balance on January 1, 2020 for right-of-use assets amounting to Rp6,052,035,155, lease liabilities amounting to Rp3,381,176,345 and retained earning Rp1,440,899,893.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Grup telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK 30, "Sewa" dan ISAK 8, "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa".

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.e.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group has also elected not to reassess whether a contract contains a lease or not at the date of initial application for the contracts entered into before the transition date that the Group has made assessment under PSAK 30, "Leases" and ISAK 8, "Determining whether an Arrangement contains a Lease".

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.e.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until such control ceases.

A parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non controlling

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the noncontrolling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b. Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu Kurs tengah Bank Indonesia, pada 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut:

	2020 Rp
Dolar Amerika Serikat (USD)	14,105

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currencies amount the spot exchange rate between Rupiah and foreign currencies at the date transactions. At the end of reporting year, foreign currencies monetary items are translated to Rupiah using the closing rate: i.e middle rate of Bank of Indonesia, as of December 31, 2020 and 2019, are as follows:

	2019 Rp	
	14,011	United State of America Dollar (USD)

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

f. Related Parties Transactions and Balances

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity.

- a. The person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if the person:
 - i. Having control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting party or reporting entity; or
 - iii. Key management personnel of the reporting entity or parent and reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group, of which the other entity is a member);

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**g. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is the organizer of a post-retirement benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or entities that are related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
- vi. An entity that is controlled or jointly controlled by a person identified in the letter (a);
- vii. The person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or the parent entity of the entity).
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the BUMN's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

**g. Financial Instruments
Initial Recognition and Measurement**

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities, at its fair value. In the case of a

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

financial asset of financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) *Loans and Receivables*
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:
- a. *Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- c. Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets in derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020

At initial recognition, financial assets are classified in the three categories as follows: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

- (i) *Financial Assets Measured at Amortized Costs*
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:
- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

- (iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- (ii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")*
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:
- the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and*
 - the contractual terms of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

- (iii) *Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")*
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untuk dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) **Liabilitas Keuangan Lainnya**
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

not held for trading in any time soon as FVTOCI.

This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) **Financial Liabilities of Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

- (ii) **Other Financial Liabilities**
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (ii) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (iii) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - a. Jumlah penyisihan kerugian dan
 - b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (iv) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis Ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (ii) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (i) financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (ii) financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (iii) financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - a. the amount of the loss allowance
 - b. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- (iv) contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (i) it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as 'an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or
- (ii) a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

***Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January, 1
2020***

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d. Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b. A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- c. It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- d. Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. nilai waktu uang; dan
- iii. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Accounting Treatment since 1 January, 2020

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss (stage 1) is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. an unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. time value of money; and
- iii. reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimate cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Reklasifikasi

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau keuangan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Reclassification

Accounting Treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify its financial assets at fair value through profit or loss, if the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing the asset in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through profit or loss, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into fair value through other comprehensive income, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through profit or loss into fair value through other comprehensive income, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the fair value through other comprehensive income into fair value through profit or loss, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**Offsetting a Financial Asset and a Financial
Liability**

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- (ii) Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Persediaan rusak, tidak lengkap komponennya, atau secara ekonomis tidak dapat dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset lai-lain".

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs. Inventories are damaged, incomplete components, or economically unusable are separated into the "other assets" group.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized on straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayment.

k. Investment in Associate

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

investee mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- a. jika investasi menjadi entitas anak.
- b. jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- c. ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

I. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an *investee* reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the *investee* arising from changes in the *investee*'s other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- a. if the investment becomes a subsidiary.
- b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.
- c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the *investee* had directly disposed of the related assets or liabilities.

I. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

After initial recognition, the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (2-50 years).

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognised at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Jenis Aset/ Types of Assets	Masa Manfaat/ Useful Life (Tahun/ Year)	Nilai Sisa/ Residual values
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Buildings</i>	10 - 50	Rp1.000.000 atau/ or 2%
Kapal/ <i>Ships</i>	10 - 20	2%
Alat Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facilities Equipments</i>	5 - 20	2%
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ <i>Port Facility Installation</i>	10 - 25	2%
Jalan dan Bangunan/ <i>Roads and Buildings</i>	10 - 40	Rp1.000.000 atau/ or 2%
Peralatan/ <i>Equipments</i>	4 - 25	2%
Kendaraan/ <i>Vehicles</i>	5	20%
Emplasmen/ <i>Emplacements</i>	3 - 25	Rp1.000.000 atau/ or 2%

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Assets Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Company made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Amortisasi atas aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus. Metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai residu aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset takberwujud dengan umur manfaat 2, 5 dan 10 tahun.

Nilai tercatat suatu aset takberwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset takberwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset takberwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos "pendapatan/ (beban) lain-lain-bersih". Aset takberwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasinya.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sehubungan dengan hak konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

n. Intangible Assets

Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Cost includes costs that are directly attributable to the acquisition of the asset.

All assets classified as intangible assets with a limited useful life are amortized. The amount that can be depreciated intangible assets with a limited useful life is the acquisition cost minus the residual value. Amortization of intangible assets with a limited useful life using the straight-line method. The method of amortization of intangible assets with a limited useful life is always reviewed at each reporting date. The residual value of intangible assets with a limited useful life is always reviewed, and adjustments are made if necessary, at each reporting date. The useful life of an intangible asset with a useful life of 2, 5 and 10 years.

The carrying value of an intangible asset is reduced to the recoverable value of the intangible asset concerned if the carrying value of the intangible asset is greater than the recoverable value. Impairment of intangible assets is recognized as an impairment loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the "other/net income/ (expense)" item. Intangible assets that have no future economic benefits or are sold are removed from the group of intangible assets and accumulated amortization.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" related to the concession rights

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas di Belawan Fase 2. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi Terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas di Belawan Fase 2 diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset hak konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (qualifying assets), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2. During the construction period, the accumulated Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung and Container Terminal at Belawan Phase 2 construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession rights assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

o. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari
2020**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui:

1. Penjualan Barang
Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.
2. Penjualan Jasa
Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.

o. Impairment of Assets

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

**p. Revenue and Expense Recognition
Accounting Treatment before January 1,
2020**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

1. Sales of Goods
Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.
2. Sales of Services
Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Pendapatan Kerjasama Mitra
Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".

4. Pendapatan Bunga
Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

5. Beban
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
- ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Revenue of Partner Cooperation
The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (invoices) issued by the Company to third parties.

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".

4. Interest Income
Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.

5. Expenses
Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

- i. *Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
 - *The contract has commercial substance*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for goods or services which is diverted.*
- ii. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
- iii. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

- iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

q. Sewa

Perlakuan Akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Penyewa:

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

- iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
- v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

q. Leases

Accounting Treatment before 1 January 2020

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

The Group as Lessees:

At the commencement of the lease term, the Group recognize finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan penyewa ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa:

Grup mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai Pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup menyajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Jual dan Sewa-Balik

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa-balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, Jika harga jual dibawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Under an operating lease, the Group recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor:

The Company and subsidiaries recognize assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group net investment in the finance lease as lessor

The Group presents assets subject to operating lease in the statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as the lease income. Contingent rents, if any, is recognized as income in the period incurred. Lease income from operating leases is recognized as revenue on a straight-line basis over the lease term

Sale and Leaseback

Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:

- *If the sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.*
- *If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately. If the sale price is recognized immediately except that, if the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual diatas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

Perlakuan Akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup Sebagai Penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the asset is expected to be used.

Accounting Treatment since January 1, 2020

The Group as a Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- *the initial amount of the lease liability;*
- *lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *initial direct cost incurred; and*
- *an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the remainder of the lease term;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa.
2. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka rugi pesewa yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar rental.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and benefits related to ownership of the asset.

The classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or in combination under normal conditions leading to leases classified as financing are:

1. *Leases transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.*
2. *The lessee has the option to purchase assets at a price that is quite low compared to the fair value at the date the option can be exercised so that at the beginning of the lease it is certain that the option will be implemented.*
3. *The lease period is for the majority of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.*
4. *At the beginning of the lease, the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;*
5. *Leased assets are special and where only the lessee can use them without needing to be modified materially.*

Indicators of situations that individually or collectively can also show that leases are classified as financing are:

1. *If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss related to the cancellation is borne by the lessee.*
2. *Gains or losses from fluctuations in the fair value of residuals are charged to the lessee (for example, in the form of a discounted rental price and which is equivalent to the majority of the proceeds of residual sales at the end of the lease), and*
3. *The lessee can continue leasing for a second period with a rental value that is substantially lower than the rental market value.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

r. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

s. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

r. Borrowing Cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

s. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

t. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a. pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

- a. *the initial recognition of goodwill; or*
- b. *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b. *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

u. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a. *memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan*
- b. *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

u. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

v. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

w. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

v. Earning Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculationg diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

w. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- for which separate financial information is available.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

x. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya dan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Biaya perolehan meliputi nilai wajar aset dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tetap bersangkutan dalam kondisi siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen. Aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti serah terima.

Apabila aset tetap yang diperoleh dari donasi Pemerintah tidak dapat diukur dengan nilai wajar maka biaya perolehannya diukur sesuai dengan nilai transaksi pasar yang serupa.

Penvertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh dari donasi Pemerintah dicatat secara terpisah dari modal saham Perusahaan dan diakui sebesar nilai wajar kas dan/atau aset keuangan dan/atau aset non keuangan yang diterima.

PMN berupa aset yang diperoleh dari donasi Pemerintah diakui berdasarkan bukti obyektif bahwa Grup telah memenuhi kondisi dan persyaratan donasi tersebut dan donasi tersebut akan diperoleh.

PMN berupa aset dan didukung oleh berita acara serah terima diakui bagian dari ekuitas sebagai bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sampai dengan Peraturan Pemerintah atas PMN tersebut sudah terbit.

x. Government Grant With Unspecified Used (BPYBDS)

Fixed assets

Fixed assets obtained from Government donations are recognized and measured at cost and presented in the statement of financial position as non-current assets. Cost includes the fair value of assets and costs that are directly attributable so that the property, plant, and equipment are in a condition ready for use following the wishes and intentions of management. Fixed assets obtained from Government donations are recognized based on proof of handover.

If the fixed assets obtained from Government donations cannot be measured at fair value, the acquisition costs are measured following similar market transaction values.

State Capital Participation

The State Capital Participation (PMN) obtained from Government donations is recorded separately from the Group's share capital and is recognized at the fair value of cash and/or financial assets and/or non-financial assets received.

PMN in the form of assets obtained from Government donations is recognized based on objective evidence that the Company has fulfilled the conditions and conditions of the donation and that donations will be obtained.

PMN in the form of assets and supported by the minutes of handover are recognized as part of the equity as Government assistance that has not been determined until the Government Regulation on PMN has been issued.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Provision for expected credit losses (“ECLs”) of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

The provision matrix is initially based on the Group’s historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group’s historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer’s actual default in the future.

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman incremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

c. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

c. Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT").

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan non final. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

The revenue of the companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determining the amount of revenue subject to final and nonfinal tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax regime requires judgments and estimates.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by Management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

d. Post-employment Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

e. Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 39). Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2 kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset hak konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group considers to use the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

e. Service Concession Arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Otoritas Pelabuhan ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 39). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2 free of any form of charge to OP, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2.

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession rights asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset hak konsesi atau peningkatan kemampuan aset hak konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset hak konsesi dan biaya konstruksi atas aset hak konsesi sesuai dengan PSAK 72. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset hak konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

f. Provisi

Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya *maintenance dredging* dan perhitungan *re-investment* pemeliharaan dan beban bunga aset konsesi pada akhir periode laporan.

Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya *maintenance dredging* dan perhitungan *re-investment* pemeliharaan dan beban bunga aset konsesi diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk sedimentasi kolam pelabuhan dan aktivitas aset konsesi, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession rights assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession rights asset and construction costs of concession rights asset in accordance with PSAK 72. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

f. Provision

The Group assesses its provision for the cost of maintenance dredging and calculates the re-investment in maintenance and interest expense on concession assets at the end of the reporting period.

Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of maintenance dredging and repair of concession assets as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of port pool sedimentation and concession asset activities, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas/ Cash	1,782,077,451	1,709,296,106
Bank/ Banks		
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	70,646,054,129	254,121,216,889
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46,288,822,744	301,405,759,831
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40,371,396,624	28,969,962,888
PT Bank Syariah Mandiri	634,472,977	3,809,419,931
<u>Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i></u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30,647,501,679	2,640,161,898
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	744,583,047	733,973,758
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	465,318,016	322,411,266
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>189,798,149,216</u>	<u>592,002,906,461</u>
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2,065,374,033	1,838,336,354
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	1,535,478,121	1,462,792,076
PT Bank Bukopin Tbk	1,343,008,533	735,942,460
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	7,623,276	7,709,829
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>4,951,483,963</u>	<u>4,044,780,719</u>
Jumlah Bank/ <i>Total Banks</i>	<u>194,749,633,179</u>	<u>596,047,687,180</u>
Deposito/ <i>Deposits</i>		
Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500,941,559,342	444,905,036,690
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	381,900,000,000	307,674,082,991
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	315,495,299,116	261,412,610,936
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	98,584,000,000	44,584,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	39,500,000,000	57,500,000,000
PT Bank Syariah Mandiri	16,000,000,000	6,000,000,000
<u>Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i></u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,615,109,350	9,498,936,000
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>1,362,035,967,808</u>	<u>1,131,574,666,617</u>
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	6,513,179,912	13,217,229,180
PT Bank Bukopin Tbk	--	24,000,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	--	1,000,000,000
Sub Jumlah/ <i>Sub Total</i>	<u>6,513,179,912</u>	<u>38,217,229,180</u>
Jumlah Deposito/ <i>Total Deposits</i>	<u>1,368,549,147,720</u>	<u>1,169,791,895,797</u>
Jumlah/ Total	<u>1,565,080,858,350</u>	<u>1,767,548,879,083</u>
Tingkat Bunga Kontraktual Deposito Berjangka Per Tahun/ <i>Contractual Interest Rates of Time Deposits Per Annum</i>		
Rupiah	3.5%-7.65%	4.75%-8.25%
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollar</i>	0.5%-1.75%	1.45%-1.75%

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Deposito berjangka merupakan deposito berjangka waktu 1 - 3 bulan.

Time deposits represent time deposits of 1 - 3 months

6. Piutang Usaha

6. Account Receivables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Customer
Pihak Berelasi (Catatan 35)	30,191,004,430	18,111,394,049	Related Parties (Note 35)
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(18,314,691,864)	--	Losses
Sub Jumlah	<u>11,876,312,566</u>	<u>18,111,394,049</u>	Sub Total
Pihak Ketiga	128,493,804,992	170,130,999,967	Third Parties
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(90,865,370,248)	(67,552,164,876)	Losses
Sub Jumlah	<u>37,628,434,744</u>	<u>102,578,835,091</u>	Sub Total
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)			b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	46,469,621,681	74,266,888,852	Current
Jatuh Tempo:			Overdue:
1 - 30 Hari	42,889,517,413	35,503,812,157	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	13,408,281,590	20,055,012,192	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	4,321,375,758	6,805,644,626	91 - 180 Days
> 180 Hari	51,596,012,980	51,611,036,189	> 180 Days
Sub Jumlah	<u>158,684,809,422</u>	<u>188,242,394,016</u>	Sub Total
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(109,180,062,112)	(67,552,164,876)	Losses
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total
c. Berdasarkan Mata Uang			c. By Original Currency
USD	6,284,135,033	6,354,486,791	USD
Rupiah	<u>152,400,674,389</u>	<u>181,887,907,225</u>	Rupiah
Sub Jumlah	<u>158,684,809,422</u>	<u>188,242,394,016</u>	Sub Total
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(109,180,062,112)	(67,552,164,876)	Losses
Jumlah	<u>49,504,747,310</u>	<u>120,690,229,140</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	67,552,164,876	66,549,227,057	Beginning Balances
Dampak Penerapan			Effect on Initial Implementation
Awal PSAK 71 (Catatan 4)	<u>77,122,181,404</u>	--	of PSAK 71 (Note 4)
Saldo, Setelah Dampak			Balance, After Effect on Initial
Penerapan PSAK 71	144,674,346,280	66,549,227,057	Implementation PSAK 71
Penambahan/ (Pemulihan)			
- Bersih	<u>(35,494,284,168)</u>	<u>1,002,937,819</u>	Addition/ (Reversal) - Net
Saldo Akhir	<u>109,180,062,112</u>	<u>67,552,164,876</u>	Ending Balances

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang (Catatan 19).

The Group applies the simplified approach in calculating expected credit losses prescribed by PSAK 71 on January, 1 2020, which permits the use of the lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.

Management believes the allowance is for expected credit loss of trade receivables adequate to cover loss on uncollectible receivables.

Trade receivables of the Group are used as collateral on long-term bank loans (Note 19).

7. Persediaan

7. Inventories

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Suku Cadang	19,142,057,723	14,460,828,316	Spareparts
Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	4,252,351,743	2,883,421,536	Fuel and Lubricants
Obat dan Alat Medis	505,577,995	372,396,808	Medical Medicines
Lain-lain	420,434,104	568,751,163	Other
Jumlah	24,320,421,565	18,285,397,823	Total

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persediaan Grup tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa persediaan Grup tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada.

Manajemen Grup berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan. Manajemen juga berpendapat nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan, sehingga tidak diperlukan adanya provisi persediaan usang dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group's inventories were not insured. Management believes that the Group's inventories do not require insurance coverage in accordance with the conditions of the inventory at hand.

The Group's management is of the opinion that the inventories can be either used. Management also believes that the net realizable value of inventories exceeds the carrying amount of inventories, and therefore, a provision for obsolete stock and decline in value is not considered necessary as of December 31, 2020 and 2019.

8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga	15,127,904,399	141,367,632,165	Third Parties
Piutang Pegawai Aktif	2,600,393,640	2,590,040,640	Employees Receivables
Sub Jumlah	17,728,298,039	143,957,672,805	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4,979,298,330)	(3,709,916,934)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	12,748,999,709	140,247,755,871	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	3,709,916,934	3,630,954,640	Beginning Balances
Penambahan/ (Pemulihan) - Bersih	1,269,381,396	78,962,294	Addition/ (Reversal) - Net
Saldo Akhir	4,979,298,330	3,709,916,934	Ending Balances

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the allowance for impairment of other receivables is adequate to cover any possible losses on uncollectible accounts.

9. Investasi pada Entitas Asosiasi

9. Investment in Associates

2020					
Nama Perusahaan/ Company	%	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balances	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deductions)	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas/ Share in Net Profit (Loss)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of the Year
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	34,017,153,038	--	115,198,203	34,132,351,241
PT Prima Tangki Indonesia	20	15,087,748,960	--	156,751,249	15,244,500,209
Jumlah/ Total		49,104,901,998	--	271,949,452	49,376,851,450

2019					
Nama Perusahaan/ Company	%	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balances	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deductions)	Bagian atas Laba (Rugi) Bersih Entitas/ Share in Net Profit (Loss)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value at the End of the Year
PT Terminal Petikemas Indonesia	25	33,635,880,464	--	381,272,574	34,017,153,038
PT Prima Tangki Indonesia	20	16,225,856,399	--	(1,138,107,439)	15,087,748,960
PT Patriot Nusantara Aceh		500,000,000	(500,000,000)	--	--
Jumlah/ Total		50,361,736,863	(500,000,000)	(756,834,865)	49,104,901,998

Informasi tambahan sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Additional information on the investments in associates are as follows:

2020				
	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Jumlah Pendapatan/ Total Revenues	Jumlah Laba Komprehensif/ Total Comprehensive Income
PT Terminal Petikemas Indonesia	134,140,778,253	1,187,863,253	--	460,792,811
PT Prima Tangki Indonesia	212,363,760,488	139,183,428,775	36,865,204,907	783,756,242

2019				
	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	Jumlah Pendapatan/ Total Revenues	Jumlah Laba Komprehensif/ Total Comprehensive Income
PT Terminal Petikemas Indonesia	131,715,919,780	1,363,300,274	--	1,525,090,298
PT Prima Tangki Indonesia	221,721,121,118	148,976,539,555	10,224,424,565	(5,690,537,195)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

The financial statements of the associates are prepared for the same reporting period with the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak tersedia informasi nilai pasar terkait investasi pada entitas asosiasi.

As of December 31, 2020 and 2019, there was no market price information available related to the investments in associates.

10. Properti Investasi - Bersih

10. Investment Properties - Net

		2020					
	Saldo Awal/ Beginning Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>	
Tanah	413,324,770,114	4,607,354,542	--	--	417,932,124,656	Lands	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,296,262,937	--	--	--	2,296,262,937	Port Facility Buildings	
Jalan dan Bangunan	5,003,038,903	--	--	--	5,003,038,903	Roads and Buildings	
Emplasemen	1,526,174,545	--	--	--	1,526,174,545	Emplacements	
Jumlah Nilai Perolehan	<u>422,150,246,499</u>	<u>4,607,354,542</u>	--	--	<u>426,757,601,041</u>	<u>Total Acquisition Cost</u>	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciation</u>	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1,447,757,172	23,463,427	--	--	1,471,220,599	Port Facility Buildings	
Jalan dan Bangunan	2,981,754,664	81,662,422	--	--	3,063,417,086	Roads and Buildings	
Emplasemen	755,424,848	63,703,423	--	--	819,128,271	Emplacements	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>5,184,936,684</u>	<u>168,829,272</u>	--	--	<u>5,353,765,956</u>	<u>Total Accumulated Depreciation</u>	
Nilai Buku	<u>416,965,309,815</u>				<u>421,403,835,085</u>	Book Value	
		2019					
	Saldo Awal/ Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>	
Tanah	412,454,461,619	870,308,495	--	--	413,324,770,114	Lands	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,296,262,937	--	--	--	2,296,262,937	Port Facility Buildings	
Jalan dan Bangunan	4,996,306,399	6,732,504	--	--	5,003,038,903	Roads and Buildings	
Emplasemen	1,526,174,545	--	--	--	1,526,174,545	Emplacements	
Jumlah Nilai Perolehan	<u>421,273,205,500</u>	<u>877,040,999</u>	--	--	<u>422,150,246,499</u>	<u>Total Acquisition Cost</u>	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciation</u>	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1,411,203,008	36,554,164	--	--	1,447,757,172	Port Facility Buildings	
Jalan dan Bangunan	2,900,206,244	81,548,420	--	--	2,981,754,664	Roads and Buildings	
Emplasemen	691,721,425	63,703,423	--	--	755,424,848	Emplacements	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>5,003,130,677</u>	<u>181,806,007</u>	--	--	<u>5,184,936,684</u>	<u>Total Accumulated Depreciation</u>	
Nilai Buku	<u>416,270,074,823</u>				<u>416,965,309,815</u>	Book Value	

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Beban penyusutan properti investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp168.829.272 dan Rp181.806.007 dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan milik Perusahaan seluas 1.489.688 m² pada tahun 2020 dan tahun 2019, yang disewakan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Pada tahun 2019 Grup melakukan penilaian nilai wajar aset tetap dan properti investasi sebesar Rp1.882.297.959.929 untuk wilayah Medan dan sekitarnya dan sebesar Rp5.141.007.324.797 untuk wilayah selain Medan dan sekitarnya. Masing-masing nilai wajar tersebut didukung oleh laporan penilai publik independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan. KJPP NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan adalah penilai publik independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan dan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Adapun Standar Penilaian yang digunakan adalah Standar Penilaian Indonesia edisi VI - 2015, dengan menggunakan pendekatan pasar.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, properti investasi bersama dengan aset tetap, kecuali tanah dan aset takberwujud, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, *property all risk* dan risiko lainnya (Catatan 11).

Penghasilan sewa properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp131.935.578.307 dan Rp146.632.973.896.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Depreciation expense of investment properties as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp168,829,272 and Rp181,806,007 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Investment properties consist of land and building in the port area which belongs to the Company covering 1,489,688 sqm in 2020 and 2019, which are leased to a third party under the lease agreements.

In 2019, Group performed the fair value of fixed assets and investment properties amounting to Rp1,882,297,959,929 for Medan and surrounding areas and Rp5,141,007,324,797 for areas other than Medan and its surroundings. The fair value which supported by an independent public appraisal reports from appraisal (KJPP) NR and Partners and KJPP Yanuar Bei and Partners. KJPP NR dan Rekan dan KJPP Yanuar Bei dan Rekan are an independent public appraisal registered in The Ministry of Finance and the Financial Services Authority ("OJK").

The valuation standard that has been used is Indonesian Valuation Standards edition VI - 2015, which used market approach.

Based on the review of the recoverable value of investment property, the Company's management believes that there are no events or changes that indicate a decline in value of assets as of December 31, 2020

As of December 31, 2020 and 2019, the Group's investment properties with fixed assets, except land and intangible assets, were covered by insurance against the risk of fire all property risk and other risk (Note 11).

Rental income from investment property for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp131,935,578,307 and Rp146,632,973,896, respectively.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. Aset Tetap

11. Fixed Assets

		2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>		
Tanah	121,667,817,091	--	--	--	121,667,817,091	Land		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,632,205,261,720	4,498,118,814	(1,219,023,727)	225,676,744,618	2,861,161,101,425	Port Facility Buildings		
Kapal	1,109,933,665,431	5,386,545,173	--	105,837,820,220	1,221,158,030,824	Ships		
Alat Fasilitas Pelabuhan	2,188,147,286,566	47,937,307,116	(348,800,001)	249,821,363,048	2,485,557,156,729	Port Facility Equipments		
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	330,918,715,770	2,573,048,841	--	59,285,087,852	392,776,852,463	Port Facility Installations		
Jalan dan Bangunan	828,645,815,191	10,510,234,210	(782,229,091)	236,646,221,881	1,075,020,042,191	Roads and Buildings		
Peralatan	78,069,725,143	1,401,640,200	--	7,091,436,784	86,562,802,127	Equipments		
Kendaraan	14,127,499,728	5,330,376,296	--	3,737,650,000	23,195,526,024	Vehicles		
Emplasemen	112,765,766,583	--	--	(76,774,030)	112,688,992,553	Emplacements		
Sub Jumlah	7,416,481,553,223	77,637,270,650	(2,350,052,819)	888,019,550,373	8,379,788,321,427	Sub Total		
Aset Dalam Konstruksi	869,329,635,972	390,673,139,439	(25,128,781,538)	(861,912,200,250)	372,961,793,623	Assets Under Construction		
Jumlah Harga Perolehan	8,285,811,189,195	468,310,410,089	(27,478,834,357)	26,107,350,123	8,752,750,115,050	Total Acquisition Cost		
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciations</u>		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	570,863,023,925	101,176,622,092	(1,107,435,803)	(1,314,829,550)	669,617,380,664	Port Facility Buildings		
Kapal	309,155,167,191	53,454,159,374	--	--	362,609,326,565	Ships		
Alat Fasilitas Pelabuhan	847,771,970,244	176,971,633,588	(318,825,462)	(10,426,880,081)	1,013,997,898,289	Port Facility Equipments		
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	122,457,614,424	22,927,872,988	--	(475,938,379)	144,909,549,033	Port Facility Installations		
Jalan dan Bangunan	218,945,010,490	46,208,041,327	(440,234,219)	(464,578,141)	264,248,239,457	Roads and Buildings		
Peralatan	68,324,206,547	5,035,265,518	--	(1,825,219,423)	71,534,252,642	Equipments		
Kendaraan	9,868,731,569	1,614,876,990	--	--	11,483,608,559	Vehicles		
Emplasemen	19,984,231,884	5,567,066,031	--	(29,949,722)	25,521,348,193	Emplacements		
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2,167,369,956,274	412,955,537,908	(1,866,495,484)	(14,537,395,296)	2,563,921,603,402	Total Accumulated Depreciation		
<u>Penurunan Nilai Aset</u>						<u>Impairment Assets</u>		
Alat Fasilitas Pelabuhan	--	14,996,946,125	--	--	14,996,946,125	Port Facility Equipments		
Nilai Buku	6,118,441,232,921				6,173,831,565,523	Book Value		
		2019						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Penyesuaian/ Reclassification /Adjustment	Saldo Akhir Ending Balance			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	
<u>Harga Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>		
Tanah	114,497,262,561	7,170,554,530	--	--	121,667,817,091	Land		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,018,570,759,725	89,255,863,231	(1,725,771,507)	526,104,410,271	2,632,205,261,720	Port Facility Buildings		
Kapal	605,205,460,255	9,363,222,053	--	495,364,983,123	1,109,933,665,431	Ships		
Alat Fasilitas Pelabuhan	1,424,483,819,717	119,540,897,584	(5,877,000)	644,128,446,265	2,188,147,286,566	Port Facility Equipments		
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	306,724,071,629	1,305,290,500	(4,463,657,918)	27,353,011,559	330,918,715,770	Port Facility Installations		
Jalan dan Bangunan	427,617,561,602	21,046,615,992	--	379,981,637,597	828,645,815,191	Roads and Buildings		
Peralatan	75,854,809,475	397,950,001	(94,900,000)	1,911,865,667	78,069,725,143	Equipments		
Kendaraan	12,787,499,728	--	--	1,340,000,000	14,127,499,728	Vehicles		
Emplasemen	58,300,313,767	--	--	54,465,452,816	112,765,766,583	Emplacements		
Sub Jumlah	5,044,041,558,459	248,080,393,891	(6,290,206,425)	2,130,649,807,298	7,416,481,553,223	Sub Total		
Aset Dalam Konstruksi	2,517,909,429,525	500,088,272,769	--	(2,148,668,066,322)	869,329,635,972	Assets Under Construction		
Jumlah Harga Perolehan	7,561,950,987,984	748,168,666,660	(6,290,206,425)	(18,018,259,024)	8,285,811,189,195	Total Acquisition Cost		
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciations</u>		
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	481,278,932,054	90,783,309,782	(1,199,217,911)	--	570,863,023,925	Port Facility Buildings		
Kapal	276,218,871,098	32,936,296,093	--	--	309,155,167,191	Ships		
Alat Fasilitas Pelabuhan	711,101,857,069	136,675,872,635	(5,759,460)	--	847,771,970,244	Port Facility Equipments		
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	105,027,642,027	21,804,357,153	(4,374,384,756)	--	122,457,614,424	Port Facility Installations		
Jalan dan Bangunan	187,030,735,323	31,914,275,167	--	--	218,945,010,490	Roads and Buildings		
Peralatan	63,098,499,021	5,318,709,526	(93,002,000)	--	68,324,206,547	Equipments		
Kendaraan	9,520,259,246	348,472,323	--	--	9,868,731,569	Vehicles		
Emplasemen	14,432,879,257	5,551,352,627	--	--	19,984,231,884	Emplacements		
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1,847,709,675,095	325,332,645,306	(5,672,364,127)	--	2,167,369,956,274	Total Accumulated Depreciation		
Nilai Buku	5,714,241,312,889				6,118,441,232,921	Book Value		

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Beban penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp412.955.537.908 dan Rp325.332.645.306 dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Depreciation expense of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp412,955,537,908 and Rp325,332,645,306 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah mengasuransikan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud yang dimiliki, kecuali tanah, terhadap, risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp9.571.194.228.717 dan USD16,402,000 dan Rp6.299.520.811.442, kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group insured its fixed assets, investment properties and intangible assets, except land, against the risk of fire, all property risk, all industrial risks and any other risks with sum insured amounting to Rp9,571,194,228,717 and USD16,402,000 and Rp6,299,520,811,442, to third parties, namely PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), which according of the management, is adequate to cover possible losses.

Rincian aset dalam konstruksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of assets under construction as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/ At Cost
2020			
Tanah/ Lands	0,09%-99%	Januari 2021-Desember 2024 January 2021-December 2024	5,436,227,504
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Buildings	10%-77%	Januari 2021-Desember 2021 January 2021-December 2021	115,282,594,991
Kapal/ Ships	27%-80%	Januari 2021-Juni 2021 January 2021-June 2021	229,062,492,711
Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipments	20%-93%	Januari 2021-Mei 2021 January 2021-May 2021	3,001,923,447
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	20%-99%	Februari 2021-Juli 2021 February 2021-July 2021	6,597,879,721
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	8%-99%	Januari 2021-Agustus 2021 January 2021-August 2021	13,102,760,249
Peralatan/ Equipments	90%	April 2021	352,537,000
Lainnya/ Other	90%	April 2021	125,378,000
Jumlah/ Total			372.961.793.623

Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	Persentase Penyelesaian/ Completion Percentage	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated Year of Completion	Biaya Perolehan/ At Cost
2019			
Tanah/ Lands	99%	Januari 2020/ January 2020	471,113,172
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Buildings	10%-99%	Januari 2020-Mei 2021 January 2020-May 2021	94,897,380,834
Kapal/ Ships	31%-99%	Januari 2020-Juni 2021 January 2020-June 2021	204,215,861,526
Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipments	94%-99%	Januari 2020-April 2020 January 2020-April 2020	256,597,660,713
Instalasi Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Installations	4%-99%	Januari 2020-Juli 2021 January 2020-July 2021	52,499,727,605
Jalan dan Bangunan/ Roads and Buildings	5%-99%	Januari 2020-Maret 2021 January 2020-March 2021	254,083,113,122
Peralatan/ Equipments	99%	Januari 2020/ January 2020	2,827,129,000
Kendaraan/ Vehicles	41%	April 2020	3,737,650,000
Jumlah/ Total			869.329.635.972

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hak atas tanah Grup berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL") dan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB"). SHGB memiliki masa berlaku antara tahun 2020 hingga 2049. Manajemen berpendapat bahwa SHGB tersebut dapat diperpanjang.

Hak atas tanah seluas 315.131 m² masih atas nama pemilik lama dan saat ini masih dalam proses balik nama menjadi nama Perusahaan dan hak atas tanah seluas 24.970 m² saat ini masih dalam proses perpanjangan hak.

Penghapusbukuan aset tetap dikarenakan aset dalam kondisi fisik rusak, tidak ditemukan dan atau aset sudah tidak digunakan. Penghapusbukuan aset tetap berupa penghapusan secara administratif dan atau pemindah tangganan karena dijual (Aset tersedia untuk dijual).

Nilai buku atas aset tetap yang dihapus untuk tahun 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.869.692.607 dan Rp1.241.661.903.

Beberapa aset tetap dijaminkan ke beberapa bank atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Grup (Catatan 19).

Penilaian kembali dilakukan pada bulan April 2019, KJPP NR & R menghitung nilai wajar aset tetap Grup yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya sebesar Rp1.882.297.959.929, sedangkan KJPP Yanuar Bei dan Rekan yang menilai aset di wilayah selain Medan dan sekitarnya menghitung nilai wajar aset Grup sebesar Rp5.141.007.324.797.

Pada tahun 2020, jumlah reklasifikasi bersih harga perolehan aset tetap adalah sebesar Rp26.107.350.123, yang terdiri dari Rp43.511.404.125 merupakan reklasifikasi dari aset takberwujud (Catatan 12) dan Rp17.404.054.744 merupakan reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya (Catatan 14).

Cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp14.996.946.125 dan nihil. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian dari penurunan nilai aset tetap.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Group's land rights such as Rights Management Certificate ("HPL") freehold land ("SHM") and land-use rights ("SHGB"). The SHGB will expire between 2020 and 2049. Management believes that the SHGB are extendable.

Land rights measuring 315,131 sqm is still in the name of the former owner and is currently still in the process of being transferred to the Company's name and rights to the land area of 24,970 sqm are still in the process of renewal of property rights as of to date.

Write - off of a fixed asset is due to the asset is physically damaged, was not found or asset is no longer used. Write - off of fixed assets in the form of administrative removal and / or transfer due for sale (Assets available for sale).

The book value of fixed assets written - off as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp2,869,692,607 and Rp1,241,661,903, respectively.

Some fixed assets are pledged to several banks for loan facilities obtained by the Group (Note 19).

The revaluation was conducted in April 2019, KJPP NR & R calculated the fair value of the Group's fixed assets in the Medan and surrounding areas at Rp1,882,297,959,929, while KJPP Yanuar Bei and Partners who valued assets in areas other than Medan and its surroundings calculated fair values Group assets amounting to Rp5,141,007,324,797.

In 2020, the total reclassification of the acquisition cost of fixed assets amounted to Rp26,107,350,123, which consists of Rp43,511,404,125 representing the reclassification of intangible assets (Note 12) and Rp17,404,054,744 which are reclassifications to other non-current assets (Note 14).

Allowances for impairment of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp14,996,946,125 and nil, respectively. Management believes that the allowance is adequate to cover losses from impairment of fixed assets.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. Aset Takberwujud

12. Intangible Assets

	31 Desember 2020/ December 31, 2020				31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification		
Biaya Perolehan:						At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Kuala Tanjung	3,503,073,713,160	31,670,504,723	--	--	3,534,744,217,883	Kuala Tanjung
Belawan Fase 2	2,228,302,147,910	--	--	758,143,856,767	2,986,446,004,677	Belawan Phase 2
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets:</u>
Piranti Lunak	154,470,769,857	12,421,634	--	191,987,430,794	346,470,622,285	Computer Software
Sertifikasi	814,434,917	232,859,430	--	1,044,074,074	2,091,368,421	Certification
Konsultan dan Appraisal	647,870,000	379,636,100	91,500,000	6,527,032,013	7,463,038,113	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	33,026,871,470	--	--	9,175,093,203	42,201,964,673	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,927,571,277	--	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	118,593,247,131	3,583,945,600	63,255,691,923	(54,372,695,003)	4,548,805,805	Others
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contructions</u>
Hak Konsesi - Kuala Tanjung	56,063,099,425	7,050,604,891	--	--	63,113,704,316	Hak Konsesi - Kuala Tanjung
Hak Konsesi - Belawan Fase 2	501,663,379,589	298,910,742,114	--	(758,143,856,767)	42,430,264,936	Hak Konsesi - Belawan Phase 2
Lainnya	246,259,280,582	35,300,643,073	10,272,319,210	(197,872,339,948)	73,415,264,497	Others
Sub Jumlah	6,847,842,385,318	377,141,357,565	73,619,511,133	(43,511,404,867)	7,107,852,826,883	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Kuala Tanjung	36,067,683,018	54,101,524,528	--	--	90,169,207,546	Kuala Tanjung
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Piranti Lunak	53,898,199,548	55,621,720,407	--	59,998,608,550	169,518,528,505	Computer Software
Sertifikasi	1,163,189,417	348,754,501	--	--	1,511,943,918	Certification
Konsultan dan Appraisal	1,737,464,210	1,464,619,555	53,410,200	--	3,148,673,565	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	22,511,398,166	8,411,786,935	--	--	30,923,185,101	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,630,324,862	297,246,415	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	78,631,330,529	24,977,236,250	39,141,064,365	(59,998,608,550)	4,468,893,864	Others
Sub Jumlah	198,639,589,750	145,222,888,591	39,194,474,565	--	304,668,003,776	Sub Total
Jumlah	6,649,202,795,568				6,803,184,823,107	Total

Pada tahun 2020 jumlah reklasifikasi bersih harga perolehan aset takberwujud tercatat negatif sebesar Rp43.511.404.867 direklasifikasikan ke aset tetap karena seharusnya diklasifikasikan sebagai aset tetap menurut PSAK 16 (Catatan 11).

In 2020, the net reclassification of the acquisition cost of intangible assets was recorded negatively amounting to Rp43,511,404,867 which was reclassified to fixed assets because they should be classified as fixed assets under PSAK 16 (Note 11).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019					
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Biaya Perolehan:						At Cost:
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession right</u>
Kuala Tanjung	215,360,546	307,372,153,161	--	3,195,486,199,453	3,503,073,713,160	Kuala Tanjung
Belawan Fase 2	--	--	--	2,228,302,147,910	2,228,302,147,910	Belawan Phase 2
<u>Aset Takberwujud Lainnya</u>						<u>Other Intangible Assets</u>
Piranti Lunak	14,217,474,689	53,975,099,286	--	86,278,195,882	154,470,769,857	Computer Software
Sertifikasi	814,434,917	--	--	--	814,434,917	Certification
Konsultan dan Appraisal	556,370,000	91,500,000	--	--	647,870,000	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	32,340,626,508	1,024,084,962	337,840,000	--	33,026,871,470	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	4,927,571,277	--	--	--	4,927,571,277	Articles of Association
Lainnya	114,069,974,404	500,000,000	--	4,023,272,727	118,593,247,131	Others
<u>Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian</u>						<u>Intangible Assets Under Contructions</u>
Hak Konsesi - Kuala Tanjung	3,251,549,298,878	--	--	(3,195,486,199,453)	56,063,099,425	Concession right - Kuala Tanjung
Hak Konsesi - Belawan Fase 2	1,301,486,343,557	1,428,479,183,942	--	(2,228,302,147,910)	501,663,379,589	Concession right - Belawan Phase 2
Lainnya	254,896,251,594	72,285,405,564	2,047,877,839	(78,874,498,737)	246,259,280,582	Others
Sub Jumlah	4,975,073,706,370	1,863,727,426,915	2,385,717,839	11,426,969,872	6,847,842,385,318	Sub Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization
<u>Aset Takberwujud - Hak Konsesi</u>						<u>Intangible Assets - Concession rights</u>
Kuala Tanjung	--	36,067,683,018	--	--	36,067,683,018	Kuala Tanjung
<u>Aset Takberwujud Lainnya :</u>						<u>Other Intangible Assets:</u>
Piranti Lunak	17,212,861,077	36,685,338,471	--	--	53,898,199,548	Computer Software
Sertifikasi	576,891,399	586,298,018	--	--	1,163,189,417	Certification
Konsultan dan Appraisal	396,718,305	1,340,745,905	--	--	1,737,464,210	Consultant and Appraisal
Pendidikan dan Sarana	14,734,791,296	7,776,606,870	--	--	22,511,398,166	Education and Facilities
Pendirian dan Perubahan Anggaran						Establishment and Amendments to
Dasar	3,842,251,460	788,073,402	--	--	4,630,324,862	Articles of Association
Lainnya	55,229,041,909	23,402,288,620	--	--	78,631,330,529	Others
Sub Jumlah	91,992,555,446	106,647,034,304	--	--	198,639,589,750	Sub Total
Jumlah	4,883,081,150,924				6,649,202,795,568	Total

Beban amortisasi aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp145.222.888.591 dan Rp106.647.034.304 yang dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 31).

Amortization expense of intangible assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp145,222,888,591 and Rp106,647,034,304 are recorded as part of operating expenses, respectively (Note 31).

Kapitalisasi biaya pinjaman pada aset takberwujud dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

Capitalized borrowing costs in the intangible assets under construction are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29,080,054,798	50,587,601,964	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Sindikasi (Mandiri, BNI, BRI)	--	65,790,197,788	Syndicate Bank (Mandiri, BNI, BRI)
Bank Sindikasi (Mandiri, IIF)	12,451,098,694	3,101,944,192	Syndicate Bank (Mandiri, IIF)
Jumlah	41,531,153,492	119,479,743,944	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal *Multi Purpose* Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

Perusahaan telah memperoleh hak konsesi Kuala Tanjung berdasarkan perjanjian No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 tanggal 16 November 2016 dengan jangka waktu 69 tahun dan hak konsesi Belawan Fase 2 berdasarkan perjanjian No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 tanggal 4 April 2014 dengan jangka waktu 70 tahun.

Pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah mengasuransikan aset takberwujud bersama-sama dengan aset tetap, terhadap, risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya. (Catatan 14).

Assets of concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate Terminal Multi Purpose Kuala Tanjung and Container Terminal Belawan Phase 2.

The Company had obtained a concession right of Kuala Tanjung based on agreement No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 dated November 16, 2016 with a term of 69 years and a concession right of Belawan Phase 2 based on agreement No. PR.801/1/9/OP.BLW-14 dated April 4, 2014 with a term of 70 years.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has insured intangible assets together with fixed assets, against, fire risk, property all risk, industrial all risk and other risks (Note 14).

13. Aset Hak Guna

13. Right of Use Assets

2020						
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Dampak PSAK 73/ Impact of PSAK 73 Rp	Saldo awal yang disesuaikan/ Adjusted Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
<u>Harga perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
Tanah	--	--	174,268,830,703	--	174,268,830,703	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	--	3,613,720,654	13,986,414,906	--	17,600,135,560	Building and Facilities
Kendaraan	--	2,438,314,501	1,032,822,254	--	3,471,136,755	Vehicles
Jumlah	--	6,052,035,155	189,288,067,863	--	195,340,103,018	Total
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulation Depreciations</u>
Tanah	--	--	674,449,578	--	674,449,578	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	--	--	6,622,879,922	--	6,622,879,922	Building and Facilities
Kendaraan	--	--	2,134,626,021	--	2,134,626,021	Vehicles
Jumlah	--	--	9,431,955,521	--	9,431,955,521	Total
Nilai Buku	--	6,052,035,155	179,856,112,342	--	185,908,147,497	Book Value

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

Statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

	2020 Rp	
Beban Penyusutan:		<i>Depreciation Expenses:</i>
Tanah	674,449,578	Land
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	6,622,879,922	Building and Facilities
Kendaraan	2,134,626,021	Vehicles
Sub Jumlah (Catatan 31)	9,431,955,521	Sub Total (Note 31)
Beban Bunga (Catatan 33)	4,900,319,871	Interest Expense (Note 33)
Jumlah	14,332,275,392	Total

14. Aset Tidak Lancar Lainnya

14. Other Non-Current Assets

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
<u>Persediaan Tidak Produktif</u>			<u>Idle Inventories</u>
Pelumas	9,200,378	9,200,378	Lubricants
<u>Estimasi Tagihan Pajak</u>			<u>Estimated Claim for Tax Refund</u>
Pajak Bumi dan Bangunan (Catatan 39b)	56,479,833,734	--	Land and Building Tax (Note 39b)
<u>Aset Tetap Belum Dimanfaatkan</u>			<u>Unutilized Fixed Assets</u>
Tanah	805,851,797	805,851,797	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	20,874,229,471	20,874,229,471	Building Port Facilities
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	170,500,000	170,500,000	Installations of Port Facilities
Jalan dan Bangunan	2,908,140,000	2,908,140,000	Roads and Buildings
Kendaraan	634,024,224	634,024,224	Vehicles
Sub Jumlah	25,392,745,492	25,392,745,492	Sub Total
Penurunan Nilai	(21,498,120,123)	--	Impairment
Sub Jumlah	3,894,625,369	25,392,745,492	Sub Total
<u>Aset Tetap Tidak Produktif</u>			<u>Idle Fixed Assets</u>
Tanah	5,137,300	5,137,300	Lands
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2,894,033,759	20,877,039	Building Port Facilities
Kapal	1,291,625,396	2,284,419,124	Ships
Alat fasilitas pelabuhan	116,415,142,579	121,124,453,070	Equipment of Port Facilities
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	3,001,886,620	2,416,763,438	Installations of Port Facilities
Jalan dan Bangunan	3,658,856,955	2,616,111,644	Roads and Buildings
Peralatan	2,534,545,104	662,652,959	Equipments
Kendaraan	12,550,111	12,550,111	Vehicles
Emplasmen	368,864,365	368,864,365	Emplacements
Sub Jumlah	130,182,642,189	129,511,829,050	Sub Total
Akumulasi Penyusutan			Accumulation Depreciations
Aset Tetap Tidak Produktif	(121,781,888,324)	(121,590,781,161)	of Idle Fixed Assets
Sub Jumlah	8,400,753,865	7,921,047,889	Sub Total
Nilai Buku	68,784,413,346	33,322,993,759	Book Value

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *Transtainer, Rubber Tired Gantry Crane, Forklift, Reach Staker*, dan *Harbour Mobile Crane*.

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as Transtainer, Rubber Tired Gantry Crane, Forklift, Reach Staker, and Harbour Mobile Crane.

15. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

15. Other Non-Current Financial Assets

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Uang Jaminan	2,682,469,344	2,171,080,675	Security Deposits
Piutang Lain-lain			Other Receivables -
Pihak Ketiga	31,375,405,126	23,692,863,940	Third Parties
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai			Losses
Piutang Lain-lain			Other Receivables
Pihak Ketiga	(31,375,405,126)	(23,692,863,940)	Third Parties
Jumlah	2,682,469,344	2,171,080,675	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan piutang usaha tak tertagih dan telah dibentuk cadangan penurunan nilai.

Other receivable balances as of 31 December 2020 and 2019 were uncollectible and an allowance for impairment losses was established.

Saldo uang jaminan pada 31 Desember 2020 merupakan terutama berasal dari uang jaminan langganan yang dibayarkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas perubahan daya listrik yang sebelumnya 865 KVA menjadi 10.380 KVA.

The security deposit balances as at December 31, 2020 is mainly derived from subscription security deposits paid to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for changes in electrical power from 865 KVA to 10,380 KVA.

Saldo uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan deposito yang dijaminan untuk kredit modal kerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 19) oleh entitas anak PT PIL. Deposito tersebut berjangka waktu 1-3 bulan, dengan tingkat suku bunga pada tahun 2019 sebesar 6-6,25%.

The security deposit balances as at December 31, 2019 represents deposits pledged for working capital loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 19) by PT PIL's subsidiary. These deposits have a maturity of 1-3 months, with interest rates in 2019 of 6-6.25%.

16. Utang Usaha

16. Account Payables

	2020	2019	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan Pemasok:			a. By Supplier
Pihak Berelasi (Catatan 35)	107,235,762,901	198,122,846,257	Related Parties (Note 35)
Pihak Ketiga	690,958,119,601	1,692,574,184,059	Third Parties
Jumlah	798,193,882,502	1,890,697,030,316	Total
b. Berdasarkan Mata Uang			b. By Original Currency
USD	68,015,683,425	425,264,084,733	USD
Rupiah	730,178,199,077	1,465,432,945,583	Rupiah
Jumlah	798,193,882,502	1,890,697,030,316	Total

17. Beban Akruai

17. Accrued Expenses

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pegawai	78,605,920,482	61,156,026,248	Employee
Kerja Sama Mitra Usaha	30,293,247,230	15,385,970,149	Partnerships
Sewa	20,301,201,420	17,247,933,809	Rental
Umum	23,876,202,957	7,087,776,399	General
Sanksi Administrasi PPN	16,817,750,600	--	Administrative Sanction of VAT
Kontribusi Kepada Pihak Lain	11,898,643,413	12,264,733,620	Contributions to Other Parties
Bunga	9,715,422,806	--	Interest
Pemeliharaan	5,884,865,422	9,217,345,687	Maintenance
Lainnya (dibawah Rp5 miliar)	14,789,715,014	4,226,194,393	Others (under Rp5 billion)
Jumlah	212,182,969,344	126,585,980,305	Total

18. Perpajakan

18. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2020	2019	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
PPH Pasal 23	--	2,383,664,805	Income Taxes Article 23
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	10,270,318,339	49,638,825,880	Creditable VAT Input Income Taxes Article 28A
PPH Pasal 28A Tahun 2019	156,095,449,043	156,095,449,043	Year 2019
Sub Jumlah	<u>166,365,767,382</u>	<u>208,117,939,728</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPH Pasal 22	848,959,215	875,744,859	Income Taxes Article 22
PPH Pasal 23	1,333,629,065	985,576,505	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 25	5,029,290,036	4,906,712,228	Income Taxes Article 25
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	197,294,786,882	298,834,691,272	VAT Input - can be Credited
Sub Jumlah	<u>204,506,665,198</u>	<u>305,602,724,864</u>	Sub Total
Jumlah	<u>370,872,432,580</u>	<u>513,720,664,592</u>	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2020	2019	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
PPH Pasal 21	4,255,451,124	4,920,049,863	Income Taxes Article 21
PPH Pasal 22	755,910,089	1,001,543,373	Income Taxes Article 22
PPH Pasal 23	1,442,194,073	3,106,244,535	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 4 Ayat (2)	449,817,071	612,674,386	Income Taxes Article 4 (2)
PPH Pasal 25	5,216,039,502	22,420,070,394	Income Taxes Article 25
PPH Pasal 26	9,447,710	9,447,710	Income Taxes Article 26
PPH Pasal 29	18,134,450,399	--	Income Taxes Article 29
PPH Pasal 15	145,057,622	131,894,947	Income Taxes Article 15
PPN keluaran	22,416,199,376	26,480,288,286	VAT out
PPN Masukan Dapat Dikreditkan	11,278,946,938	12,851,472,375	Creditable VAT Input
PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	2,016,652,096	2,143,753,976	Non-Creditable VAT Input
Sub Jumlah	<u>66,120,166,000</u>	<u>73,677,439,845</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PPH Pasal 21	596,444,921	710,106,951	Income Taxes Article 21
PPH Pasal 23	126,681,886	113,474,194	Income Taxes Article 23
PPH Pasal 4 Ayat (2)	2,280,054,182	2,375,020,950	Income Taxes Article 4 (2)
PPH Pasal 25	--	107,178,327	Income Taxes Article 25
PPH Pasal 29	3,995,364,309	--	Income Taxes Article 29
PPN Keluaran	48,705,000	1,551,061,258	VAT Out
Sub Jumlah	<u>7,047,250,298</u>	<u>4,856,841,680</u>	Sub Total
Jumlah	<u>73,167,416,298</u>	<u>78,534,281,525</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Pajak Penghasilan

c. Income Tax

	2020 Rp	2019 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Parent Entity</u>
Pajak Kini	(119,557,244,180)	(124,992,827,250)	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	1,577,432,886	(1,625,745,531)	Deferred Tax for the Current Year
Sub Jumlah	<u>(117,979,811,294)</u>	<u>(126,618,572,781)</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Kini	(5,477,639,948)	--	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	110,340,104,335	44,817,420,335	Deferred Tax for the Current Year
Efek Perubahan Tarif Pajak	(15,584,785,398)	--	Effect on Changes on Tax Rate
Sub Jumlah	<u>89,277,678,989</u>	<u>44,817,420,335</u>	Sub Total
<u>Konsolidasian</u>			<u>Consolidated</u>
Pajak Kini	(125,034,884,128)	(124,992,827,250)	Current Tax
Pajak Tangguguhan Tahun Berjalan	111,917,537,221	43,191,674,804	Deferred Tax for the Current Year
Efek Perubahan Tarif Pajak	(15,584,785,398)	--	Effect on Changes on Tax Rate
Jumlah	<u>(28,702,132,305)</u>	<u>(81,801,152,446)</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Pajak			Income Before Income Tax
Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	211,822,502,275	287,977,621,290	According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	341,731,847,279	218,647,501,281	Profit Before Income Tax of Subsidiaries
Penyesuaian Eliminasi Konsolidasian	156,751,248	(1,138,107,439)	Adjusted for Consolidated Elimination
Bagian Laba (Rugi) Investasi kepada Entitas Asosiasi	(271,949,452)	756,834,865	Investment Gain (Loss) to Associates
Jumlah	<u>553,439,151,349</u>	<u>506,243,849,997</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Perbedaan Temporer	7,887,164,423	(6,502,982,124)	Temporary Difference
Beban (Pendapatan) yang Tidak Dapat Diperhitungkan			Nondeductible Expenses
Menurut Fiskal	140,906,821,046	139,497,517,508	(Nontaxable Income)
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	(158,791,117,180)	(139,267,075,559)	Income Subject to Final Tax
Jumlah	(9,997,131,712)	(6,272,540,175)	Total
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan	543,442,019,638	499,971,309,822	Taxable Income for The Year
Laba Kena Pajak Tahun Berjalan (Pembulatan)	543,442,019,000	499,971,309,000	Taxable Income for The Year (Rounded)
Tarif Pajak (%)	22%	25%	Tax Rate (%)
Beban Pajak Kini Perusahaan	119,557,244,180	124,992,827,250	Current Tax Expense of The Company
Beban Pajak Kini Entitas Anak			Current Tax Expense of Subsidiaries
PTP	393,721,614	--	PTP
PHCM	2,244,006,974	--	PHCM
PIL	2,839,911,360	--	PIL
Sub Jumlah	5,477,639,948	--	Sub Total
Jumlah Beban Pajak Kini	125,034,884,128	124,992,827,250	Total Current Tax Expense
Beban Pajak Kini Perusahaan	119,557,244,180	124,992,827,250	Current Tax Expense of The Company
Dikurangi Pajak Dibayar Di Muka Perusahaan			Less Prepaid Taxes The Company
Pasal 22	2,996,924,000	7,677,136,000	Article 22
Pasal 23	4,125,946,896	4,370,295,564	Article 23
Pasal 25	94,299,922,885	269,040,844,729	Article 25
Jumlah	101,422,793,781	281,088,276,293	Total
(Lebih) Kurang Bayar Pajak Penghasilan: Perusahaan	18,134,450,399	(156,095,449,043)	(Overpayment) Underpayment of Income Tax: The Company
Entitas Anak			Subsidiaries
PTP	393,636,465	--	PTP
PIL	(475,824,462)	(5,591,254,690)	PIL
PHCM	1,922,465,433	(1,092,604,942)	PHCM
PMP (Entitas Anak PIL)	1,679,255,851	(72,446,559)	PMP (Subsidiary of PIL)
Sub Jumlah	3,519,533,287	(6,756,306,191)	Sub Total
(Lebih) Kurang Bayar Pajak Penghasilan-Neto	21,653,983,686	(162,851,755,234)	(Overpayment) Underpayment of Income Tax-Net

Perhitungan penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 tersebut di atas didasarkan pada perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari laba kena pajak yang

The calculation of taxable income (fiscal loss) for the year ending December 31, 2020, above is based on an interim calculation. This amount may differ from the taxable income reported in the annual corporate income tax return. The

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan badan tahunan. Perhitungan laba kena pajak (rugifiskal) hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

calculation of taxable profit (fiscal loss) from the reconciliation results above becomes the basis for filling the Annual Corporate Income Tax Return.

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

	Penyesuaian Dampak Penerapan PSAK 71/ Adjustment for the impact of the Application of PSAK 71	Penyesuaian Tarif Pajak/ Tax Rate Adjustment	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugif/ Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	1 Januari 2020/ January 1, 2020	31 Desember 2020/ December 31, 2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan						
<u>Perusahaan</u>						
Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi	(116,690,270,281)	--	(25,097,329,186)	--	(141,787,599,467)	
Amortisasi Aset Takberwujud	11,259,969,845	--	4,158,121,737	--	15,418,091,582	
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	23,237,842,037	18,359,242,743	(5,957,009,614)	--	35,640,075,166	
Imbalan Kerja	98,622,979,004	--	6,637,970,033	457,313,751	105,718,262,788	
Bonus	--	--	13,800,000,000	--	13,800,000,000	
Provisi	--	--	736,666,666	--	736,666,666	
Cadangan Penurunan Nilai Aset	--	--	7,299,013,250	--	7,299,013,250	
Sub Jumlah	16,430,520,605	18,359,242,743	1,577,432,886	457,313,751	36,824,509,985	
<u>Entitas Anak</u>						
PIL	139,685,688	1,144,973,258	(256,931,789)	1,583,743,308	--	2,611,470,465
PPK	5,022,662,389	--	26,970,407	--	5,049,632,796	
PHCM	69,731,095	--	658,018,455	--	727,749,550	
PMT	76,639,268,044	--	(15,327,853,609)	108,087,515,847	2,409,149	169,401,339,431
Sub Jumlah	81,871,347,216	1,144,973,258	(15,584,785,398)	110,356,248,017	2,409,149	177,790,192,242
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	98,301,867,821	19,504,216,001	(15,584,785,398)	459,722,900	214,614,702,227	
Liabilitas Pajak Tangguhan						
<u>Entitas Anak</u>						
PTP	--	--	(16,143,682)	--	(16,143,682)	
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	--	--	(16,143,682)	--	(16,143,682)	

	Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak/ Tax Base Adjustment	Penyesuaian Tarif Pajak/ Tax Rate Adjustment	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugif/ Credited (Charged) to profit or loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the year	1 Januari 2019/ January 1, 2019	31 Desember 2019/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan						
<u>Perusahaan</u>						
Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi	(96,828,761,126)	--	(19,861,509,155)	--	(116,690,270,281)	
Amortisasi Aset Takberwujud	5,928,739,750	--	5,331,230,095	--	11,259,969,845	
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	16,318,319,893	--	6,919,522,144	--	23,237,842,037	
Imbalan Kerja	71,577,133,509	--	5,985,011,385	21,060,834,110	98,622,979,004	
Sub Jumlah	(3,004,567,974)	--	(1,625,745,531)	21,060,834,110	16,430,520,605	
<u>Entitas Anak</u>						
PIL	1,159,431,689	--	(1,019,746,001)	--	139,685,688	
PPK	5,021,353,377	--	1,309,012	--	5,022,662,389	
PHCM	--	--	69,731,095	--	69,731,095	
PTP	12,383,117,397	--	(12,383,117,397)	--	--	
PMT	18,490,024,418	--	58,149,243,626	--	76,639,268,044	
Sub Jumlah	37,053,926,881	--	44,817,420,335	--	81,871,347,216	
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	34,049,358,907	--	43,191,674,804	21,060,834,110	98,301,867,821	

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan hasil perkalian laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense to the consolidated profit or loss and other comprehensive income tax expense calculate using prevailing tax rate are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Laba Sebelum Pajak			<i>Income Before Income Tax</i>
Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	211,822,502,275	287,977,621,290	<i>According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	341,731,847,279	218,647,501,281	<i>Income (Loss) Before Income Tax Subsidiaries</i>
Penyesuaian Eliminasi Konsolidasian	156,751,248	(1,138,107,439)	<i>Adjusted for Consolidated Elimination</i>
Bagian Laba (Rugi) Investasi kepada Entitas Asosiasi	(271,949,452)	756,834,865	<i>Investment Gain (Loss) to Associates</i>
Jumlah	<u>553,439,151,349</u>	<u>506,243,849,997</u>	<i>Total</i>
Tarif Pajak (%)	22%	25%	<i>Tax Rate (%)</i>
Tahun 2020	(121,756,613,297)	--	<i>Year 2020</i>
Tahun 2019	--	(126,560,962,499)	<i>Year 2019</i>
Sub Jumlah	<u>(121,756,613,297)</u>	<u>(126,560,962,499)</u>	<i>Sub Total</i>
Pengaruh Pajak atas Pendapatan (Beban) yang Tidak Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskal	(30,999,500,489)	(34,874,379,172)	<i>Tax Effect of Nontaxable Income (Nondeductible Expense)</i>
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Final	34,934,045,780	34,816,768,890	<i>Income Subject to Final Tax</i>
Selisih Tarif Pajak Tangguhan	(157,743,288)	--	<i>Deferred Tax Rate Difference</i>
Sub Jumlah	<u>3,776,802,003</u>	<u>(57,610,282)</u>	<i>Sub Total</i>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Perusahaan	(117,979,811,294)	(126,618,572,781)	<i>Income Tax Benefit (Expense) The Company</i>
Entitas Anak	89,277,678,989	44,817,420,335	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah Beban Pajak	<u>(28,702,132,305)</u>	<u>(81,801,152,446)</u>	<i>Total Tax Expense</i>

19. Utang Bank Jangka Panjang

19. Long-Term Bank Loans

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Utang Bank Jangka Panjang	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736	<i>Bank Loans</i>
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	(410,495,386,081)	(214,549,156,365)	<i>Current Maturities of Long-Term Liabilities</i>
Bagian Utang Bank Jangka Panjang	<u>6,149,254,631,216</u>	<u>5,751,017,927,371</u>	<i>Long-Term Bank Loans</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of long-term bank loans are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Perusahaan/ the Company</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	208,209,389,591	208,209,389,591
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated Bank Loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	620,535,884,602	581,666,200,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	611,735,805,409	571,666,200,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	611,735,805,409	571,666,200,000
Sub Jumlah/ Sub Total	2,052,216,885,011	1,933,207,989,591
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
PT Bank Syariah Mandiri	77,903,571,192	89,500,349,698
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	417,173,317,946	416,657,417,711
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,102,929,032,761	1,075,917,777,963
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated bank loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	397,016,148,251	145,451,536,946
PT Indonesia Infrastructure Finance	397,016,148,251	145,451,536,946
<u>Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated bank loans</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	705,164,971,295	719,793,491,627
Sub Jumlah/ Sub Total	4,507,533,132,286	4,032,359,094,145
Jumlah/ Total	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736

Rincian bagian lancar liabilitas jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of the current maturities of long-term liabilities are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Perusahaan/ the Company</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	148,806,322,516	70,416,713,333
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	124,142,809,500	70,000,046,667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	124,142,809,500	70,000,046,667
Sub Jumlah/ Sub Total	397,091,941,516	210,416,806,667
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
PT Bank Syariah Mandiri	13,403,444,565	4,132,349,698
Sub Jumlah/ Sub Total	13,403,444,565	4,132,349,698
Jumlah/ Total	410,495,386,081	214,549,156,365

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Saldo Outstanding/ Outstanding Balance	Suku Bunga Pertahun/ Annual Interest Rate	Jaminan/ Collateral
<u>Perusahaan/ The Company</u>							
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit 2017: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 1,050,000,000,000	23 Desember 2024/ December 23, 2024	Rp 699,997,200,000	WATD 3 Bulan/ Months + 3%	Negative Pledge
	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit 2018: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 1,300,000,000,000	23 Desember 2025/ December 23, 2025	Rp 1,144,010,295,420	WATD 3 Bulan/ Months + 3.5%	Negative Pledge
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 700,000,000,000	23 Desember 2029/ December 23, 2029	Rp 208,209,389,591	WATD 3 Bulan/ Months + 3%	Negative Pledge

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempol/ Due Date	Saldo Outstanding/ Outstanding Balance	Suku Bunga Pertahun/ Annual Interest Rate
Entitas Anak/ Subsidiaries						
PT Prima Terminal Petikemas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit Jaminan (Catatan 12)	Rp 1,152,000,000,000	28 September 2030/ September 28, 2030	Rp 1,102,949,032,761	JIBOR 3 Bulan/ Months + 3.35%
		1. Tanah, bangunan dermaga dan container yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dan dan diikat dengan Security Coverage Ratio minimal 120% dari limit fasilitas kredit.				1. Land, jetty buildings and container yards as well as other objects attached to the land of the Belawan Container Terminal Phase 2 and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.
		2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas Belawan Fase 2				2. All results of claims for guarantees and insurance on infrastructure development projects of Jetty and Belawan Container Terminal Phase 2.
	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Indonesia Infrastructure Finance	1. Kredit Investasi/ Investment Credit 2. Kredit/ Credit NCL (Non Cash Loan) 3. Kredit bunga masa konstruksi Interest during construction Jaminan (Catatan 12)	\$ 70,174,000 \$ 70,174,000 \$ 2,410,000	28 September 2030/ September 28, 2030	\$ 56,294,345	LIBOR 3 Bulan/ Months + 3.85%
		1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (bank guarantee) dan/atau SBLC, dan/atau asuransi atas proyek.				1. Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC, and/or insurance for the project.
		2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PT Prima Terminal Petikemas yang dibiayai oleh kreditur sindikasi.				2. Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PT Prima Terminal Petikemas financed by syndicated creditors.
		3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan banker's clause dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi.				3. All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.
PT Prima Multi Terminal	Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit: - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Investasi/ Investment Credit Jaminan (Catatan 12)	Rp 2,194,278,000,000	23 Maret 2026/ March 23, 2026	Rp 2,115,494,913,885	JIBOR 3 Bulan/ Months + 3.25%
		1. Tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Multipurpose (TMP) dan diikat dengan Security Coverage Ratio minimal 120% dari limit fasilitas kredit.				1. Land and buildings and other objects attached to the land of the Multipurpose Terminal and bound with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit facility limit.
		2. Jaminan fidusia atas Fasilitas Pelabuhan berikut seluruh peralatan dan perlengkapan Fasilitas Pelabuhan terkait dengan TMP dengan Security Coverage Ratio minimal 120% dari limit kredit.				2. Fiduciary guarantee for Port Facilities along with all Port Facility equipment related to TMP with a Security Coverage Ratio of at least 120% of the credit limit.
		3. Jaminan Fidusia seluruh hasil klaim atas bank garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur TMP dengan Security Coverage Ratio 100% dari nilai bank garansi dan klaim asuransi.				3. Fiduciary guarantee of all results of claims for bank guarantees and insurance on infrastructure development projects of TMP with a Security Coverage Ratio of 100% of the value of bank guarantees and insurance claims.
		4. Pengalihan (cessie) atas rekening penampungan.				4. Transfer (cessie) of escrow accounts.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Entitas/ Entity	Kreditur/ Creditor	Jenis Fasilitas/ Facility Type	Jumlah Fasilitas/ Amount Facility	Jatuh Tempo/ Due Date	Saldo Outstanding/ Outstanding Balance	Suku Bunga Tahun/ Annual Interest Rate
Entitas Anak/ Subsidiaries						
PT Prima Multi Terminal	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1. Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 461,000,000,000	28 Maret 2031/ March 28, 2031	Rp 417,173,317,948	JIBOR 3 Bulan/ Months + 5.25%
		2. Kredit bunga konstruksi/ Interest during construction	Rp 18,600,000,000			
		Jaminan (Catatan 12)		Colateral (Note 12)		
		1. Hak tanggungan untuk seluruh tanah dan bangunan serta benda-benda yang melekat di atas tanah TMP Kuala Tanjung.		1. Deferred rights for all land and buildings as well as objects attached to the Kuala Tanjung TMP land.		
		2. Jaminan fidusia atas seluruh fasilitas TMP Kuala Tanjung berikut seluruh peralatan dan perlengkapan fasilitas.		2. Fiduciary guarantee for all TMP Kuala Tanjung facilities as well as all equipment and facilities.		
		3. Jaminan fidusia atas seluruh hasil klaim bank garansi dan/atau klaim asuransi debitur atas pekerjaan pembangunan infrastruktur TMP yang diterima dari kontraktor dan/atau vendor, atau pemasok.		3. Fiduciary guarantee for all results of bank guarantee claims and/or debtor insurance claims on TMP infrastructure construction work received from contractors and/or vendors, or suppliers.		
		4. Pengalihan (cessie) atas rekening penampungan.		4. Transfer (cessie) of escrow accounts.		
		5. Gadai deposito atas rekening debt service reserve account (DSRA).		5. Pledge deposit on debt service reserve account (DSRA).		
		6. Surat pernyataan dan kesanggupan (Letter of Undertaking) dari para pemegang saham debitur.		6. Letter of Undertaking from debtor shareholders.		
PT Prima Indonesia Logistik	PT Bank Syariah Mandiri	Kredit Investasi/ Investment Credit	Rp 91,000,000,000	20 April 2025/ April 20, 2025	Rp 77,903,571,192	Margin 9%
		Jaminan (Catatan 11)		Colateral (Note 11)		
		2. Unit Harbor Mobile Crane (HMC) yang diikat Fidusia senilai Rp103.299.200.000.		2 Units of Harbor Mobile Cranes (HMC) bound by Fiduciary, worth Rp.103,299,200,000.		

20. Utang Obligasi

20. Bonds Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai Nominal			Nominal
Utang Pokok Obligasi	950,000,000,000	950,000,000,000	Bond Principal Payable
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(1,023,637,456)	(1,776,523,245)	Unamortized of Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	948,976,362,544	948,223,476,755	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(499,768,052,410)	--	Current Maturities in One Year
Jumlah	449,208,310,134	948,223,476,755	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Rincian obligasi per seri:

Details of Bond per tranches are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Seri B			Tranche B
Utang Pokok Obligasi Seri B	500,000,000,000	500,000,000,000	Bond Principal - Tranche B
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(231,947,590)	(696,675,843)	Unamortized Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	<u>499,768,052,410</u>	<u>499,303,324,157</u>	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(499,768,052,410)	--	Current Maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri B	<u>--</u>	<u>499,303,324,157</u>	Total Bonds Payable - Tranche B
Seri C			Tranche C
Utang pokok obligasi seri C	400,000,000,000	400,000,000,000	Bond principal - Tranche B
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(663,870,376)	(928,901,022)	Unamortized Bond issuance cost
Sub Jumlah	<u>399,336,129,624</u>	<u>399,071,098,978</u>	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	--	--	Current maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri C	<u>399,336,129,624</u>	<u>399,071,098,978</u>	Total Bonds Payable - Tranche C
Seri D			Tranche D
Utang Pokok Obligasi Seri D	50,000,000,000	50,000,000,000	Bond principal - Tranche B
Biaya Emisi yang Belum Diamortisasi	(127,819,490)	(150,946,380)	Unamortized Bond Issuance Cost
Sub Jumlah	<u>49,872,180,510</u>	<u>49,849,053,620</u>	Sub Total
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	--	--	Current Maturities in One Year
Jumlah Obligasi Seri D	<u>49,872,180,510</u>	<u>49,849,053,620</u>	Total Bonds Payable - Tranche D
Jumlah	<u>449,208,310,134</u>	<u>948,223,476,755</u>	Total

Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Tanggal Terbit/ Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/ Interest Payment Period	Tingkat Bunga Pertahun/ Interest Rate per Annum
Seri B/ Tranche B	Rp 500,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2021/ June 21, 2021	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.00%
Seri C/ Tranche C	Rp 400,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2023/ June 21, 2023	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.25%
Seri D/ Tranche D	Rp 50,000,000,000	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2026/ June 21, 2026	Setiap 3 (tiga) bulan/ Quarterly	9.50%

Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk sebagai wali amanat.

All bonds are sold at nominal value and listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) with PT Bank Tabungan Negara Tbk as the bank trustee.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur emiten lainnya

These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP. The rights of bondholders are *pari passu* without preferential rights with the creditor rights of other issuers both now and in the future, except for the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Grup telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") dan PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat: AA (idn) / idAA (Double A).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan pemegang obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan obligasi bagi pemegang obligasi adalah konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali (*Buy Back*) obligasi, dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana disebutkan dalam prospektus.

Company's creditors' rights which are specifically guaranteed with the assets of the existing and future companies. In the context of the issuance of these bonds, the Company has obtained a rating on long-term bonds (bonds) from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") and PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") with ratings: AA (idn)/idAA (Double A).

These bonds are issued scripless, except for the jumbo certificate of bonds issued to be registered in the name of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) as proof of debt for the benefit of bondholders. These bonds are registered in the name of KSEI for the benefit of account holders in KSEI, which are subsequently for the interest of bondholders and are registered on the date the Company's jumbo bond certificate is submitted to KSEI. Proof of bond ownership for bondholders is written confirmation issued by KSEI, Securities Company or Custodian Bank.

The Company can Buy Back the bonds, which intended as repayment or redeposited for later resale at market prices, the implementation of bond buybacks is carried out through the Stock Exchange or outside the Stock Exchange, the buyback of new bonds can be done 1 (one) year after the allotment date as stated in the prospectus.

21. Liabilitas Sewa

21. Lease Liabilities

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments as at 31 Desember 2020 was as follows:

	2020	
	Rp	
Liabilitas Sewa Bruto -		Gross Lease Liabilities -
Pembayaran Sewa Minimum		Minimum Lease Payments
- Lebih dari 1 Tahun dan		Later than 1 Year and -
Kurang dari 5 Tahun	20,150,512,584	not Later than 5 Years
- Lebih dari 5 Tahun	2,324,844,843,188	Later than 5 Years -
Sub Jumlah	<u>2,344,995,355,772</u>	Sub Total
Beban Keuangan di Masa		Future Finance Charges
Depan atas Sewa	<u>(2,167,783,080,441)</u>	on Leases
Nilai Kini Liabilitas Sewa	<u><u>177,212,275,331</u></u>	Present Value of Lease Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> <u>Rp</u>	
Nilai Kini Liabilitas Sewa adalah sebagai berikut:		The Present Value of Lease Liabilities is as follows:
- Lebih dari 1 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	21,313,908,690	Later than 1 Year and - Not Later than 5 Years
- Lebih dari 5 Tahun	<u>155,898,366,642</u>	Later than 5 Years -
Sub Jumlah	177,212,275,332	Sub Total
Dikurangi: Bagian Lancar	<u>(3,092,006,632)</u>	Less: Current Portion
Bagian Jangka Panjang	<u>174,120,268,700</u>	Non-Current Portion

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan.

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period.

22. Liabilitas Imbalan Kerja

22. Employee Benefits Liability

Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") dan imbalan kerja lainnya. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja lainnya pada tahun 2020 dan 2019 dicatat berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal (d/h PT Bestama Aktuaria).

a. Program Dana Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero).

b. Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon

Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, manfaat PPUKP dapat dikompensasikan terhadap semua kewajiban Perusahaan kepada karyawannya dalam memenuhi ketentuan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada saat karyawan memasuki usia pensiun maupun karyawan yang terkait dengan kasus Pemutusan

Post-employment Benefit Plans and Other Long-term Employee Benefit

The Group has Defined Benefit Pension Plan ("PPMP") and other benefits. Post-employment benefits liabilities and other employee benefits in 2020 and 2019 is recorded based on actuarial calculations by actuary Actuary Consultant Office Enny Diah Awal (formerly PT Bestama Aktuaria).

a. Defined Benefit Pension Fund Program

Defined Benefit Pension Fund Program is managed by the Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), whose establishment deed was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-248/KM.6/2002 dated October 21, 2002. DP4 is a pension fund established by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with founding partners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pengerukan Indonesia (Persero).

b. Severance Compensation Pension Program

Severance Compensation Pension Program (PPUKP) managed by the Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Financial Institution Pension Fund) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the benefits of PPUKP can be compensated for all of the Company's obligations to its employees in complying with Labor Laws No 13/2003 when employees get into retirement age or employees related to cases of Termination of Employment Relationship

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Hubungan Kerja (PHK), sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan.

(PHK), insofar as provided for in the Collective Labor Agreement (PKB) or Company Regulations.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

PT Prima Multi Terminal, entitas anak, memberikan Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") kepada karyawannya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah iuran yang diakui sebagai beban untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp13.828.235 dan nihil.

c. Defined Contribution Pension Plan

PT Prima Multi Terminal, a subsidiary, provides a Defined Contribution Pension Plan ("PPIP") to its employees managed by the Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The contribution amount recognized as an expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp13,828,235 and nil, respectively.

d. Program Imbalan Pascakerja di Entitas Anak

Ketentuan imbalan pascakerja yang dihitung di Entitas Anak, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Husada Cipta Medan dan PT Prima Multi Terminal, mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Perusahaan atau Keputusan Direksi masing-masing perusahaan.

d. Post-employment Benefit Plans of Subsidiaries

Provision of post-employment benefits calculated in subsidiaries, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Husada Cipta Medan and PT Prima Multi Terminal, referring to UU No. 13 year 2003 Labour Laws, and Company Regulations or Board of Directors' Decision in each company.

e. Manfaat Kesehatan Pascakerja

Perusahaan memiliki skema imbalan kesehatan pascakerja, meliputi para pensiunan Perusahaan, sejak pensiunan memasuki usia pensiun sampai meninggal dunia. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun imbalan pasti. Entitas anak tidak memiliki skema imbalan kesehatan pascakerja.

e. Post-retirement Healthcare Benefits

The Company has post-retirement healthcare benefits schemes, involve the Company's retired employees, from the date of the employees' retirement until death. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes. The subsidiaries have no post-employment healthcare benefit schemes.

f. Imbalan Jangka Panjang Lain

PT Prima Multi Terminal, entitas anak, memberikan Program Masa Persiapan Pensiun bagi pekerja yang akan memasuki masa pensiun.

f. Other Long-Term Benefits

PT Prima Multi Terminal, a subsidiary, provide a Pension Preparation Period Program for workers who are about to retire.

Liabilitas Imbalan Kerja

Tabel berikut menyajikan ikhtisar liabilitas imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

Employee Benefits Liabilities

The table below presents a summary of the employee benefits liabilities and expenses reported in the consolidated statement of financial position:

	2020 Rp	2019 Rp	
Perusahaan:			The Company:
Imbalan Pascakerja	429,968,334,934	394,491,916,016	Post-employment benefits
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Imbalan Pascakerja	985,551,718	692,775,595	Post-employment benefits
Imbalan Kerja			Other Long-term Employee
Jangka Panjang Lain	125,920,241	72,084,582	Benefits
Liabilitas Imbalan Kerja	431,079,806,893	395,256,776,193	Employee Benefit Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perubahan imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lain Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Changes in the post-employment benefit programs and other long-term employment benefits of the Group as of December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Liabilitas Bersih			Net Liability at the Beginning of the Year
Awal Tahun	394,491,916,016	280,281,439,516	Expense for the Year
Beban Tahun Berjalan	71,012,698,710	44,589,877,968	Current Year
Pembayaran Iuran			Contribution Payment
Tahun Berjalan	(33,829,856,248)	(10,994,506,663)	Benefit Payment
Pembayaran Manfaat (Keuntungan)/Kerugian	(3,992,992,300)	(3,628,231,250)	Actuarial (Gain)/Loss in Other Comprehensive Income
Aktuarial pada Penghasilan Komprehensif Lain	<u>2,286,568,756</u>	<u>84,243,336,445</u>	
Sub Total	<u>429,968,334,934</u>	<u>394,491,916,016</u>	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Liabilitas Imbalan			Net Defined Benefit Liability at Beginning of the year
Pasti Neto Awal tahun	764,860,177	351,437,669	Expense for the Year
Beban Tahun Berjalan	397,381,386	413,422,508	Recognition of Liabilities from Past Period
Pengakuan Kewajiban atas Masa Kerja Lalu	(132,945,996)	(19,653,012)	Benefit Payment
Pembayaran Manfaat (Keuntungan)/Kerugian	(4,739,500)	--	Actuarial (Gain)/Loss in Other Comprehensive Income
Aktuarial pada Penghasilan Komprehensif Lain	<u>86,915,892</u>	<u>19,653,012</u>	
Sub Total	<u>1,111,471,959</u>	<u>764,860,177</u>	Sub Total
Liabilitas Imbalan Kerja	<u>431,079,806,893</u>	<u>395,256,776,193</u>	Employee Benefits Liabilities

Rincian biaya imbalan kerja bersih Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the net employee-benefit expense for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Biaya Jasa Kini	19,208,152,543	17,525,600,306	Current Service Fees
Beban Bunga Neto	31,569,437,367	24,392,410,558	Other post-employment benefits
Biaya jasa lalu	20,617,967,595	3,106,067,870	Past service costs
Iuran Peserta	<u>(382,858,795)</u>	<u>(434,200,766)</u>	Net Interest Expense
Sub Total	71,012,698,710	44,589,877,968	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Beban Tahun Berjalan	<u>397,381,386</u>	<u>413,422,508</u>	Expense for the Year
Sub Total	<u>397,381,386</u>	<u>413,422,508</u>	Sub Total
Total	<u>71,410,080,096</u>	<u>45,003,300,476</u>	Total

Jumlah kumulatif dalam penghasilan komprehensif lain Grup untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the cumulative amount in other comprehensive income for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Perusahaan:			The Company:
Akumulasi Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Awal Tahun	239,287,372,095	155,044,035,650	Cumulative Gains/(Losses) Recognized in OCI at Beginning of the Year
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	<u>2,286,568,756</u>	<u>84,243,336,445</u>	Gains/(Losses) Recognized in OCI in Current Year
Sub Total	<u>241,573,940,851</u>	<u>239,287,372,095</u>	Sub Total
Entitas Anak :			Subsidiaries :
Akumulasi Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial Awal Tahun	(3,062,340)	(22,715,352)	Cumulative Gains/(Losses) Recognized in OCI at Beginning of the Year
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial Tahun Berjalan	<u>86,915,892</u>	<u>19,653,012</u>	Gains/(Losses) Recognized in OCI in Current Year
Sub Total	<u>83,853,552</u>	<u>(3,062,340)</u>	Sub Total
Saldo Akhir	<u>241,657,794,403</u>	<u>239,284,309,755</u>	Ending Balance

Asumsi-asumsi Aktuarial

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Tingkat Diskonto	Tergantung program, berada di kisaran/ <i>Depending on program, but within the range of</i> 7.3 - 7.8%	Tergantung program, berada di kisaran/ <i>Depending on program, but within the range of</i> 8.20%	Discount rate
Kenaikan Upah	4% - 10%	4% - 10%	Salary increase
Tabel Mortalitas	<i>The 1949 Annuity Mortality Table</i>	<i>The 1949 Annuity Mortality Table</i>	Mortality Table
Tingkat Cacat	1,00% dari Tingkat Mortalitas/ <i>1.00% of the Mortality Rate</i>	1,00% dari Tingkat Mortalitas/ <i>1.00% of the Mortality Rate</i>	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ <i>1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age</i>	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia pensiun normal/ <i>1.00% at the age of 20 years and decreases linearly up to 0% at normal retirement age</i>	Resignation Rate

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji sebagai berikut:

- a. Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini kewajiban pension imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada obligasi pemerintah jangka Panjang. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.
- b. Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Actuarial Assumptions

Significant actuarial assumptions applied in the calculation of post-employment benefit obligations and other long-term employment benefits for the Group are as follows:

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk, as follows:

- a. Interest Rate Risk
The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determined by reference to yields on Indonesian Government bonds. Decrease interest rate would increase the liability bond program.
- b. Salary Risk
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Diasumsikan bahwa tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat diskonto dan kenaikan gaji akan memiliki dampak terhadap nilai kini kewajiban ibalan pasti pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

An assumption has been made that discount rate and salary growth rates have a significant effect on the amounts recognised in profit or loss. One percent of change in the assumption of discount rate and salary growth will have impact to present value of defined benefit obligation as of December 31, 2020 as following:

	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefits Obligations	Perubahan/ Movement
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	521,918,643,526 566,892,020,340	+0.50% - 1% -0.5% - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate	555,208,480,763 531,974,325,773	+0.50% - 1% -0.5% - 1%

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pension Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Management believes that the estimated liabilities and employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability that is stated by Labor Law No. 13/2003.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follows:

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value of Defined Benefits Obligations	Manfaat Jatuh Tempo/ Benefits of Maturity	Tahun Ke/ Year to
23,715,032,598	24,988,513,793	< 1
14,776,174,445	17,393,963,656	1 - < 2
21,028,372,966	27,609,412,420	2 - < 3
20,023,417,089	29,459,792,857	3 - < 4
18,975,560,296	30,482,150,563	4 - < 5
201,359,077,453	1,367,511,367,663	>= 5

23. Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang

23. Long-Term Unearned Income

	2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang	286,689,431,180	297,169,687,543	<i>Unearned Income</i>
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(75,572,947,543)	(62,827,108,376)	<i>Current Maturities in One Year</i>
Jumlah Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	211,116,483,637	234,342,579,167	Total Long-Term Unearned Income

Pendapatan diterima di muka jangka panjang merupakan pendapatan dari kontrak pelanggan atas perjanjian sewa properti investasi milik Grup (Catatan 10).

Term upfront income represents income from the customer's contract for the Group's investment property rental agreement (Note 10).

24. Provisi

24. Provisions

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Saldo Awal	30,410,559,634	--	Beginning Balances
Penambahan	66,683,486,655	30,410,559,634	Addition
Saldo Akhir	97,094,046,289	30,410,559,634	Ending Balances

Akun ini merupakan provisi atas maintenance dredging dan provisi konsesi atas perhitungan re-investment pemeliharaan dan beban bunga terkait penerapan ISAK 16 tentang Konsesi Jasa.

This account represents a provision for maintenance dredging and a concession provision for the calculation of re-investment in maintenance and interest expense related to the application of ISAK 16 concerning Concession Right.

25. Modal Saham

25. Share Capital

Tahun 2020 dan 2019/ Year 2020 and 2019	Lembar Saham/ Shares	Nominal/ Nominal	Prosentase/ Percentage
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	1,700,000	1,000,000	100.00%

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., mengenai peningkatan modal dasar dari Rp1.800.000.000.000 yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014, terdiri atas:

Based on Notarial Deed No. 207 dated June 30, 2014 made by Notary Risna Rahmi Arifa, SH., concerning increase of authorized capital from Rp1,800,000,000,000 consists of 1,800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share into Rp6,800,000,000,000 consists of 6,800,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, and Company's issued and fully paid capital from Rp511,960,000,000 consists of 511,960 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share into Rp1,700,000,000,000 consists of 1,700,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share. The amendment deed was accepted and recorded in Administrative System for Legal Entities by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement Letter No. AHU.05403.40.20.2014 dated July 11, 2014, are as follows:

Setoran Modal Lama sesuai dengan Akta No 88
Tanggal 16 Agustus 2012 dibuat
oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, SH.

511,960,000,000

*Issued and Paid up Capital in Accordance with
Notary Deed of Notaris No. 88
Dated August 12, 2012
of Notary Rahmad Nauli Siregar, SH.*

Peningkatan Modal Disetor Tahun 2014
berasal dari :

- Kapitalisasi Sebagian Cadangan
sampai dengan Tahun Buku 2013

1,188,040,000,000

*Inchease in Paid up Capital in 2014
came from :
Capitalization of Unappropriated
Retained Earnings up to Year 2013*

Total Modal Ditempatkan dan Disetor

1,700,000,000,000

Total Issued and Paid up Capital

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 17 tanggal 13 September 2019 dari Notaris Risna Rahmi Arifa, SH., Notaris di Medan, para pemegang Saham telah menyetujui untuk konversi jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri

Based on the Company's Notarial Deed of Shareholder Resolution No. 17 dated September 13, 2019 from Notary Risna Rahmi Arifa, SH., Notary in Medan the Shareholders have agreed to convert type of shares from no series type to consist of A Golden Stock series shares and

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dari saham seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan No. AHU- 0079552.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 dengan susunan permodalan menjadi sebagai berikut:

B Series shares whose changes have been reported to and accepted by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Acknowledgement letter No. AHU- 0079552.AH.01.02. Year 2019 dated October 7, 2019 the composition of capital stock are as follows:

2020			
Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal/ Par Value	Jumlah Modal/ Total Share Capital	
Seri A Dwiwarna	1	1,000,000	1,000,000
Seri B	1,699,999	1,000,000	1,699,999,000,000
Jumlah	1,700,000	1,700,000,000,000	Total

Tidak ada perbedaan dari saham seri A Dwiwarna dan, B dalam hak suara dan wewenang, hak dividen dan hak likuiditas.

There were no differences between A series, and B series, series shares in power and authority, dividend rights and rights of liquidity.

26. Tambahan Modal Disetor Lainnya

26. Other Additional Paid In Capital

Tambahan modal disetor lainnya merupakan ekuitas yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) (Catatan 28), yang melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I tanggal 22 Februari 2019, pasal 1 (satu) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Rincian dari nilai tambahan modal disetor lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Other additional paid-in capital is equity originating from the Government Assistance of Unspecified Status (BPYBDS) (Note 28), which through Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 concerning Addition of State Capital of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of the Company (Persero) PT Port of Indonesia I dated February 22, 2019, article 1 (one) states that the State of the Republic of Indonesia made additional capital investments into the share capital of the Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia I whose status as a Company Company (Persero) was determined based on Government Regulation No. 56 the Year 1991 concerning the Transfer of the Form of a Public Corporation (Perum) Port I to a Limited Liability Company (Persero). Details of other additional paid-in capital values as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:

2020 dan/and 2019		
Rp		
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414,128,745,519	Dumai Port Facility
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19,203,989,000	Gunung Sitoli Port Facility
Dua Unit Kapal Tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53,560,436,197	Two Units of Tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Satu Unit Forklift Merk Patria Kapasitas 3 Ton	196,900,000	One Unit of Forklift Patria with 3 Tons Capacity
Satu Unit Forklift Merk Patria Kapasitas 5 Ton	365,200,000	One Unit of Forklift Patria with 5 Tons Capacity
Tiga Unit Forklift Kapasitas 3 Ton	590,700,000	Three Units of Forklift with 3 Tons Capacity
Tiga Unit Forklift Kapasitas 5 Ton	1,095,600,000	Three Units of Forklift with 5 Tons Capacity
Satu Unit Forklift 3 Ton dan Pendukung Lainnya (8,3 x 43,5 m) di Sibolga	37,991,646,536	Construction of the South Side Dock and Other Supporting Facilities (8.3 x 43.5 m) in Sibolga
Jumlah Tambahan Modal Disetor	527,133,217,252	Total Government Grants with Unspecified Used

Tambahan modal disetor akan dipindahkan ke modal saham setelah disahkan melalui RUPS.

Additional paid-in capital will be transferred to share capital after being approved by the GMS.

27. Dividen

27. Dividend

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 tanggal 6 Juli 2020, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2019 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 16,25% atau Rp60.050.953.594.
- b. Cadangan sebesar 83,75% atau Rp309.460.760.856.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 3 dated 3 June 2020, the use of the Company's net profit for the fiscal year 2019 is determined as follows:

- a. Dividend of 16.25% or Rp60,050,953,594.*
- b. Reserves of 83,75% or Rp309,460,760,856.*

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 12 tanggal 29 April 2019, penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2018 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 35% atau Rp319.135.000.000.
- b. Cadangan sebesar 65% atau Rp592.679.406.602.

Based on the results of the General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 12 dated April 29, 2019, the use of the Company's net profit for the fiscal year 2018 is determined as follows:

- a. Dividend of 35% or Rp319,135,000,000*
- b. Reserves of 65% or Rp592,679,406,602*

28. Kepentingan Nonpengendali

28. Non-Controlling Interest

a. Kepentingan Nonpengendali atas Ekuitas Entitas Anak
Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

a. Non-Controlling Interest in Equity of Subsidiaries
The interest of the minority shareholders in subsidiaries are as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
PT Prima Terminal Petikemas			<i>PT Prima Terminal Petikemas</i>
Nilai Tercatat - Awal	354,307,330,188	281,345,851,695	<i>Carrying Amount - Beginning</i>
Tambahan Setoran Modal	--	79,200,000,000	<i>Additional Share</i>
Bagian Laba Bersih Periode Berjalan	490,324,708	(6,238,521,507)	<i>Net Income for Current Period</i>
Sub Jumlah	<u>354,797,654,896</u>	<u>354,307,330,188</u>	<i>Sub Total</i>
PT Prima Multi Terminal			<i>PT Prima Multi Terminal</i>
Nilai Tercatat - Awal	583,616,898,224	656,456,869,777	<i>Carrying Amount - Beginning</i>
Bagian Laba Bersih Periode Berjalan	(126,719,228,867)	(72,831,127,697)	<i>Net Income for Current Period</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	(4,336,468)	(8,843,856)	<i>Other Comprehensive Income</i>
Sub Jumlah	<u>456,893,332,889</u>	<u>583,616,898,224</u>	<i>Sub Total</i>
Sub Jumlah (Dipindahkan)	<u>811,690,987,785</u>	<u>937,924,228,412</u>	<i>Sub Total (Transferred)</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Sub Jumlah (Pindahan)	811,690,987,785	937,924,228,412	Sub Total (To Transfer)
PT Prima Indonesia Logistik			PT Prima Indonesia Logistik
Nilai Tercatat - Awal	815,028,329	816,763,592	Carrying Amount - Beginning
Bagian Laba Bersih			Net Income for
Periode Berjalan	15,822,461	3,341,464	Current Period
			Appropriation of
Pencadangan Saldo Laba	--	(5,076,727)	Retained Earnings
Dampak Penerapan			Impact on Implementation
PSAK 71 dan 73	(8,023,422)	--	PSAK 71 and 73
Penghasilan			Other Comprehensive
Komprehensif Lain	(247,071)	--	Income
Sub Jumlah	<u>822,580,297</u>	<u>815,028,329</u>	Sub Total
PT Prima Husada Cipta Medan			PT Prima Husada Cipta Medan
Nilai Tercatat - Awal	49,101,758	69,708,877	Carrying Amount - Beginning
Bagian Laba Bersih			Net Income for
Periode Berjalan	35,102,759	(20,607,119)	Current Period
Dampak Penerapan			Impact on Implementation
PSAK 71 dan 73	3,528	--	PSAK 71 and 73
Sub Jumlah	<u>84,208,045</u>	<u>49,101,758</u>	Sub Total
Jumlah	<u>812,597,776,127</u>	<u>938,788,358,499</u>	Total

b. Kepentingan Non Pengendali atas Laba Bersih Entitas Anak

b. Non-Controlling Interest in Net Income of Subsidiaries

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
PT Prima Terminal Petikemas	490,324,708	(6,238,521,507)	PT Prima Terminal Petikemas
PT Prima Multi Terminal	(126,719,228,867)	(72,831,127,697)	PT Prima Multi Terminal
PT Prima Indonesia Logistik	15,822,461	3,341,464	PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Husada Cipta Medan	35,102,759	(20,607,119)	PT Prima Husada Cipta Medan
Jumlah	<u>(126,177,978,939)</u>	<u>(79,086,914,859)</u>	Total

c. Kepentingan Nonpengendali atas Laba Komprehensif Entitas Anak

c. Non-Controlling Interest in the Total Comprehensive Income of Subsidiaries

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
PT Prima Terminal Petikemas	490,324,708	(6,238,521,507)	PT Prima Terminal Petikemas
PT Prima Multi Terminal	(126,723,565,335)	(72,839,971,553)	PT Prima Multi Terminal
PT Prima Indonesia Logistik	15,575,390	3,341,464	PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Husada Cipta Medan	35,102,759	(20,607,119)	PT Prima Husada Cipta Medan
Jumlah	<u>(126,182,562,478)</u>	<u>(79,095,758,715)</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pendapatan Operasi

29. Operating Revenues

Akun pendapatan usaha merupakan pendapatan atas operasi perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The operating income account is the company's operating income for the years ended December 31, 2020, and 2019 is as follows:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha Bruto:			Gross Revenues:
Pendapatan Pelayanan			
Peti Kemas	1,478,312,411,581	1,449,963,747,487	Container Service Revenues
Pendapatan Pelayanan			Revenue from Non-Container
Barang Non Peti Kemas	412,241,451,655	436,106,340,739	Goods Services
Pendapatan Pelayanan Kapal	359,724,133,959	382,818,675,781	Vessels Service Revenue
Pendapatan Pelabuhan			
Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS	407,710,458,818	313,737,775,879	Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Port Revenues
Pendapatan Sewa Lahan dan Bangunan/Bagian			Land and Building Rental Income/part of Building
Bangunan	131,935,578,307	146,632,973,896	
Pendapatan Pelayanan			Logistic Service Revenues/ Goods Consolidation and
Logistik/Konsolidasi dan Distribusi Barang	60,192,936,186	67,072,111,726	Distribution
Pendapatan Sewa Aset, Peralatan dan Ruang (Non PI)	49,603,231,509	44,081,045,168	Asset Rental Income, Equipment and Room
Pendapatan Jasa Listrik/ Power Plant dan Air	52,956,888,045	44,050,336,559	Electricity/power Plant and Water Service Revenues
Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik dan Rumah Sakit)	30,513,001,028	58,928,918,995	Revenue from Health Care Service (Polyclinic and Hospital
Pendapatan Pelayaran	4,829,957,174	3,995,656,769	Shipping Income
Pendapatan Galangan (Dock) Kapal	938,181,000	632,563,500	Shipyards Revenue (Dock)
Lain-lain	94,888,715,771	156,212,862,612	Others
Sub Jumlah	<u>3,083,846,945,033</u>	<u>3,104,233,009,111</u>	Sub Total
Reduksi Pendapatan :			Revenues Reduction:
Pendapatan Pelayanan Kapal	42,231,190	168,979,719	Vessels Service Revenue
Pendapatan Pelabuhan			
Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS	31,340,784	17,754,935	Tersus/Pelus/Dersus/ Terminal UKS Port Revenues
Pendapatan Usaha Rupa-rupa	6,959,090	--	Other Service
Sub Jumlah	<u>80,531,064</u>	<u>186,734,654</u>	Sub Total
Jumlah	<u>3,083,766,413,969</u>	<u>3,104,046,274,457</u>	Total

Sebesar 0,62% dan 1,38% dari pendapatan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan dengan pihak yang berelasi (Catatan 35).

Approximately 0.62% and 1.38% of revenue in December 31, 2020 and 2019 respectively carried out with related parties (Note 35).

30. Pendapatan dan Beban Konstruksi

30. Construction Revenues And Expenses

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Grup dalam pembangunan terminal Multipurpose di Kuala Tanjung dan terminal petikemas di Belawan Fase 2. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for constructing the multipurpose terminal at Kuala Tanjung and container terminal at Belawan Phase 2. Construction revenue is measured using cost method, which is all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Pendapatan Konstruksi	758,143,856,767	2,535,336,461,063	Construction Revenue
Beban Konstruksi	(758,143,856,767)	(2,535,336,461,063)	Construction Expenses

31. Beban Operasi

31. Operating Expenses

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 10, 11, 12 dan 13)	567,779,211,292	432,159,958,534	Depreciation and Amortization (Notes 10, 11, 12 and 13)
Kerja Sama Mitra Usaha	564,506,162,286	627,460,273,593	Partnership
Pegawai	525,594,846,197	614,100,905,979	Employee
Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai	183,276,377,270	184,189,062,300	Fuels and Supplies
Pemeliharaan Umum	153,157,055,430	144,002,885,259	Maintenance General
Asuransi	67,441,010,092	49,077,162,764	Insurance
Administrasi Kantor	61,947,958,224	128,934,568,805	Office Administration
Penyisihan Penurunan Nilai	40,289,093,446	12,606,020,782	Allowance for Impairment
Beban pajak & retribusi	42,233,588,582	66,905,037,495	Tax and retribution
Lain-lain (dibawah Rp3 miliar)	83,741,412,912	88,998,670,585	Others (under Rp3 billion)
Jumlah	2,407,778,400,729	2,505,837,092,694	Total

32. Pendapatan Non - Usaha - Bersih

32. Non - Operating Income - Net

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	35,173,972,508	(6,781,750,021)	Foreign Exchange Gain (Loss) - Net
Kelebihan Pembayaran PBB	44,093,769,439	--	Overpayment of PBB
Pendapatan Denda/ Penalti	5,898,800,367	6,395,342,866	Penalty/ Compensation Income
Penghapusan Utang	--	9,939,634,081	Write-off of Payables
Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	(31,713,558,026)	(29,829,845,672)	Expense on Non-Tax State Revenue (PNBP)
Beban Konsesi	(47,691,422,076)	(52,830,515,568)	Concession Expenses
Beban Biaya Materai	(1,298,407,675)	(1,439,719,644)	Stamp Duty Costs
Lain-lain - Bersih	6,159,372,816	44,562,810,505	Others - Net
Jumlah	10,622,527,353	(29,984,043,453)	Total

33. Pendapatan dan Beban Keuangan

33. Finance Income and Cost

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
<u>Pendapatan Keuangan</u>			<u>Finance Income</u>
Bunga Deposito Berjangka	52,775,941,797	81,692,985,210	Interest of Time Deposits
Bunga Bank	2,029,039,489	1,831,496,750	Interest of Cash in Bank
Jumlah	<u>54,804,981,286</u>	<u>83,524,481,960</u>	Total
<u>Beban Keuangan</u>			<u>Finance Cost</u>
Beban Bunga dari Pinjaman Bank	433,124,711,984	271,938,788,137	Interest Expenses from Bank Loans
Beban Bunga dari Pinjaman Utang Obligasi	87,502,885,724	89,604,277,544	Interest Expenses from Bonds Payable
Beban Bunga dari Liabilitas Sewa	4,900,319,871	--	Interest Expenses from Lease Liabilities
Beban Administrasi Bank	1,467,358,870	230,436,531	Bank administration charges
Jumlah	<u>526,995,276,449</u>	<u>361,773,502,212</u>	Total

34. Laba Per Saham Dasar

34. Basic Earnings Per Share

Labanya per saham dasar merupakan laba yang diperoleh pemegang saham untuk setiap lembar modal saham yang dimiliki. Perhitungan laba per saham dasar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Basic earnings per share are profits earned by shareholders for each share capital owned. The calculation of basic earnings per share as of December 31, 2020, and 2019 is as follows:

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp	
Labanya untuk Perhitungan laba per Saham Dasar (Rupiah)	<u>309,298,348,909</u>	<u>285,263,383,703</u>	Profit for Calculation of Basic Earnings per Share (Rupiah)
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar	<u>1,700,000</u>	<u>1,700,000</u>	Total Weighted Average Number of Ordinary Shares for Computation of Basic Earnings per Share
Labanya per Saham dasar (Rupiah)	<u>181,940</u>	<u>167,802</u>	Basic Earnings per Share (Rupiah)

35. Informasi Mengenai Pihak-Pihak Berelasi

35. Related Parties Information

a. Sifat Hubungan dan Transaksi

a. Nature of Relationship and Transactions

<u>Sifat Hubungan/ Nature of Relationship</u>	<u>Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties</u>	<u>Transaksi/ Transactions</u>
- Pemegang Saham/Shareholder	- Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dan Terminal Petikemas Belawan, serta sewa lahan Fase 1 Belawan/ Concession rights on Multipurpose Terminal Kuala Tanjung and Container Terminal Belawan, and rent of land Phase 1 Belawan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
- Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Relate the Government of the Republic of Indonesia</i>	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, fasilitas kredit, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, loans facility, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, trade receivable, loans facility, rent of land revenue, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ <i>Sharia Business Unit</i>	Penempatan deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<i>Penempatan giro, deposito berjangka, piutang usaha, fasilitas kredit, pendapatan sewa lahan, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ Placement of current accounts, time deposits, trade receivable, loans facility, rent of land revenue, finance charges and interest income</i>
	- PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan giro, deposito berjangka, biaya keuangan dan pendapatan bunga/ <i>Placement of current accounts, time deposits, finance charges and interest income</i>
	- PT Pertamina (Persero)	Piutang usaha, utang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, trade payables, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Pertamina Trans Kontinental	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Perta Arun Gas	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Piutang usaha, penjualan usaha rupa-rupa/ <i>Trade receivables, miscellaneous income</i>
	- PT Sarana Agro Nusantara	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Semen Padang	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Arun NGL	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Kereta Api Logistik	Piutang usaha, penjualan jasa kepelabuhan, sewa lahan dan suplay bahan bakar/ <i>Trade receivable, sales of harbor service, rental of land and fuel supply</i>
	- PT Brantas Abipraya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
	- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan dan penjualan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities and sales</i>
	- PT Wijaya Karya (Persero)Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Utama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset takberwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port facilities</i>
	- PT Superintending Company of Indonesia (Persero) (Sucofindo)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Vendor dalam pekerjaan piranti lunak dan penjualan/ <i>Vendor of software work and sales</i>
	- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- PT Surveyor Indonesia (Persero)	Jasa konsultan dan penjualan/ <i>Consultant service and sales</i>
	- Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS	Jasa konsultan/ <i>Consultant service</i>
	- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	<i>Sharing Biaya/ Expense sharing</i>
	- PT Danareksa Sekuritas	Jasa konsultan/ <i>Consultant service</i>
	- PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT ASDP Indonesia Ferry	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Pos Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Transaksi/ Transactions
	- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Pegadaian (Persero)	Penjualan jasa kepelabuhan dan sewa lahan/ Sales of harbor service and rental of land
	- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pembelian energi listrik, penjualan sewa lahan dan kerjasama operasi/ Electrical energy supply, land rental sales and joint operations
	- PT Perusahaan Daerah Air Minum	Pembelian air/ Purchase of water
	- TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan kepelabuhanan/ Sales of services Ports
	- Koperasi Karyawan Pelindo I	Jasa Keamanan/ Security Services
- Entitas Asosiasi/ Associates	- PT Terminal Petikemas Indonesia	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Tangki Indonesia	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Pengembangan Kawasan	Investasi saham/ Investment in share
	- PT Prima Multi Peralatan	Investasi saham/ Investment in share
	- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Penempatan Dana Imbalan kerja Karyawan/ Placement of employee Benefit Funds

b. Transaksi-Transaksi Pihak Berelasi

Rincian penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%)	Jumlah/ Total	%)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	541,778,273,982	3.39	474,197,410,844	2.97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	453,290,637,176	2.84	562,529,273,638	3.52
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	402,046,732,889	2.52	574,957,468,665	3.60
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	98,584,000,000	0.62	44,584,000,000	0.28
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah/ Sharia Business Unit	39,500,000,000	0.25	57,500,000,000	0.36
PT Bank Syariah Mandiri	16,634,472,977	0.10	9,809,419,931	0.06
Jumlah/ Total	1,551,834,117,024	9.72	1,723,577,573,078	10.78

*) Persentase terhadap Total Aset/ Percentage of Total Assets

b. Transactions with Related Parties

The details of sales to and purchases from related parties are as follows:

a. Cash and Cash Equivalents

b. Piutang Usaha

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%)	Jumlah/ Total	%)
PT Pertamina Trans Kontinental	16,696,828,746	0.10	7,743,660,149	0.05
PT Pupuk Sriwidjaja	6,859,847,638	0.04	--	0.00
PT Pertamina Patra Niaga	3,825,774,000	0.02	--	0.00
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	175,762,372	0.00	1,889,080,128	0.01
PT Pertamina (Persero)	105,678,919	0.00	3,800,565,403	0.02
PT Perta Arun Gas	27,287,954	0.00	3,886,991,785	0.02
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	2,499,824,801	0.02	791,096,584	0.00
Sub Jumlah/ Sub Total	30,191,004,430	0.19	18,111,394,049	0.11
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(18,314,691,864)		--	
Jumlah/ Total	11,876,312,566	0.07	18,111,394,049	0.11

*) Persentase terhadap Total Aset/ Percentage of Total Assets

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

c. Utang Usaha

	c. Account Payables			
	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%)	Jumlah/ Total	%)
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	17,947,727,882	0.18	13,703,333,132	0.14
PT Brantas Abipraya (Persero)	15,399,700,156	0.16	53,001,460,718	0.54
PT Pertamina (Persero)	13,993,842,389	0.14	17,021,822,914	0.17
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	12,420,000,000	0.13		0.00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7,990,599,059	0.08	30,077,316,172	0.31
PT Sucofindo (Persero)	6,725,266,362	0.07	10,703,910,150	0.11
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6,464,688,807	0.07	8,953,377,680	0.09
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	5,702,630,526	0.06	3,988,466,136	0.04
PT Hutama Karya (Persero)	5,227,722,259	0.05	15,220,573,337	0.16
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	4,477,500,000	0.05	1,017,500,000	0.01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2,673,163,821	0.03	12,092,446,289	0.12
PT Surveyor Indonesia (Persero)	2,022,002,092	0.02	3,106,595,782	0.03
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1,473,623,069	0.02		0.00
BPPU ITS	434,301,465	0.00	2,396,926,421	0.02
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1,148,833	0.00	25,968,997,511	0.27
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	4,281,846,181	0.04	870,120,015	0.01
Jumlah/ Total	107,235,762,901	1.10	198,122,846,257	2.03

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

d. Uang titipan

	d. Fund retained			
	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%)	Jumlah/ Total	%)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30,375,324	0.00	25,592,184	0.00
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara	8,650,516	0.00	8,650,516	0.00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,974,853	0.00	5,974,853	0.00
TNI Angkatan Laut	5,240,859	0.00	436,792	0.00
PT Asuransi Jiwa Taspen	--	0.00	47,187,172	0.00
Distrik Navigasi	--	0.00	18,562,500	0.00
Bea Cukai Belawan	--	0.00	8,771,074	0.00
Lainnya Di bawah Rp5 Juta/ Other - Under Rp5 Million	8,187,480	0.00	42,464,848	0.00
Jumlah/ Total	58,429,032	0.00	157,639,939	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

e. Uang Panjar

	e. Advance from customer			
	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%)	Jumlah/ Total	%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73,974,777	0.00	73,974,777	0.00
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	50,915,876	0.00	50,915,876	0.00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35,699,590	0.00	35,699,590	0.00
Balai Besar Karantina Belawan	17,795,068	0.00	17,795,068	0.00
PT Pertamina (Persero)	11,202,720	0.00	11,202,720	0.00
Lainnya Di bawah Rp10 Juta/ Other - Under Rp10 Million	40,882,658	0.00	63,244,543	0.00
Jumlah/ Total	230,470,689	0.00	252,832,574	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

f. Utang Lain-lain

f. Other Payables

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	47,100,000,000	0.49	--	0.00
PT Waskita Karya (Persero)	37,000,000,000	0.38	--	0.00
Jumlah/ Total	84,100,000,000	0.87	--	0.00

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

Pada tanggal 14 Agustus 2020 dan 14 September 2020, PMT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp19.600.000.000 dan Rp27.500.000.000 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 11,7% per tahun. Pada tanggal 18 Agustus 2020 dan 18 September 2020, PMT menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, masing-masing sebesar Rp15.680.000.000 dan Rp21.320.000.000 dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga 11,7% per tahun.

On August 14, 2020 and September 14, 2020, PMT entered into loan facility agreement that valid until December 31, 2020 amounted to Rp19,600,000,000 and Rp27,500,000,000 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, respectively. The facility bears interest rate at 11,7% per annum. On August 18, 2020 and September 18, 2020, PMT entered into loan facility agreement that valid until December 31, 2020 amounted to Rp15,680,000,000 and Rp21,320,000,000 with PT Waskita Karya (Persero) Tbk. The facility bears interest rate at 11,7% per annum.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, perjanjian pinjaman atas perubahan jangka waktu tersebut masih dalam proses.

Until the date of completion of the financial statements, the loan agreement for the change in term is still in process.

g. Utang Bank

g. Bank Loans

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,413,339,541,898	24.87	1,669,509,868,376	17.08
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,316,900,776,704	13.57	811,597,363,876	8.30
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,316,900,776,704	13.57	811,597,363,876	8.30
PT Sarana Multi Infrastruktur	417,173,317,946	4.30	416,657,417,711	4.26
Jumlah/ Total	5,464,314,413,252	56.30	3,709,362,013,838	37.95

*) Persentase terhadap Total Kewajiban/ Percentage of Total Liabilities

h. Pendapatan Operasi

h. Operating Revenue

	2020		2019	
	Jumlah/ Total	%*)	Jumlah/ Total	%*)
PT Pertamina (Persero)	17,373,151,051	0.56	34,389,744,109	1.11
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	899,096,461	0.03	6,577,588,334	0.21
Lainnya Di bawah Rp1 Miliar/ Other - Under Rp1 Billion	854,395,408	0.03	1,802,502,861	0.06
Jumlah/ Total	19,126,642,920	0.62	42,769,835,304	1.38

*) Persentase terhadap Total Pendapatan/ Percentage to Total Revenue

**36. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko
Keuangan**

**36. Financial Instrument and Financial Risks
Management**

a. Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Harga
6. Risiko Investasi

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Grup terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul.

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Grup difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Kebijakan manajemen Grup mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk meringankan risiko ini, Grup menetapkan kebijakan untuk transaksi Penjualan jasa kepada pelanggan dengan mengharuskan pemakai jasa pelanggan untuk memberikan uang muka sebelum bertransaksi, sehingga Grup lebih mudah memantau pendapatannya. Selain itu saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan

a. Risk Management Policy

In normal transaction, the Group is generally exposed to financial risks as follows:

1. Credit Risk
2. Foreign Exchange Rate Risk
3. Interest Rate Risk
4. Liquidity Risk
5. Price Risk
6. Investment Risk

This Note describes the exposure of the Group to each of the above risks and quantitative disclosures including risk exposures and summarizes the policies and processes for measuring and managing the risks that arised.

The Group's directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program which focuses on uncertainty of financial market and minimize potential losses that will have an impact to the Group's financial performance.

The Group's policy on financial risk management are as follows:

1. Credit Risk
Credit risk is the risk that the Group will incur loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. The Group's financial instruments that have potential credit risk are cash and cash equivalent, trade accounts receivable, other accounts receivable and investments. Maximum total credit risks exposure are equal to the carrying amount of the respective accounts.

To minimize this risk, the Group established a policy to deal with the sale of services to customers by requiring service users / customers to pay deposit's before entering transaction and hence allow the Group to monitor their income easier. In addition, receivable balances are monitored on a continuous basis to reduce the possibility of uncollectible receivables. When a customer

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

piutang yang tidak tertagih. Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menghentikan pelayanan jasa kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar.

Tergantung pada penilaian Grup, penyisihan khusus dibuat jika terdapat bukti objektif tidak tertagih.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

is unable to make payments within the specified time, the Group will contact the customer to follow up on receivables that are past due. If the customer does not pay the receivables within a specified time period, the Group will discontinue services to customers as a result of the default.

Depending on the assessment of the Group, specific allowance is made when there is an objective evidence that it will not be collected.

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2020	Belum Jatuh Tempo/ Neither Past Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	December 31, 2020
<u>Pinjaman yang Diberikan dan Piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	1,565,080,858,350	--	--	1,565,080,858,350	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	46,469,621,681	112,215,187,741	(109,180,062,112)	49,504,747,310	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	17,728,298,039	--	(4,979,298,330)	12,748,999,709	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,682,469,344	31,375,405,126	(31,375,405,126)	2,682,469,344	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,631,961,247,414	143,590,592,867	(145,534,765,568)	1,630,017,074,713	Total
31 Desember 2019	Belum Jatuh Tempo/ Neither Past Due	Telah Jatuh Tempo/ Past Due	Penurunan Nilai/ Impairment	Jumlah/ Total	December 31, 2019
<u>Pinjaman yang Diberikan dan Piutang:</u>					<u>Loans and Receivables:</u>
Kas dan Setara Kas	1,767,548,879,083	--	--	1,767,548,879,083	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	74,266,888,852	113,975,505,164	(67,552,164,876)	120,690,229,140	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	143,957,672,805	--	(3,709,916,934)	140,247,755,871	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,171,080,675	23,692,863,940	(23,692,863,940)	2,171,080,675	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,987,944,521,415	137,668,369,104	(94,954,945,750)	2,030,657,944,769	Total

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko nilai tukar mata uang terutama terdiri dari kas dan setara kas, investasi dan pinjaman.

2. Foreign Exchange Rate Risk
Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's financial instruments that potentially containing foreign exchange rate risk are cash and cash equivalent, investments and loans.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Grup.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Grup terutama disebabkan oleh kas dan setara kas, investasi sementara, piutang usaha, pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan.

Pinjaman dikompensasi dengan kenaikan nilai Kas dan Setara Kas yang sebagian besar didenominasikan dalam mata uang asing yang sama. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Grup. Beberapa liabilitas dan belanja modal Grup diperkirakan akan terus didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Dalam mengelola risiko mata uang, Grup tidak melakukan *hedging*, karena transaksi dalam valuta asing tersebut dilakukan dalam jangka pendek. Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko signifikan atas fluktuasi mata uang asing dalam transaksi tersebut.

Dalam mengatasi risiko fluktuasi mata uang asing, pihak Manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh sebagian modal kerja dalam mata uang asing.
- b. Melakukan pembelian valas secara spot atau terhadap yang kemudian ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka USD.
- c. Memperoleh pendapatan dalam mata uang asing yang diharapkan dapat mengkompensasi liabilitas dalam mata uang asing.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terutama berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat:

The Group does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge for the Group foreign exchange exposure.

Exposure of currency exchange risk of the Group is mainly from cash and cash equivalents, temporary deposits, trade accounts receivables, bank loans and security issued.

Bank loans is offset by increasing of Cash and Cash Equivalents denominated in the same foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flow of the Group. Several liabilities and capital expenditures are expected to continue denominated in United States Dollar.

The Group manages the foreign exchange rate risk without hedging, because transactions have short term period. The Group believes that there are no significant risk of foreign exchange fluctuations on its transactions.

In addressing the risk of fluctuations in foreign currency the Management considers the following:

- a. *Obtains part of working capital in foreign currency.*
- b. *Purchases foreign currency at spot or gradually to be placed in the form of time deposito in USD.*
- c. *Obtains revenues in foreign currency which are expected to compensate liabilities on foreign currency.*

The following table presents the Group financial assets and liabilities denominated in foreign currency, mainly in United States Dollar:

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		2020			
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Rp	
Aset					
Kas dan Setara Kas	USD		2,940,270	41,472,512,092	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	USD		445,525	6,284,135,033	Account Receivables
Jumlah			3,385,796	47,756,647,125	Total
Liabilitas					
Utang Usaha	USD		4,822,097	68,015,683,425	Account Payables
Uang Panjar	USD		14,181	200,024,598	Advance from Customers
Uang Titipan	USD		48	678,806	Fund Retained
Utang Bank	USD		56,294,345	794,032,296,502	Bank Loans
Jumlah			61,130,671	862,248,683,331	Total
		2019			
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Rp	
Aset					
Kas dan Setara Kas	USD		938,434	13,195,482,922	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	USD		451,947	6,354,486,791	Account Receivables
Jumlah			1,390,381	19,549,969,713	Total
Liabilitas					
Utang Usaha	USD		30,352,158	425,264,084,733	Account Payables
Uang Panjar	USD		25,720	360,368,254	Advance from Customers
Uang Titipan	USD		13,276	186,003,745	Fund Retained
Utang Bank	USD		20,762,478	290,903,073,892	Bank Loans
Jumlah			51,153,631	716,713,530,624	Total

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Grup:

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate against United States Dollar at year end that could increase (decrease) the equity or profit or loss amount are presented in table. The analysis was conducted based on the variance of foreign currency exchange rates that were considered to happen on the reporting date with all other variables are held constant.

The following table shows the sensitivity of the United States Dollar exchange rate changes on net income and the Group equity:

		Sensitivitas/Sensitivity			
		Perubahan Nilai Tukar Change in Exchange Rates	Basis Poin/ Basis Point	Ekuitas/ Equity Rp	Laba (Rugi)/ Profit (Loss) Rp
31 Desember 2020/ December 31, 2020	Meningkat/Appreciates		100	(5,774,491,572)	(5,774,491,572)
	Terdepresiasi/Depreciates		100	5,774,491,572	5,774,491,572
31 Desember 2019/ December 31, 2019	Meningkat/Appreciates		100	(4,975,830,140)	(4,975,830,140)
	Terdepresiasi/Depreciates		100	4,975,830,140	4,975,830,140

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak *negative* terhadap Grup.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisa pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Aset Keuangan	1,580,512,327,403	1,909,967,715,629	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	8,227,254,946,814	8,966,751,372,382	<i>Financial Liabilities</i>
Jumlah Aset (Liabilitas)			Total Assets (Liabilities)
- Bersih	9,807,767,274,217	10,876,719,088,011	- Net

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Tingkat Bunga Tetap			<i>Fixed Rate</i>
Aset Keuangan	1,580,512,327,403	1,909,967,715,629	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	8,227,254,946,814	8,966,751,372,382	<i>Financial Liabilities</i>
Jumlah	9,807,767,274,217	10,876,719,088,011	Total
Tingkat Bunga Mengambang			<i>Variable Rate</i>
Aset Keuangan	1,612,122,573,951	1,948,167,069,942	<i>Financial Assets</i>
Liabilitas Keuangan	8,391,800,045,750	9,146,086,399,830	<i>Financial Liabilities</i>
Jumlah Aset (Liabilitas)			Total Assets (Liabilities)
- Bersih	10,003,922,619,701	11,094,253,469,772	- Net

Analisis sensitivitas terhadap risiko suku bunga:

Kenaikan suku bunga 2% akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp214.685.388.239 dan Rp226.005.330.765. Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

3. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.

The Group monitors the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Group.

To measure market risk on interest rate movement, the Group analyzed the interest rate movement margin and maturity profile of asset and liabilities based on interest rate change schedule.

The following table analyzes the financial liabilities by type of interest:

Sensitivity analysis on interest rate risk:

A 2% increase in interest rates would have decreased equity and profit or loss for the periods ended December 31, 2020 and 2019 by Rp214,685,388,239 and Rp226,005,330,765 respectively. A 2% decrease in interest rates for the periods ended December 31, 2020 and 2019 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remained constant.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengatasi dampak evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

31 Desember 2020	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2020
	bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	tahun/ More than 1 years		
Utang Usaha	798,193,882,502	--	--	798,193,882,502	Trade Accounts Payable
Uang Panjar	5,090,823,228	--	--	5,090,823,228	Advance from Customer
Uang Titipan	25,616,668,977	--	--	25,616,668,977	Fund Retained
Beban Akrua	212,182,969,344	--	--	212,182,969,344	Accrued Expenses
Utang Bank	--	410,495,386,081	6,149,254,631,216	6,559,750,017,297	Bank Loans
Utang Obligasi	--	499,768,052,410	449,208,310,134	948,976,362,544	Bonds Payables
Liabilitas Sewa	--	3,092,006,632	174,120,268,700	177,212,275,332	Lease Liabilities
Jumlah	1,041,084,344,051	913,355,445,123	6,772,583,210,050	8,727,022,999,224	Total

4. Liquidity Risk

Liquidity risk is the arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the managing liquidity risk, the Management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Company and Subsidiaries operations and to mitigate the affects of fluctuation in cash flows. The Management also regularly evaluates the projected and markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Details of the maturities of financial liabilities are as follows:

31 Desember 2019	Kurang dari 3	3 bulan sampai	Lebih dari 1	Total	December 31, 2019
	bulan/Less than 3 months	1 tahun/ 3 months up to 1 year	tahun/ More than 1 years		
Utang Usaha	1,890,697,030,316	--	--	1,890,697,030,316	Trade Accounts Payable
Uang Panjar	6,882,913,253	--	--	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	28,794,888,017	--	--	28,794,888,017	Fund Retained
Beban Akrua	126,585,980,305	--	--	126,585,980,305	Accrued Expenses
Utang Bank	--	214,549,156,365	5,751,017,927,371	5,965,567,083,736	Bank Loans
Utang Obligasi	--	--	948,223,476,755	948,223,476,755	Bonds Payables
Jumlah	2,052,960,811,891	214,549,156,365	6,699,241,404,126	8,966,751,372,382	Total

5. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau penerbitannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

5. Price Risk

Price risk is a risk of fluctuations in the value of financial instruments as a result of changes in market price, whether those changes are caused by factors specific to the individual instrument or its issues or factors affecting all instruments traded in the market.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup terkena dampak risiko harga yang terutama diakibatkan oleh pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan peralatan yang merupakan komponen utama biaya produksi. Harga pengadaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permintaan pasokan, nilai tukar kondisi geografis dan nilai tukar. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko harga adalah antara lain dengan melakukan kerjasama usaha dan pembelian bersama antara Grup kepada pemasok agar mendapatkan harga yang menguntungkan.

6. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan pemodal.

Perusahaan melaksanakan penawaran umum obligasi Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 4 (empat) seri dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000.

Tingkat bunga sebesar 8,25%-9,25% per tahun dan dibayar setiap 3 bulanan, dimulai 21 September 2016 sampai 21 Juni 2026.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko investasi adalah antara lain dengan melakukan penempatan sisa utang obligasi yang belum digunakan pada rekening untuk pembayaran proyek Grup yang akan jatuh tempo.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Company and subsidiaries are affected by price risk that are primarily attributable to the procurement and maintenance of port facilities and equipment which are the major component of production costs. Procurement prices are influenced by several factors, such as rising demand and exchange rates. The impact of this price risk, results in the increasing production costs. The Company and subsidiaries are unable to transfer these price increases directly to its customers.

Company and subsidiaries set policies to minimize price risk, such as by conducting joint operations and joint purchase between the Company and subsidiaries to suppliers in order to obtain a favorable price.

6. Investment Risk

Level of investment risk is the potential loss arising from the acquisition of the expected investment returns are not achieved as planned. The level of risk that is included in the valuation of investment will affect the expected results financiers.

The Company has conduct Pelindo 1 Gerbang Nusantara Bond I 2016 is issued scripless and is guaranteed in full commitment consisting of 4 (four) tranches with the amount of Rp1,000,000,000,000.

An interest rate of 8.25%-9.25% per annum and payable every 3 months, starting September 21, 2016 until June 21, 2026.

The Group policy is to minimize investment risks are, among others, with the placement of the rest of the bonds that have not been used to account for the payment of the maturing project of the Group.

**b. Fair Value of Financial Instruments
Fair value estimation**

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Grup untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- a. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- b. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (Level 2); and
- c. Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- Other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the periods ended December 31, 2020 and 2019:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang, utang dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, receivables, payables and accruals expenses approximate their carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments.

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

Telah menjadi kebijakan Grup bahwa tidak akan ada perdagangan dalam instrumen keuangan yang akan dilakukan.

It is has been the subsidiaries' policy that trading in financial instruments shall be undertaken.

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:					Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	1,565,080,858,350	1,565,080,858,350	1,767,548,879,083	1,767,548,879,083	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha - Bersih	49,504,747,310	49,504,747,310	120,690,229,140	120,690,229,140	Account Receivables - Net
Piutang Lain-lain	12,748,999,709	12,748,999,709	140,247,755,871	140,247,755,871	Other Receivables
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,682,469,344	2,682,469,344	2,171,080,675	2,171,080,675	Other Non-Current Financial Assets
Jumlah	1,630,017,074,713	1,630,017,074,713	2,030,657,944,769	2,030,657,944,769	Total
Liabilitas Keuangan:					Financial Liabilities:
Utang Usaha	798,193,882,502	798,193,882,502	1,890,697,030,316	1,890,697,030,316	Account Payables
Uang Panjar	5,090,823,228	5,090,823,228	6,882,913,253	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	25,616,668,977	25,616,668,977	28,794,888,017	28,794,888,017	Fund Retained
Beban Akrual	212,182,969,344	212,182,969,344	126,585,980,305	126,585,980,305	Accrued Expenses
Utang Lain-lain	90,539,906,928	90,539,906,928	5,687,533,567	5,687,533,567	Other Payables
Liabilitas Sewa	177,212,275,332	177,212,275,332	--	--	Trade Accounts Payable
Utang Bank	6,559,750,017,297	6,559,750,017,297	5,965,567,083,736	5,965,567,083,736	Bank Loans
Utang Obligasi	449,208,310,134	449,208,310,134	948,223,476,755	948,223,476,755	Bonds Payables
Jumlah	8,317,794,853,742	8,317,794,853,742	6,913,790,560,491	6,913,790,560,491	Total

37. Pengelolaan Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

37. Capital Management

The Company's objective in managing capital is to protect the Company's ability to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders, and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Perusahaan memonitor modal berdasarkan rasio pinjaman bank terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total pinjaman bank dengan total modal. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company actively and routinely reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and return for shareholders, taking into account the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, considering future capital requirements.

The Company monitors capital based on the ratio of bank loans to capital. This ratio is calculated by dividing the total bank loans by total capital. Capital consists of all equity components that are present as amounts in the consolidated statement of financial position.

38. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

38. Agreements and Commitments

- a. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/41/18/P.I-04, tanggal 26 November 2004 dengan PT Metito Indonesia untuk Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2021.
 - b. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.VIII-373/BLW-US.13, tanggal 18 Juli 2012 dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa untuk Maintenance Instalasi Rak dan Pipa Serta Fasilitas Pendukung Terminal Minyak Kelapa Sawit di Dermaga 105 - 106 Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2023.
 - c. Cabang Pelabuhan Belawan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-521/BLW-US.15, tanggal 30 Agustus 2017 dengan PT Lemo Tatagraha Mas untuk Kerjasama Sewa Menyewa Alat Bongkar Muat 2 (dua) Unit Harbour Mobile Crane di Cabang Pelabuhan Belawan. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2022.
 - d. Belawan Internasional Container Terminal menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.45/1/6/BICT-18.TU, tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Graha Segara untuk Kerjasama Penanganan Pemeriksaan Petikemas Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) pada Lokasi TPFT PT Graha Segara. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 April 2023.
- a. *Belawan Harbor Branch have signed the cooperation agreement No. UM.58/41/18/P.I-04, on November 26, 2004, with PT Metito Indonesia for the Cooperation in Drinking Water Operations. This cooperation is valid from January 1, 2007 to December 31, 2021.*
 - b. *Belawan Harbor Branch have signed cooperation agreement No. B.VIII-373/BLW-US.13, on July 18, 2012, with PT Indoterminal Belawan Perkasa for Maintenance of Rack and Pipe Installation and Supporting Facilities for Palm Oil Terminal at Pier 105 - 106 Belawan Harbor. This cooperation is valid from January 1, 2012 to December 31, 2023.*
 - c. *Belawan Harbor Branch have signed cooperation agreement No. B.XV-521/BLW-US.15, on August 30, 2017 with PT Lemo Tatagraha Mas for the Leasing Cooperation of Leasing Unloading Equipment of 2 (two) Harbor Mobile Crane Units in Belawan Harbor Branch. This cooperation is valid from August 30, 2017 to August 29, 2022.*
 - d. *Belawan Internasional Container Terminal signs the cooperation agreement No. HK.45/1/6/BICT - 18.TU, dated May 14, 2018, with PT Graha Segara for the Handling cooperation of Quarantine Container Examination at the Quarantine Checkpoint (TPK) at PT Graha Segara TPFT Location. This collaboration is valid from April 26, 2018 to April 25, 2023.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- e. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. B-XV.28/Dum-US.15 tanggal 20 Februari 2016 dengan PT Sari Dumai Sejati untuk Operasi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Khusus (Tersus) di Lubuk Gaung Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 19 Februari 2022.
- f. Cabang Pelabuhan Dumai menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/I/I/DUM-18 tanggal 15 Januari 2018 dengan PT Kawasan Industri Dumai untuk kerjasama Pemanduan dan Penundaan di Terminal Khusus (Tersus) PT Kawasan Industri Dumai. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 14 Januari 2021. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, perjanjian tersebut masih dalam proses perpanjangan.
- g. Cabang Pelabuhan Batam menandatangani perjanjian kerjasama No. US. 12/1/4/BTM-18.TU tanggal 14 Mei 2018 dengan PT Maxsteer Dyrnusa Perdana untuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian *Ship to Ship Transit Anchorage* di Perairan Nipah. Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2016 sampai dengan 10 November 2021.
- h. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Pihak Kedua), tanggal 23 Januari 2015 No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 atau No. US.15/1/7/PI-15.TU tentang Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung, yang diperbaharui berdasarkan Addendum Nomor 1 tanggal 16 November 2016 yang mengubah judul Perjanjian Kerjasama dari sebelumnya "Pengusahaan Dermaga pada Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kuala Tanjung" menjadi "Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Kuala Tanjung", serta mengubah penyebutan istilah "Dermaga pada Terminal Curah Cair" menjadi "Terminal *Multipurpose*". Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) melakukan kegiatan pengusahaan dermaga pada

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e. Dumai Port Branch signed a cooperation agreement No. B-XV.28/Dum-US.15 dated February 20, 2016, with PT Sari Dumai Sejati for Port Service Operations at the Special Terminal (Tersus) in Lubuk Gaung Dumai. This cooperation is valid from February 20, 2017 until February 19, 2022.
- f. Dumai Port Branch signed cooperation agreement No. US.12/I/I/DUM-18 dated January 15, 2018, with PT Kawasan Industri Dumai for the piloting and tugging cooperation at the Special Terminal (Tersus) of PT Kawasan Industri Dumai. This cooperation is valid from January 15, 2018 until January 14, 2021. Until the date of financial statements, this agreement still on progress of renewal. Until the date of financial statements, this agreement still on progress of renewal.
- g. Batam Port Branch signs cooperation agreement No. US12/1/4/BTM-18.TU dated May 14, 2018, with PT Maxsteer Dyrnusa Perdana for the Cooperation to Manage and Operate the Ship to Ship Transit Anchorage in Nipah Waters. This cooperation is valid from November 11, 2016 to November 10, 2021.
- h. Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) regarding Port Service Operation at Kuala Tanjung Port.

Based on the cooperation agreement between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (First Party) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Second Party), dated January 23, 2015 No. HK.107/1/1/KSOP.KIG-15 or No. US.15/1/7/PI-15.TU concerning the Exploitation of Wharves at the Liquid Bulk Terminal at Kuala Tanjung Port, which was updated based on Addendum Number 1 dated November 16, 2016 which changed the title of the Cooperation Agreement from the previous "Jetty Exploitation at the Liquid Bulk Terminal at Kuala Tanjung Port" becomes "Port Service Operations at Kuala Tanjung Port", and changes the term "Jetty at Liquid Bulk Terminal" become "Multipurpose Terminal". The Company has obtained the stipulation of Concession Rights to carry out dock concession activities at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port from the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Hak Konsesi
 - a) Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan perusahaan dermaga pada Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima pemberian hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 2) Ruang Lingkup Perjanjian meliputi:
 - a) Pemberian Hak Konsesi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selama Jangka Waktu Konsesi untuk Perusahaan Dermaga Pada Terminal *Multipurpose* di Pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi Dermaga Terminal *Multipurpose*, Trestle, Peralatan, Utilitas dan Instalasi pipa;
 - b) Melakukan pungutan atas tarif jasa dermaga pada Terminal *Multipurpose* oleh PIHAK KEDUA;
 - c) Penyerahan Aset Terminal *Multipurpose* Kuala Tanjung.
- 3) Periode Perjanjian Kerjasama:

Periode Perjanjian Kerjasama untuk Jangka waktu selama 69 (Enam Puluh Sembilan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

 - a) Masa Prakonstruksi dan Masa Konstruksi paling lambat selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak penandatangan Perjanjian Kerjasama; dan
 - b) Masa Operasi terhitung sejak diterimanya izin pengoperasian Terminal *Multipurpose* sampai dengan berakhirnya periode Perjanjian Kerjasama.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, with the provisions of this agreement, as follows:

- 1) *Grant of Concession Rights*
 - a) *The First Party hereby grants the Second Party the right to carry out dock operations at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port and the Second Party hereby accepts this right in accordance with the provisions of this Cooperation Agreement and the provisions of laws and regulations;*
 - b) *The concession rights cannot be transferred to other parties.*
- 2) *The scope of the Agreement includes:*
 - a) *Granting of Concession Rights from the First Party to the Second Party during the Concession Period for the Concession of Wharves at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port which includes Multipurpose Dock Terminal, Trestle, Equipment, Utilities and Pipe Installation;*
 - b) *Conducting levies on dock services at Multipurpose Terminals by the Second Party;*
 - c) *Hand over Assets at the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal.*
- 3) *Cooperation Agreement Period:*

Cooperation Agreement Period for a period of 69 (Sixty-nine) years from the date of signing the Cooperation Agreement, with the following details:

 - a) *The pre-construction period and construction period is no later than 48 (forty eight) months, starting from the signing of the Cooperation Agreement; and*
 - b) *Operation Period commencing from the receipt of the Multipurpose Terminal operating license until the end of the Cooperation Agreement period.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 4) Pendapatan Konsesi:
Hasil Konsesi dan Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:
- Hasil konsesi (*concession fee*) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompensasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi Pengusahaan Dermaga Pada Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung yang meliputi Dermaga Terminal Multipurpose, Trestle, Peralatan, Utilitas dan Instalasi pipa di Kuala Tanjung.
 - Fee konsesi adalah sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pengoperasian diluar PPN.
 - Hasil konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- 5) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
Dalam waktu paling lambat 180 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi para pihak harus segera menyetujui dan mengambil semua Langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan Dermaga Pada terminal Multipurpose dari Pihak Kedua kepada pihak pertama.
- 6) Kerjasama Dengan Pihak Lain
Bahwa Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai surat No. PP.40/3/6/DP.16 tanggal 01 Februari 2016, telah memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan/atau bermitra dengan anak perusahaan atau badan usaha yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan perusahaan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Penugasan, Mitra kerjasama PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) adalah PT Prima Multi Terminal yang merupakan Anak Perusahaan BUMN dengan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 55%, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 20% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) 25%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 4) *Concession Income:*
Concession Results and Payment Methods are as follows:
- The concession fee obtained by the First Party constitutes compensation received from the Second Party in connection with the granting of a Pier Concession at the Multipurpose Terminal at Kuala Tanjung Port which includes the Multipurpose Terminal Pier, Trestle, Equipment, Utilities and Pipeline Installation in Kuala Tanjung.*
 - Concession fee is 2.5% of gross operating income excluding VAT.*
 - The results from the concession shall be deposited into the State Treasury as non-tax state revenue on behalf of the First Party every month not later than 15 days in the following month.*
- 5) *The Termination of Cooperation Agreement Within 180 days at the latest before the end of the concession period the parties must immediately agree and take all necessary steps to complete the process of transferring management of the Dock at the Multipurpose terminal from the Second Party to the first party.*
- 6) *Cooperation with Other Parties*
That the Port Director of the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation in accordance with letter No. PP.40/3/6/DP.16 dated February 1, 2016, has granted the First Party the right to be able to collaborate with other parties and/or partner with subsidiaries or entities. businesses that have the ability and competence to carry out a part or parts of the Kuala Tanjung Multipurpose Terminal business activities.

As stated in the Assignment Agreement, the cooperation partner of PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) is PT Prima Multi Terminal which is a BUMN Subsidiary with 55% Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), 55% from PT Waskita Karya (Persero) Tbk and 25% from PT Pembangunan Perumahan (Persero).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- i. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan (Pihak Pertama) dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Pihak Kedua), tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 9 November 2015 No. HK.107/1/2/OP.BLW-15 dan No. US.12/2/9/PI-15.TU, dan telah diperbaharui dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Tanggal 16 Juni 2016 No. HK.107/1/4/OP.BLW-16 dan No. UM.58/22/8/PI-16.TU dan diperbaharui Kembali dengan Addendum kedua tanggal 12 Juli 2017. Pihak Pertama memberikan hak konsesi kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah atau lokasi dimana terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan eksisting milik Perusahaan yang telah diusahakan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan dan Perusahaan masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tentang Pendirian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- b. Ruang Lingkup Konsesi
Pemberian hak dan kewenangan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area Konsesi yang telah diselenggarakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan (Pas Penumpang, Pas orang dan pas kendaraan);

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- i. *Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office and the Company regarding Port Service Business Activities in the Port that the Company Operates.*

Based on the Concession Agreement between the Belawan Main Port Authority Office (First Party) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Second Party), regarding Port Service Business Activities at Ports managed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dated November 9, 2015 No. HK.107/1/2/OP.BLW-15 and No. US.12/2/9/PI-15.TU, and has been renewed with an Additional Agreement (Addendum dated June 16, 2016 No: HK.107/1/4/OP.BLW-16 and No: UM.58/22/8/PI-16.TU and updated again with the second Amendment dated July 12, 2017. The First Party grants concession rights to the Company to carry out port service business activities in areas or locations where there are existing port terminals and facilities owned by the Company that have been operated by the Company for Port Services business activities, with the following conditions:

- a. *The term of the agreement is for 30 (thirty) years, commencing upon the date of signing of this agreement and extended as long as the concession area is used as a port facility and the company is still carrying out business activities as referred in the government regulation concerning company establishment and other applicable laws and regulations.*
- b. *Scope of Concession*
The granting of rights and authority from the first party to the second party to carry out port services in the concession area that has been carried out by the Second Party are as follows:
1. *Provision and/or dock services for berthing;*
 2. *Provision and/or shipping of refueling and clean water services;*
 3. *Provision and/or service of passenger and/or vehicle boarding facilities (Passenger Pass, Person Pass and Vehicle Pass);*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Gudang dan tempat penimbunan barang alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
 7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
- c. Pendapatan Konsesi;
1. Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama atas Pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Pihak Pertama.
 2. Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 3. Pembayaran pendapatan konsesi untuk pertama kalinya adalah terhadap kegiatan jasa kepelabuhanan yang berlangsung untuk periode tanggal 9 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk pembayaran pendapatan konsesi tahun 2016 dan seterusnya dilakukan per triwulan yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan pertama triwulan berikutnya.
 4. Pembayaran pendapatan konsesi dilaksanakan berdasarkan Berita Acara hasil Pencocokan dengan penelitian (Coklit) data pendapatan perusahaan jasa kepelabuhanan yang ditandatangani oleh para pihak dengan kode Billing yang diterbitkan dan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua.
 5. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilaksanakan setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan pertama triwulan berikutnya. Berita Acara Coklit wajib

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. To provide and/or equip dock services for the loading and unloading of goods and containers;
 5. Provision and/or warehouse services and storage places for loading and unloading equipment and port equipment;
 6. Provision and/or terminal services for liquid bulk, dry bulk and Ro-Ro containers;
 7. Provision and/or service of loading and unloading goods.
- c. Concession Income;
1. The Second Party pays to the First Party the concession income obtained from the operations from the Concession Area at each port as Non-Tax State Revenue (PNBP) which is deposited into the State Treasury through the First Party's Revenue Treasurer.
 2. The amount of Concession Income in the Concession Area as referred to in paragraph (1) is 2.5% per year of the gross income from the implementation of Concession Activities in the Concession Area in accordance with the provisions of this Agreement.
 3. Payment of concession income for the first time is for port service activities that take place for the period November 9, 2015 to December 31, 2015 and payment of concession income for 2016 and henceforward is made quarterly paid at the 25th day of the first month of the following quarter by the latest.
 4. Payment of concession income is carried out based on the results of Matching and research (Coklit) revenue data of petroleum services signed by the parties with the Billing code issued and submitted by the First Party to the second party.
 5. The activity of Matching and research (Coklit) is carried out every month and not later than the 20th (twentieth) of the first month of the following quarter. The Coklit Minutes must be signed by the

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- ditandatangani oleh para pihak dan kode billing diserahkan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua.
6. Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat lambatnya tanggal 14 (empat belas) April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- d. Pelaporan
1. Pihak Kedua wajib melaporkan kepada pihak pertama meliputi berupa laporan pemenuhan standar kinerja operasional pelabuhan, laporan pelaksanaan pungutan tarif jasa kepelabuhanan dan data kegiatan serta laporan pendapatan atas pelaksanaan perusahaan jasa kepelabuhanan berdasarkan format dan blanko yang telah disepakati para pihak sebagaimana dalam lampiran perjanjian konsesi.
 2. Pihak kedua wajib menyampaikan surat pengantar dan/atau laporan pendapatan setiap bulan secara resmi yang ditandatangani dan/atau menggunakan barcode oleh masing-masing General Manager (GM) dilingkungan kerja Pihak kedua kepada pihak pertama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
 3. Para pihak dalam menyampaikan surat pengantar dan/atau laporan pendapatan setiap bulannya dapat melalui surat elektronik (E-mail) dari masing-masing cabang/unit kerja dilingkungan kerja pihak kedua dari dan/atau ke pihak pertama
 4. Pihak kedua wajib menyampaikan kepada pihak pertama laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pihak kedua selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.
- e. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
- Dalam Jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses perusahaan Terminal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- parties and the billing code submitted by the First Party to the second party.*
6. *Carry out comprehensive Annual Financial Report Audit activities no later than 14 (fourteen) of April of the following year with an Independent Auditor appointed by the Second Party.*
- d. *Reporting*
1. *The Second Party is obliged to report to the first party in the form of reports on the fulfillment of port operational performance standards, reports on the implementation of port service charges and activity data as well as income reports on the implementation of port service operations based on the format and form agreed by the parties as in the attachment to the concession agreement.*
 2. *The second party is obliged to submit a letter of replacement and/or income statement every month officially signed and/or using a barcode by the respective General Manager (GM) of the Second Party's work environment to the First Party no later than the 10th of each month.*
 3. *The Parties may submit monthly cover letters and/or income reports via electronic mail (E-mail) from each branch/work unit within the second party's work environment from and / or to the first party*
 4. *The second party must submit to the first party an annual financial report that has been audited by an Independent Auditor appointed by the Second Party by no later than April 30 of the following year.*
- e. *End of Cooperation Agreement*
- Within the period of 360 days prior to the expiration of the concession period, the Parties must take the necessary steps to terminate the Cooperation Agreement and complete the transfer of Assets and the process of operating the Terminal from the Second Party to the First Party.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. Kontinjensi

39. Contingencies

Perusahaan

a. Berdasarkan Surat Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) kepada Pendiri dan Mitra Pendiri No. UM.2/17/10/1/DP4-19 tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Kinerja, luran dan Evaluasi Program Pensiun DP4, bahwa sejak tahun 2013 RKD DP4 mengalami penurunan sampai saat ini, karena kegagalan dalam penempatan investasi. Dimana telah ditanggapi melalui Surat Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada Direktur Utama DP4 No. KP.30/2/7/PI-19 tanggal 6 Nopember 2019 Perihal Kinerja, luran dan Evaluasi Program Pensiun DP4, Pelindo I (Persero) meminta DP4 untuk melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Audit Investigasi terkait kajian investasi terhadap pembelian tanah, penyertaan modal pada anak perusahaan PT Indoport Prima dan Indoport Utama.
2. Melakukan appraisal atas 4 (empat) bidang tanah di Sawangan, Jagaraksa, Salatiga dan Jakabaring.
3. Melakukan upaya hukum atas kesalahan investasi.

Selanjutnya dilakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Direktur SDM Pelindo I, II, III, IV tanggal 30 Juni 2020 telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas pengelolaan DP4 tahun 2012 s.d 2019
2. Disepakati untuk perhitungan Valuasi Aktuaria tahun 2018 dan 2019 adalah suku bunga teknis sebesar 9,85 dan tabel mortalitas GAM71

DP4 mengirim surat ke Pendiri dan Mitra Pendiri sesuai surat No. UM.2/14/9/1/DP4-20 tanggal 14 September 2020 Perihal Persetujuan Laporan Valuasi Aktuaria Tahun 2018 (Perubahan Asumsi). Berdasarkan valuasi Dana Pensiun oleh aktuaris untuk tahun 2018 terdapat kekurangan (defisit solvabilitas) pada DP4, untuk porsi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebesar Rp108,3 milyar.

Pada September 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengirimkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran luran berdasarkan Valuasi Tahun 2018. Namun Pelindo III dan Pelindo IV, belum

The Company

a. Based on the Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Letter to the Founders and Founding Partners No. UM.2/17/10/1/DP4-19 dated October 17, 2019 Regarding Performance, Fees and Evaluation of the DP4 Pension Program, that since 2013 RKD DP4 has decreased until now, due to failure in investment placement. Whereas has been responded through letter of Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to the President Director of DP4 No. KP.30/2/7/PI-19 dated November 6, 2019 Regarding Performance, Contribution and Evaluation of the DP4 Pension Program, Pelindo I (Persero) asked DP4 to take the following steps:

1. Conducting an Investigative Audit related to investment studies on land purchases, equity participation in the subsidiaries of PT Indoport Prima and Indoport Utama.
2. Conducting appraisal on 4 (four) plots of land in Sawangan, Jagaraksa, Salatiga and Jakabaring.
3. Taking a legal action towards investment mistakes.

Furthermore, a Coordination Meeting was held which was attended by the HR Directors of Pelindo I, II, III, IV on June 30, 2020, having agreed on the following matters:

1. A Specific Purpose Audit (ATT) will be conducted on the management of DP4 from 2012 to 2019
2. It was agreed that for the 2018 and 2019 Actuarial Valuation calculations, the technical interest rate was 9.85 and the GAM71 mortality table

DP4 sent a letter to the Founder and Founding Partners in accordance with letter No. UM.2/14/9/1/DP4-20 dated September 14, 2020 regarding Approval of the 2018 Actuarial Valuation Report (Change in Assumptions). Based on the pension fund valuation by actuaries for 2018 there is a deficit (solvency deficit) in DP4, for the portion of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is Rp108.3 billion.

In September 2020, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has sent a Declaration Ability to Pay Contribution based on the 2018 Valuation. However, Pelindo III and Pelindo IV have not signed a declaration of commitment to

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

menandatangani pernyataan Kesanggupan iuran berdasarkan Valuasi Aktuaria Tahun 2018.

Sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-555/NB.212/2020 tanggal 1 Nopember 2020 Perihal Pengelolaan Dana Pensiun, menyatakan DP4 belum menyerahkan Laporan Valuasi Aktuaria tahun 2018, 2019 dan Laporan Keuangan Auditan tahun 2019.

Berdasarkan hasil temuan Audit Tujuan Tertentu dari BPKP sesuai dengan Laporan BPKP No. LHATT -11/D502/2/2020 tanggal 14 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Kesalahan dalam Pengelolaan investasi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) diantaranya terdapat kerugian investasi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2,9 milyar, kerugian atas pelepasan dua rekasadana Pratama Dana Investasi Saham (PDIS) dan Reksadana Pratama Dana Andalan Saham (PDAS) sebesar Rp120,6 milyar serta penempatan dana pendirian anak perusahaan sebesar Rp89,9 milyar dan investasi tanah di Tigaraksa sebesar Rp141,6 milyar yang tidak memberikan return.
2. Indikasi adanya *Fraud* dalam Penempatan Dana Investasi diantaranya terdapat kelebihan pembayaran atas pembelian Tanah di Salatiga sebesar Rp2,2 milyar serta indikasi kemahalan harga pembelian tanah seluas 217.124 m² di Tigaraksa sebesar Rp30.3 milyar.
3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan diantaranya harga wajar reksadana *Insight Peduli* sebesar Rp 88,3 milyar dan Reksadana *Insight Community* sebesar Rp99,2 milyar, likuidasi atas penempatan Investasi pada Reksadana *Harvestindo* sebesar Rp11,9 milyar dan penempatan pada Reksadana *Penyertaan terbatas (RDPT) Indosurya Syariah* mengalami gagal bayar dan Penurunan kekayaan untuk pendanaan (KUP) berisiko pada gagal bayar manfaat pensiun serta penempatan Investasi pada portfolio saham setiap tahun mengalami penurunan nilai rata-rata 88,14%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

contribute based on the 2018 Actuarial Valuation.

In accordance with the Financial Services Authority Letter No. S-555/NB.212/2020 dated November 1, 2020 regarding Pension Fund Management, it states that DP4 has not submitted the 2018, 2019 Actuarial Valuation Report and the 2019 Audited Financial Statements..

Based on the findings of the Audit of Specific Objectives from the BPKP in accordance with the BPKP Report No. LHATT-11/D502/2/2020 dated December 14, 2020, in principal it states that:

1. Mistakes in the management of pension fund investments in Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) include a loss of investment in government securities (SBN) of Rp2.9 billion, a loss on the release of two rekasadana Pratama Equity Investment Fund (PDIS) and Pratama Mutual Funds Andalan Stocks (PDAS) amounting to Rp120.6 billion and the placement of funds for the establishment of a subsidiary amounting to Rp89.9 billion and land investment in Tigaraksa amounting to Rp141.6 billion which does not provide return.
2. Indications of fraud in the Placement of Investment Funds include overpayments for the purchase of land in Salatiga of Rp2,2 billion and indications of overpriced land purchase prices for land area of 217,124 sqm in Tigaraksa amounting to Rp30.3 billion.
3. Other things that need to be considered include the fair price of *Insight Peduli* mutual funds of Rp88.3 billion and *Insight Community* mutual funds of Rp99.2 billion, liquidation of investment placements in *Harvestindo* mutual funds of Rp11.9 billion and placement in limited participation mutual funds (RDPT) *Indosurya Syariah* experienced default and decreased wealth for funding (KUP) was at risk of default on pension benefits and investment placements in the stock portfolio each year experienced a decline in value by an average of 88.14%.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Simpulan Hasil ATT diatas BPKP merekomendasikan untuk menindaklanjuti indikasi *fraud*, melakukan *due diligence* atas penempatan investasi pada anak perusahaan, menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, dengan memperhatikan kewajiban pembayaran defisit pendanaan dll.

Based on the ATT Result Conclusions above, BPKP recommends to following up fraud indications, conducting due diligence on investment placements in subsidiaries, keeping pension funds in a Fulfilled Fund state, by taking into account the obligation to pay deficit funding etc.

Berdasarkan Laporan BPKP tersebut dilakukan Rapat Koordinasi Tim Teknis DP4 dalam rangka memberikan masukan SE Kementerian BUMN tentang Prinsip Investasi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, disampaikan Usulan Agar dilakukan pembahasan terkait Laporan hasil Audit Tujuan Tertentu dari BPKP.

Based on the BPKP Report, a DP4 Technical Team Coordination Meeting was held in order to provide input from the Minister of BUMN regarding Investment Principles in Management of Pension Funds for Defined Benefit Pension Programs within the Ministry of State-Owned Enterprises, Suggestions for discussions regarding the Audit Report of Specific Objectives from BPKP.

Dampak dari kesalahan investasi aset tersebut akan berpengaruh besar terhadap posisi pendanaan DP4. Untuk itu sebagaimana ketentuan OJK dan Peraturan Dana Pensiun maka pendiri dan mitra pendiri dana pension harus berkomitmen penuh untuk mengatasi persoalan tersebut untuk menjaga dan melindungi kepentingan seluruh peserta DP4.

The impact of the investment mistakes in these assets will have a major effect on the funding position of DP4. For this reason, as stipulated by the OJK and the Pension Fund Regulations, the founders and partners founding pension funds shall fully committed to overcoming this problem to safeguard and protect the interests of all DP4 participants.

b. Perusahaan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali PBB kepada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan surat sebagai berikut:

b. *The Company has submitted an application for PBB reconsideration to the Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan based on the letter as follows:*

1. Surat No. KU.62/5/12/Blw-18 tanggal 4 Juni 2018 perihal Permohonan Peninjauan Kembali PBB Tahun 2018.
2. Surat No. KU.62/5/5/Blw-19 tanggal 16 Juli 2019 perihal Permohonan Peninjauan dan Pengurangan PBB Terhutang 2019.
3. Surat No. KU.62/1/6/Blw-20 tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Peninjauan dan Pengurangan PBB Tahun 2020.

1. *Letter No. KU.62/5/12/Blw-18 dated June 4, 2018 regarding the 2018 UN Review Application.*
2. *Letter No. KU.62/5/5/Blw-19 dated July 16, 2019 regarding the 2019 UN Debt Review and Reduction Application.*
3. *Letter No. KU.62/1/6/Blw-20 dated January 21, 2020 regarding the UN Review and Reduction Application Year 2020.*

Perusahaan juga telah mendapatkan jawaban dan juga menyelenggarakan rapat dengan Tim Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, namun belum sepakat dengan BPPRD terkait peninjauan Kembali PBB tersebut.

The company has also received answers and also held a meeting with the Medan City Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) Team, but has not agreed with the BPPRD regarding the PBB review.

Perusahaan mengirimkan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No. KU.62/4/3/PI-20 tanggal 30 Juli 2020 perihal Permohonan Pendapat, Reviu dan

The company sent a letter to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative of North Sumatra Province No. KU.62/4/3/PI-20 dated July 30, 2020 regarding requests for opinions, reviews and

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pendampingan atas Tagihan PBB PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah memberikan Pendapat dan Saran atas Tagihan PBB PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan Tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan Laporrannya No. S-1281/PW2/4.1/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang menyatakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahwa Perusahaan sudah tidak menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas areal perairan Alur Laut, dan saat ini telah dikenakan PNBP oleh Otoritas Pelabuhan berupa Jasa Pemanduan dan Jasa Penundaan dari pemanfaatan areal atas dan bawah perairan Alur Laut, serta Jasa Labuh.
2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 1982 tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) Belawan, bahwa DLKr seluas 2.217,95 Ha, bukan merupakan objek Bumi dalam penetapan SPPT PBB Perusahaan, karena masih merupakan Kawasan yang diperuntukan bagi Kementerian Perhubungan. Peruntukan lahan yang akan diusahakan Perusahaan dialokasikan tersendiri dan telah diterbitkan HPL-nya oleh BPN, yaitu seluas 289,36 Ha (2.893.600 m²) dan telah tercatat dalam Daftar Aset Tetap Perusahaan Cabang Belawan, sehingga luasan areal bumi, perairan dan bangunan yang menjadi objek PBB adalah sebagai berikut:

No	Obyek Pajak Bumi Bangunan/ Object of Land and Buliding Tax	Tahun/ Luas (m ²) / Year/ Area		
		2018	2019	2020
1	Bumi/ Land (HPL)	2,893,600	2,893,600	2,893,600
2	Wilayah Perairan/ Teritorial Waters (Kolam Pelabuhan/ Harbour Pond)	626,310	626,310	626,310
	Total Luasan Bumi dan Perairan	3,519,910	3,519,910	3,519,910
3	Bangunan/ Building	384,969	404,884	411,981

3. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perusahaan telah memperoleh 2 Nomor Objek Pajak (NOP). Luasan objek Bumi

assistance on PBB bills for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch. BPKP Representatives of North Sumatra Province have provided Opinions and Suggestions on the Belawan Branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Branch PBB Bills in 2018, 2019 and 2020 based on its Report No. S-1281/PW2/4.1/2020 dated December 22, 2020, which stated the following conclusions:

1. Based on PP. 15 of 2016 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenue (PNBP), that the Company does not control and / or benefit from the sea lane area, and is currently subject to PNBP by the Port Authority in the form of Guiding Services and Postponing Services from utilization the upper and lower areas of the Sea Channel waters, as well as Labuh Services.
2. Based on the Joint Decree of the Minister of Home Affairs and the Minister of Transportation No. 14 of 1982 concerning the Boundaries of the Port Work Environment Area (DLKr) of Belawan, that DLKr covering an area of 2,217.95 Ha, is not a Land object in the determination of the Company PBB SPPT, because it is still an area designated for the Ministry of Transportation. The allocation of land to be cultivated by the Company is allocated separately and the HPL has been issued by BPN, which is an area of 289.36 Ha (2,893,600 sqm) and has been recorded in the Belawan Branch Company Fixed Asset List, so that the area of land, waters and buildings that become UN objects are as follows:

3. Based on Law no. 12 of 1985 concerning the Land and Building Taxes, Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Regional Regulation of the City of Medan No. 3 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Tax, the company has obtained 2 Tax Object Numbers (NOPs).

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dan Bangunan yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan dalam SPPT PBB Tahun 2018 sampai dengan 2020, masing-masing bumi dan perairan seluas 101.769.308 m² dan bangunan seluas 382.211 m², serta masuk dalam kelas 082 dengan tarif NJOP Rp82.000/m² untuk bumi dan kelas 016 dengan tarif NJOP Rp3.100.000/m² untuk bangunan.

The area of land and building objects determined by the BPPRD of Medan City in SPPT PBB 2018 to 2020, respectively land and water covering an area of 101,769,308 sqm and buildings covering an area of 382,211 sqm, and included in class 082 with a NJOP rate of Rp82,000 / sqm for earth and class 016 with NJOP rate of Rp3,100,000 / sqm for buildings.

Memenuhi seluruh ketentuan di atas dan berdasarkan data luasan obyek bumi/ perairan dan bangunan yang dimiliki Perusahaan, BPKP menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan luasan bangunan dalam SPPT PBB, sebagai berikut:

In compliance with all the provisions above and based on data area on land/ water and buildings object owned by the Company, BPKP concluded that there were differences in land/ water and building area in the SPPT PBB, as follows:

- Luasan bumi/ perairan yang tertulis seluas 98.249.398 m² seharusnya seluas 3.519.910 m².
- Luasan bangunan untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 yang tertulis masing-masing seluas 2.758 m², 22.673 m² dan 29.770 m² seharusnya masing-masing seluas 384.969 m², 404.884 m² dan 44.981 m².

- *The area of land/ waters written as 98,249,398 sqm be supposed 3,519,910 sqm.*
- *The building area for 2018 to 2020 written as 2,758 sqm, 22,673 sqm and 29,770 sqm, respectively, be supposed 384,969 sqm, 404,884 sqm and 44,981 sqm respectively.*

Kelebihan perhitungan luasan obyek bangunan/ perairan dan kekurangan perhitungan luasan bangunan dalam penetapan SPPT PBB tersebut, mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp56.479.833.732 dan kelebihan perhitungan SPPT PBB Tahun 2020 tagihan kedua sebesar Rp9.515.430.386.

The excess calculation of the area of the building / water object and the lack of calculation of the area of the building in the determination of the PBB SPPT resulted in an overpayment of PBB amounting to Rp56,479,833,732 and an excess calculation of the PBB SPPT 2020 for the second bill of Rp9,515,430,386.

Atas kelebihan pembayaran PBB Tahun 2018 – 2020 tersebut, Perusahaan akan mengajukan pengembalian kepada BPPRD dan mencatat sebagai Estimasi Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan dalam akun Aset Tidak Lancar Lainnya (Catatan 14).

For the overpayment of PBB for 2018 - 2020, the Company will submit a refund to BPPRD and record it as an Estimated Land and Building Tax Bill in the Other Non-current Asset account (Note 14).

40. Peristiwa Hukum

40. Legal Lawsuits

- a. Perkara Perdata No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn dengan Tjahaya sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan *reefer part* petikemas pada area PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap CV Sumatera Sejahtera. Adapun Putusan pada tingkat Pertama adalah Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp2.002.000.000 dan saat ini perkara dimaksud dalam proses banding di Peradilan Tinggi Medan.

- a. *Civil Case No. 728/Pdt.G/2016/PN.Mdn with Tjahaya as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant I related to Lawsuit Against Laws over the loss of container reefer parts in the area of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which causing losses to CV Sumatera Sejahtera. The verdict at the first level penalize the Defendant to provide compensation amounting to Rp2,002,000,000. Currently, the case is referred to in the appeal process in the Medan High Court.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pengembalian *Down Payment* (DP) yang telah diserahkan oleh CV SAA Inti Karya Teknik sebesar Rp240.709.000. Saat ini sudah *inkracht*/selesai namun belum diperoleh surat perintah eksekusi.
- c. Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan No. 43/TUN/2009/PTUN-Mdn tanggal 25 Agustus 2009 *jo.* 119/B/2009/PT.TUN-MDN tanggal 13 Januari 2010 *jo.* 152K/TUN/2010 tanggal 28 September 2010 *jo.* 37 PK/TUN/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Gugatan T. Aswandin kepada Kantor Pertanahan Medan untuk pembatalan sebagian sertifikat HPL No. 1 tahun 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):
1. Tanah seluas 66.800 m² di Jln. Bagan Deli Belawan.
 2. Tanah seluas 7.100 m² di Jln. Pelabuhan (d/h Kampung Purwodadi) Belawan II.
 3. Tanah seluas 10 Ha di Jln Bagan Deli (d/h Kampung Skoni) Bagan Deli.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kalah pada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN), Kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Hasil peradilan yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi.
 2. Menyatakan batal Sertifikat HPL No.1/Belawan I khusus terhadap tanah Penggugat yang disebutkan di atas.
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut sertifikat HPL No. 1/Belawan I khusus terhadap tanah Penggugat.
- d. Perkara No. 281/Pdt.G/2018/PN.Mdn tentang Gugatan wanprestasi (cidera janji) atas Perjanjian Kerjasama No. UM.58/41//18/P.I-04 – 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Metito Indonesia tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Persidangan menunggu hasil putusan dari majelis hakim dan sampai dengan saat ini belum adanya surat panggilan (relaas) pemberitahuan putusan.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. Case No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn regarding *Lawsuits Against the Law for the Return of Down Payment (DP)* which has been submitted by CV SAA Inti Karya Teknik in the amount of Rp240,709,000. Currently, *inkracht* has been completed but no execution warrant has been obtained.
- c. Medan State Administrative Court (PTUN) Lawsuit No. 43/TUN/2009/PTUN-Mdn on August 25, 2009 *jo.* 119/B/2009/PT.TUN-MDN dated January 13, 2010 *jo.* 152K/TUN/2010 September 28, 2010 *jo.* 37 PK/TUN/2013 dated April 24, 2013 concerning the lawsuit of T. Aswandin to the Medan Land Office for the partial cancellation of HPL certificate No. 1 of 1993 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):
1. Land area of 66,800 sqm on St. Belawan Deli Chart.
 2. Land area of 7,100 sqm on St. Pelabuhan (d/h Kampung Purwodadi) Belawan II.
 3. Land area of 10 Ha on St. Bagan Deli (d/h Kampung Skoni) Bagan Deli.

The National Land Agency (BPN) and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lost to the PTUN, the State Administrative Court (PT TUN), Cassation and Review (PK) in the Supreme Court (MA). Judicial results are:

1. Refuse an appeal for cassation.
 2. Declares void HPL Certificate No. 1/Belawan I specifically for the Plaintiff's land mentioned above.
 3. Ordered the Defendant to revoke the HPL No. 1/Belawan I certificate specifically against the Plaintiff's land.
- d. Case No. 281/Pdt.G/2018/PN.Mdn regarding breach of default (breach of contract) for Cooperation Agreement No. UM.58/41/18/PI-04-001/AGR/PI-MI/04 dated November 26, 2004, between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Metito Indonesia concerning the Collaboration of Drinking Water Operations at the Port of Belawan, Dumai, and Tanjung Balai Karimun. The trial still awaits the decision result of the panel of judges and to date, there has been no summons (notification) of the decision.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- e. Perkara Perdata No. 672/Pdt.G/2018/PN. Mdn tanggal 08 Oktober 2018 dengan Tamrin selaku Penggugat lawan Agung Rachman Hidayat selaku Tergugat I dan Yarham Harid selaku Tergugat II terkait Pembatalan surat perjanjian No. B.VII-518/BLW-US.25 tanggal 26 September 2018 untuk melakukan kerjasama penggunaan lahan di jalan Indrapura Ujung (samping dermaga Kesatuan Penjagaan Laut & Pantai (KPLP)) dengan luas lahan yang akan digunakan adalah 895,59 m². Atas hal tersebut, Penggugat mengklaim telah menjalankan usaha CV Kepiting Bang Tamrin Dermaga Seafood selama 5 tahun. Telah adanya putusan dari majelis hakim, yang memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- f. Perkara No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn tentang prosedur pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. Pengadilan Negeri (PN) Medan telah mengirimkan berkas Kasasi ke Mahkamah Agung.
- g. Perkara No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Asminah Sitorus selaku Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat II tentang kepemilikan atas tanah seluas 10.000 m² di Dusun II Alai Desa Kuala Tanjung, Perwakilan Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Telah adanya putusan dari PN Kisaran, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara telah *inkracht*/selesai.
- h. Perkara No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis antara Nurasiah Dkk, selaku Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat IV tentang kepemilikan atas tanah seluas ±447 m² di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Telah adanya putusan dari PN Kisaran, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Perkara ini telah *inkracht*/selesai.
- i. Perkara No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis tentang Keberatan atas Penetapan Konsinyasi atas lahan seluas ±21.481,16 m² berlokasi di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Adanya pencabutan pemeriksaan tingkat kasasi perkara oleh Penggugat sehingga perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap.
- e. *Civil Case No. 672/Pdt.G/2018/PN.Mdn dated October 8, 2018, with Tamrin as the Plaintiff against Agung Rachman Hidayat as Defendant I and Yarham Harid as Defendant II related to the cancellation of agreement letter No. B.VII-518/BLW-US.25 dated September 26, 2018, to conduct land use cooperation on the Indrapura Ujung road (next to the Pier of the Sea & Coast Guard Unit) with an area of land to be used is 895.59 m². For this matter, the Plaintiff claimed to have been running the business of Crab Bang Tamrin Pier Seafood for 5 years. There has been a decision from the panel of judges, who decided that the Plaintiff's claim could not be accepted.*
- f. *Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn concerning procedures for termination of employment and disputes of rights. Medan District Court (PN) has sent an appeal file to the Supreme Court.*
- g. *Case No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kis between Asminah Sitorus as Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as to Defendant II regarding ownership of 10,000 m² of land in Alai Hamlet II in Kuala Tanjung Village, Representative of Sei Suka District, formerly Asahan District now Batubara Regency, North Sumatra Province. There has been a decision from the Kisaran District Court, with the verdict rejecting the Plaintiff's claim in its entirety. The case has been *inkracht*/finished.*
- h. *Case No. 49/Pdt.G/2018/PN.Kis between Nurasiah et al, as Plaintiffs against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as to Defendant IV regarding ownership of ± 447 m² of land in Hamlet III Alai, Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, formerly Asahan Regency, now Batubara Regency, North Sumatra Province. There has been a decision from the Kisaran District Court, with the verdict rejecting the Plaintiff's claim in its entirety. This case has been *inkracht* / finished.*
- i. *Case No. 56/Pdt.G/2018/PN.Kis regarding Objection on the Consignment Establishment of ±21,481.16 m² located in Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, Batubara District. The Plaintiff has revoked the case review rate so that the case in question has permanent legal force.*

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- j. Perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN.Dum tanggal 07 Februari 2018 antara PT Dahlia Bina Utama lawan General Manager Cabang Dumai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Kantor Pusat PT Pelindo I selaku Tergugat III dan IV tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penerbitan Telegram Kementerian Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 65/VI/DM/17 tanggal 16 Juni 2017 dan Surat Edaran No. 50/16/20/DUM.17.TU tanggal 8 September 2017. Saat ini diajukan upaya hukum Kasasi oleh Penggugat ke Mahkamah Agung RI.
- k. Perkara Perdata No. 672/Pdt.G/2019/PN. Mdn antara Tamrin sebagai Penggugat lawan Agung Rachman Hidayat (Tergugat I) dan Yarham Harid sebagai General Manager Cabang Belawan (Tergugat II). Dengan Objek Gugatan adalah atas kerjasama pemanfaatan lahan milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terletak di Jalan Indra Pura No. 14 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Agung Rachman, yang dengan adanya kerjasama tersebut Penggugat (CV Kepiting Bang Tamrin) merasa dirugikan. Posisi Terakhir saat ini adalah penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan tingkat banding dari PT Medan.
- l. Perkara Perdata No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn antara Muhammad Rajab Parinduri dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat dengan objek gugatan mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak. Telah adanya Putusan Kasasi MA RI yang pada intinya menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan M. Rajab Fandi Parinduri. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga harus membayarkan kepada M. Rajab Fandi Parinduri kekurangan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak seluruhnya sebesar Rp28.140.400.
- m. Perkara Perdata No. 19/Pdt.G/2019/PN. Tpg antara Roland P. Sinaga sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terkait Kepemilikan atas tanah seluas 100 M x 200 M atau seluas 30.000 M² yang terletak di Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepri. Posisi perkara saat ini telah adanya putusan Pengadilan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat (Roland Sinaga, Dkk) seluruhnya.
- j. Case No. 6/Pdt.G/2018/PN.Dum dated February 7, 2018, between PT Dahlia Bina Utama against General Manager of the Dumai Branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and the Central Office of PT Pelindo I as Defendants III and IV concerning the Lawsuit Against the Law against the Telegram Issuance of the Ministry of Transportation cq. Director-General of Sea Transportation No. 65/VI/DM/17 dated June 16, 2017, and Circular No. 50/16/20/DUM.17.TU dated September 8, 2017. At this time the Plaintiff's legal action has been submitted to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
- k. Civil Case No. 672/Pdt.G/2019/PN. Mdn between Tamrin as Plaintiff against Agung Rachman Hidayat (Defendant I) and Yarham Harid as General Manager of Belawan Branch (Defendant II). With the object of the Lawsuit is the cooperation in the use of land owned by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which is located on Jalan Indra Pura No. 14 Ex. Belawan I Kec. Medan Belawan Medan City, North Sumatra province, which was carried out by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with Agung Rachman, through which the Plaintiff (CV Kepiting Bang Tamrin) felt aggrieved. The latest position is the plaintiff filed for an Cassation appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia over the decision on the appeal level from PT Medan.
- l. Civil Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn between Muhammad Rajab Parinduri as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Defendant with the object of lawsuit concerning procedures for employment termination and disputes over rights. There has been a Supreme Court Cassation Decision which stated the Termination of Work Relations between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and M. Rajab Fandi Parinduri. The injunction states that PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) also has to pay M. Rajab Fandi Parinduri shortage of severance pay, tenure awards, compensation for rights at total amount of Rp28,140,400.
- m. Civil Case No. 19/Pdt.G/2019/PN. Tpg between Roland P. Sinaga as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) concerning about land ownership with an area of 100 M x 200 M or an area of 30,000 M² that is located on Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. East Bintan, Kab. Bintan, Kepri Province. The current case position is that there is a Court Verdict stating that the Plaintiff (Roland Sinaga, Dkk) claim is completely rejected.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- n. Perkara Perdata No. 281/Pdt.G/2019/PN. Mdn antara PT Metito Indonesia sebagai Penggugat lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat dengan objek gugatan dugaan wanprestasi (cidera janji) atas Perjanjian Kerjasama No. UM.58/41//18/P.I-04 - 001/AGR/PI-MI/04 tanggal 26 November 2004 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Metito Indonesia tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Balai Karimun. Posisi perkara saat ini adanya perlawanan hukum Banding oleh Penggugat.
- o. Perkara No. 19/Pdt.G/2019/PN.Tpg tentang kepemilikan atas tanah seluas 100 M x 200 M atau seluas 30.000 M² yang terletak di Jl. Korindo, Kel. Sei Lekop, Kec. Bintang Timur, Kab. Bintang, Provinsi Kepri. Agenda persidangan terakhir adalah pemeriksaan saksi Penggugat.
- p. Perkara No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna atas keputusan Tergugat I yang menyatakan kendaraan yang diakui Penggugat beserta teman-temannya sebagai kepemilikannya menjadi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Keputusan tergugat I (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP.02.2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Penetapan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai menjadi Barang Yang Menjadi Milik Negara berupa kendaraan bermotor bukan baru. Posisi perkara saat ini adanya putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
- q. Perkara No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat, mengajukan gugatan terhadap PT Cahaya Karangetang Abadi (PT CKA) atas dugaan perbuatan melawan hukum dari PT CKA yang tidak melakukan pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah diterima oleh kapal-kapal yang diageni oleh PT CKA di Cabang Pelabuhan Dumai. Posisi perkara saat ini adanya agenda putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)) dengan putusan verstek.
- r. Perkara Perdata No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn antara Kusnan/Kusnan- II sebagai Penggugat melawan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) sebagai Tergugat I dan PT Pelabuhan

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- n. Civil Case No. 281/Pdt.G/2019/PN. Mdn between PT Metito Indonesia as the Plaintiff against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Defendant with the object of the lawsuit of alleged default (default) on Cooperation Agreement No. UM.58/41//18/P.I-04 - 001/AGR/PI-MI/04 dated November 26, 2004 between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with PT Metito Indonesia regarding Joint Operation for Drinking Water Concession at the Ports of Belawan, Dumai and Tanjung Balai Karimun. The latest position of the case is that the Plaintiff initiate for a legal appeal.
- o. Case No. 19/Pdt.G/2019/PN.Tpg regarding ownership of land covering an area of 100 M x 200 M or an area of 30,000 M² located on St. Korindo, Kelurahan Sei Lekop, Sub-district Bintang Timur, District Bintang, Riau Islands Province. The agenda of the final trial was the examination of the Plaintiff's witnesses.
- p. Case No. 27/Pdt.G/2019/PN.Bna on the decision of Defendant I which stated that the vehicle recognized by the Plaintiff and his friends as ownership became State Property (BMN) based on Defendant Decree I (Head of the Office of Customs and Excise Control in Banda TMP C Banda Aceh) No. kep-48/WBC.01/KPP.MP.02.2015 dated July 29, 2015, concerning Determination of Goods That Are Declared Not Mastered to become State-Owned Goods in the form of non-new motorized vehicles. The final trial agenda is Duplicate Reading.
- q. Case No. 661/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as the Plaintiff, filed a lawsuit against PT Cahaya Karangetang Abadi (PT CKA) for alleged unlawful acts from PT CKA that did not make payment for port services. which has been received by vessels authorized by PT CKA in the Dumai Port Branch. The current position of the case is that there is a decision agenda stating that the plaintiff's claim has been glared through default judgement.
- r. Civil Case No. 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn between Kusnan/Kusnan-II as the Plaintiff against Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat II. Dengan objek gugatan adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Posisi terakhir adalah penyerahan konklusi.

- s. Perkara Perdata No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn antara Robert Simanjuntak sebagai Penggugat melawan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) sebagai Tergugat I dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Tergugat II. Dengan objek gugatan adalah mengenai Gugatan Perselisihan Hak yang menurut Penggugat timbul karena adanya pemutusan kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Tergugat II) dengan Koperasi Karyawan Maritim Indonesia (KOPKARMAR) (Tergugat I) sehingga para pekerja KOPKARMAR dialihkan kepada perusahaan lain. Pada saat proses peralihan tersebut Penggugat merasa belum menerima hak-hak nya sesuai dengan ketentuan. Posisi terakhir adalah penyerahan konklusi.

Manajemen berkeyakinan bahwa peristiwa hukum tidak berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan.

Defendant II. The object of the lawsuit is regarding Rights Dispute which according to the Plaintiff arose due to the termination of cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) and the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) (Defendant I), which consequently resulting on KOPKARMAR workers being transferred to other companies. At the time of the transition process, the Plaintiff declares that he had not received his rights according to the provisions. The latest case position is submission of conclusions.

- s. *Civil Case No. 96/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn between Robert Simanjuntak as the Plaintiff against the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) as Defendant I and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant II. With the object of the lawsuit regarding Rights Dispute which according to the Plaintiff arose due to the termination of cooperation between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Defendant II) and the Indonesian Maritime Employee Cooperative (KOPKARMAR) (Defendant I), which consequently resulting on KOPKARMAR workers being transferred to other companies. At the time of the transition process, the Plaintiff declares that he had not received his rights according to the provisions. The latest case position is submission of conclusions.*

Management believes that legal events have no material impact on the Company's financial statements.

41. Segmen Operasi

Manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis, Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis dan geografis. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi, informasi menurut segmen sebagai berikut:

- a. Pendapatan usaha berdasarkan kegiatan utama

	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	1,455,387,171,802	1,605,580,268,130	780,942,830,804	3,841,910,270,736	Operating revenue
Beban Usaha	525,729,556,836	1,098,723,674,717	1,541,469,025,943	3,165,922,257,496	Operating expense
Laba (Rugi) Usaha	929,657,614,966	506,856,593,413	(760,526,195,139)	675,988,013,240	Operating Profit/(Loss)

41. Operating Segment

Management has determined the operating segment based on the reports reviewed by the Directors, which are used in making strategic decisions, the Directors consider business operations from a business and geographical perspective. Transactions across transactions between segments have been eliminated, information according to segments are as follows:

- a. *Revenues based on Main Business Activities*

2020

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2019				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	1,445,395,013,759	1,576,848,261,452	2,617,139,460,309	5,639,382,735,520	Operating revenue
Beban Usaha	584,926,778,152	1,057,924,438,690	3,398,322,336,915	5,041,173,553,757	Operating expense
Laba (Rugi) Usaha	860,468,235,607	518,923,822,762	(781,182,876,606)	598,209,181,763	Operating Profit/(Loss)

b. Aset Segmen dan Liabilitas Segmen Berdasarkan Kegiatan Utama **b. Segment Assets and Segment Liabilities Based on Main Activities**

	2020				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Aset					Assets
Aset Segmen	917,111,720,037	3,307,266,031,630	8,170,545,659,254	12,394,923,410,921	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	3,571,218,850,865	Assets that cannot be allocated
Jumlah Aset	917,111,720,037	3,307,266,031,630	8,170,545,659,254	15,966,142,261,786	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segmen	131,468,788,531	621,075,894,973	4,842,534,093,259	5,595,078,776,763	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	4,110,530,973,731	Liabilities that cannot be allocated
Jumlah Liabilitas	131,468,788,531	621,075,894,973	4,842,534,093,259	9,705,609,750,494	Total Liabilities

	2019				
	Petikemas/ Container	Kepelabuhan/ Port	Lainnya/ Others	Konsolidasi/ Consolidated	
Aset					Assets
Aset Segmen	1,024,679,026,682	3,219,406,028,041	7,514,953,136,804	11,759,038,191,527	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	4,210,333,961,384	Assets that cannot be allocated
Jumlah Aset	1,024,679,026,682	3,219,406,028,041	7,514,953,136,804	15,969,372,152,911	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Segmen	108,452,840,502	669,002,566,032	5,051,170,827,729	5,828,626,234,263	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	--	--	--	3,945,183,976,581	Liabilities that cannot be allocated
Jumlah Liabilitas	108,452,840,502	669,002,566,032	5,051,170,827,729	9,773,810,210,844	Total Liabilities

Segmen Operasi berdasarkan wilayah geografis:

a. Aset

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

Operating Segments based on Geographical Areas:

a. Aseets

	2020 Rp	2019 Rp
Sumatera Utara	14,893,138,615,507	14,863,319,045,958
Riau dan/ and Kepulauan Riau	1,050,063,479,319	1,107,556,120,624
Aceh	22,940,166,960	(1,503,013,671)
Jumlah/ Total	15,966,142,261,786	15,969,372,152,911

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. Liabilitas

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

c. Pendapatan Usaha

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

d. Laba Usaha

Sumatera Utara
Riau dan/ and Kepulauan Riau
Aceh
Jumlah/ Total

b. Liabilities

2020 Rp	2019 Rp
9,449,663,974,266	9,476,511,247,284
238,666,872,803	284,552,083,551
17,278,903,425	12,746,880,009
9,705,609,750,494	9,773,810,210,844

c. Revenues

2020 Rp	2019 Rp
2,875,863,398,383	4,708,067,152,326
926,514,037,748	892,183,881,458
39,532,834,605	39,131,701,736
3,841,910,270,736	5,639,382,735,520

d. Net Profit

2020 Rp	2019 Rp
365,038,905,629	282,365,765,354
313,443,140,263	313,053,009,020
(2,494,032,652)	2,790,407,389
675,988,013,240	598,209,181,763

42. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan

Perusahaan menerima Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/293/2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.153-SJK/SJS/02/2021 dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/2.4/078, yang secara bersama-sama disebut *Joint Mandated Lead Arranger*, masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021 perihal Surat Indikatif Penawaran Pemberian Kredit atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Penawaran pemberian fasilitas kredit *term loan* maksimal sebesar Rp5 Triliun dengan tujuan penggunaan *general purposes* termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan fasilitas eksisting dan *capital expenditure* Perusahaan dengan jangka waktu fasilitas selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.

PT Prima Terminal Petikemas

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. KP.38/1/18/PI-21.TU tanggal 4 Februari 2021, memutuskan pengangkatan Rafdinal sebagai Direktur Keuangan dan Umum, menggantikan Mokhtar yang diberhentikan sebagai Direktur Keuangan dan Umum.

42. Subsequent Events

The Company

The Company received Letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/293/2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.153-SJK/SJS/02/2021 dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. BIN/2.4/078, collectively called *Joint Mandated Lead Arranger*, dated February 18, 2021, respectively, regarding of *Indicative Letter of Credit Offer on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*. Offering a *maximum term loan credit facility amounting to Rp5 trillion with general purposes but but not limited to repayment of the Company's existing facilities and capital expenditure with a facility period of 10 years from the signing of the credit agreement*.

PT Prima Terminal Petikemas

Based on the Shareholders Circular Decree No. KP.38/1/18/PI-21.TU dated February 4, 2021, decided to appoint Rafdinal as Director of Finance and General, replacing Mokhtar who was dismissed as Director of Finance and General Affairs

PT Prima Husada Cipta Medan

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. KP.38/2/2/PI-21.TU dan No. 9/Srt/II/KOP.KP-21 tanggal 18 Februari 2021, menyetujui keputusan pemberhentian Rudi Susanto sebagai Direktur Perusahaan dan mengangkat Imron Eryandy sebagai Direktur Perusahaan.

PT Prima Husada Cipta Medan

Based on the Shareholders Decision Outside the General Meeting of Shareholders No. KP.38/2/2/PI-21.TU and No. 9/Srt/II/KOP.KP-21 dated February 18, 2021, approved the decision to dismiss Rudi Susanto as Director of the Company and appointed Imron Eryandy as Director of the Company.

44. Reklasifikasi

44. Reclassification

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2019 dan 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Certain accounts of Consolidated Financial Statements in the 2019 and 2018 have been reclassified to conform with the presentation of Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020, as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum	Reklasifikasi/	Setelah	
	Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reclassification Rp	Reclassification/ After Reclassification Rp	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha				Account receivables
Pihak Berelasi	32,863,292,671	(14,751,898,622)	18,111,394,049	Related Parties
Pihak Ketiga	49,867,653,599	52,711,181,492	102,578,835,091	Third Parties
Piutang Lain - lain	--	140,247,755,871	140,247,755,871	Other receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	178,207,038,741	(178,207,038,741)	--	Other Current Financial Assets
Jumlah	260,937,985,011	--	260,937,985,011	Total
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	5,249,111,596,949	869,329,635,972	6,118,441,232,921	Fixed Assets - Net
Aset Dalam Penyelesaian	869,329,635,972	(869,329,635,972)	--	Assets Under Construction
Jumlah	6,118,441,232,921	--	6,118,441,232,921	Total
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha				Account Payables
Pihak Berelasi	56,306,817,456	141,816,028,801	198,122,846,257	Related Parties
Pihak Ketiga	1,123,998,629,991	568,575,554,068	1,692,574,184,059	Third Parties
Uang Panjar	--	6,882,913,253	6,882,913,253	Advance from Customer
Uang Titipan	--	28,794,888,017	28,794,888,017	Fund Retained
Utang Lain-lain	--	5,687,533,567	5,687,533,567	Other Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	5,687,533,567	(5,687,533,567)	--	Other Short-term Financial Liabilities
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:				Current Portion of Long-term Liabilities:
Pendapatan Diterima di Muka	98,504,909,646	(35,677,801,270)	62,827,108,376	Unearned Income
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,284,497,890,660	710,391,582,869	1,994,889,473,529	Total Short-Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya				Other Long-term Financial Liabilities
Pihak Berelasi	141,816,028,802	(141,816,028,802)	--	Related Parties
Pihak Ketiga	568,575,554,067	(568,575,554,067)	--	Third Parties
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	710,391,582,869	(710,391,582,869)	--	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1,994,889,473,529	--	1,994,889,473,529	TOTAL LIABILITIES
	31 Desember 2018/ December 31, 2018			
	Sebelum	Reklasifikasi/	Setelah	
	Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reclassification Rp	Reclassification/ After Reclassification Rp	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang Usaha				Account Receivables
Pihak Ketiga	82,381,146,735	45,963,612,300	128,344,759,035	Third Parties
Piutang Lain - lain	--	152,502,106,674	152,502,106,674	Other Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	198,465,718,974	(198,465,718,974)	--	Other Current Financial Assets
Jumlah	280,846,865,709	--	280,846,865,709	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31 Desember 2018/ December 31, 2018			
Sebelum Reklasifikasi/ Before reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ after reclassification Rp	
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	3,196,331,883,366	2,517,909,429,525	5,714,241,312,891
Aset Dalam Penyelesaian	2,517,909,429,525	(2,517,909,429,525)	--
Jumlah	5,714,241,312,891	--	5,714,241,312,891
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Account Payables
Pihak Berelasi	53,506,850,534	267,998,337,793	321,505,188,327
Pihak Ketiga	582,342,297,799	871,311,093,883	1,453,653,391,682
Uang Panjar	--	9,201,376,083	9,201,376,083
Uang Titipan	--	22,354,600,138	22,354,600,138
Bagian Lancar dari Liabilitas Jangka Panjang:			Current Portion of Long-term Liabilities:
Pendapatan Diterima di Muka	74,312,072,313	(31,555,976,221)	42,756,096,092
Utang Lain-lain	--	4,170,747,659	4,170,747,659
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			Other Payables
Lainnya	4,170,747,660	(4,170,747,660)	--
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	714,331,968,306	1,139,309,431,675	1,853,641,399,981
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			Other Long-term Financial Liabilities
Lainnya			Related Parties
Pihak Berelasi	287,207,945,000	(287,207,945,000)	--
Pihak Ketiga	852,101,486,675	(852,101,486,675)	--
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,139,309,431,675	(1,139,309,431,675)	--
JUMLAH LIABILITAS	1,853,641,399,981	--	1,853,641,399,981

31 Desember 2019/ December 31, 2019			
Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp	
Pendapatan Operasi	--	3,104,233,009,111	3,104,233,009,111
Reduksi Pendapatan	--	(186,734,654)	(186,734,654)
Pendapatan Usaha	3,104,046,274,457	(3,104,046,274,457)	--
Beban Operasi	--	2,505,837,092,694	2,505,837,092,694
Beban Pokok	1,942,982,362,949	(1,942,982,362,949)	--
Beban Pemasaran	31,112,096,589	(31,112,096,589)	--
Beban Umum dan Administrasi	531,742,633,156	(531,742,633,156)	--
Pendapatan Non-usaha - Bersih	--	(29,984,043,453)	(29,984,043,453)
Rugi Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya	--	(1,241,661,903)	(1,241,661,903)
Pendapatan Non-usaha	170,167,440,168	(170,167,440,168)	--
Pendapatan Keuangan	--	83,524,481,960	83,524,481,960
Beban Non-usaha	(118,890,877,639)	118,890,877,639	--
Beban Keuangan	(360,751,288,137)	(1,022,214,075)	(361,773,502,212)
Jumlah	5,300,408,641,543	--	5,300,408,641,543

31 Desember 2019/ December 31, 2019			
Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3,078,864,025,692	76,047,987,951	3,154,912,013,643
Pembayaran Kepada Pemasok, Karyawan dan Lainnya	(2,273,264,483,943)	(200,516,176,687)	(2,473,780,660,630)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(124,992,827,250)	(73,406,408,722)	(198,399,235,972)
Penghasilan Bunga	--	85,557,939,556	85,557,939,556
Penerimaan Kas Lain-lain	165,904,546,213	(165,904,546,213)	--
Pembayaran Kas Kepada Karyawan dan Manajemen	(61,157,253,711)	61,157,253,711	--
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja	(14,340,587,931)	14,340,587,931	--
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	771,013,419,070	(202,723,362,473)	568,290,056,597

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi dan Aset Lainnya	(2,747,801,942,394)	2,065,858,959,527	(681,942,982,867)	Acquisition of Fixed Assets, Investment Properties and Other Assets
Perolehan Aset Takberwujud	(177,476,871,404)	(1,643,987,979,227)	(1,821,464,850,631)	Acquisition of Intangible Assets
Pengeluaran Investasi	500,000,000	(500,000,000)	--	Investment Expenditure
Penanaman Investasi Jangka Panjang	(125,000,000)	125,000,000	--	Long-term Investments
Penghapusan Aset Takberwujud	81,816,075,950	(81,816,075,950)	--	Intangible Assets Write-Off
Penghapusan Aset Tetap	105,684,116,101	(105,684,116,101)	--	Fix Assets Write-Off
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2,737,403,621,747)	233,995,788,249	(2,503,407,833,498)	Total Net Cash Flows Used for Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank	2,386,297,848,190	162,340,520,510	2,548,638,368,700	Receipt of Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(17,992,184,312)	(176,481,050,302)	(194,473,234,614)	Payment of Bank Loans
Pembayaran Beban Keuangan	(342,205,990,032)	(18,545,298,105)	(360,751,288,137)	Payment of Financial Expenses
Penerimaan Setoran Modal pada Entitas Anak	79,319,923,273	(119,923,273)	79,200,000,000	Receipt of Paid-in Capital in Subsidiaries
Pembayaran Dividen	(320,668,325,394)	1,533,325,394	(319,135,000,000)	Payment of Dividend
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1,784,751,271,725	(31,272,425,776)	1,753,478,845,949	Total Net Cash Flows Provided from Financing Activities
Jumlah Arus Kas Bersih	(181,638,930,952)	--	(181,638,930,952)	Total Net Cash Flows

45. Informasi Penting Lainnya

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi menerbitkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Perpres berupa aturan turunan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang No. 11/2020. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

45. Other Important Information

Job Creation Law

In February 2021, the Government officially issued 45 Government Regulations (PP) and 4 Perpres in the form of delegated legislation of the Job Creation Law which was previously ratified on November 2, 2020 as Law No. 11/2020. As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Job Creation Law, as well as the impact on the Group's consolidated financial statements.

46. Standar Akuntansi yang Sudah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

46. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is:

- PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amendemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis".
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**47. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk terbit tanggal 27 Februari 2021.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows :

- PSAK 112: "Accounting for Endowments";
- PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business".
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows :

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows :

- PSAK 74: Insurance Contract.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

**47. Responsibility and Issuance
Authorization of for Consolidated Financial
Statement**

The management of the Group is responsible for the preparation and content of the consolidated financial statements authorized by the Board of Directors for publication on February 27, 2021.